PERTARUNGAN IDEOLOGI

Pancasila di Tengah Kepungan Ideologi – Ideologi Dominan

Penulis:
EKO HANDOYO
RAHMAT PETUGURAN
HERI ROHAYUNINGSIH

UNNES
Penerbit UNNES Press
Nomor ISBN.....

PERTARUNGAN IDEOLOGI

PANCASILA DI TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DOMINAN

Eko Handoyo
Rahmat Petuguran
Heri Rohayuningsih

Penerbit

UNNES PRESS

Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50232

Telp/faks. (024) 8415032

Hak Cipta @ pada Penulis dan dilindungi Undang-Undang Penerbitan
Hak Penerbitan pada Unnes Press, dicetak oleh Unnes Press

Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50232, telp/faks. (024) 8415032

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari Penerbit.

PERTARUNGAN IDEOLOGI
PANCASILA DI TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DOMINAN

Eko Handoyo
Rahmat Petuguran
Heri Rohayuningsih

Desain Cover : Basuki
Lay out : Moh. Tamrin
Cetakan Pertama : November 2018

PERTARUNGAN IDEOLOGI
PANCASILA DI TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DOMINAN/Eko Handoyo, dkk.;
Cet. 1-, illus,- Semarang: Unnes Press, 2018
x + 278 hal; 23,5
I.
I. Eko Handoyo, dkk.; II. Judul

ISBN 9786022851356

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Daniel Bell pernah mengatakan bahwa ideologi telah mati, tetapi kenyataannya ideologi tidak pernah mati, melainkan mengalami metamorfose, berubah atau beradaptasi dengan sistem nilai lainnya. Sebagai contoh, ideologi individualisme-liberalisme-kapitalisme yang di kalangan pemikir Marxis-Sosialis diprekdisikan bangkrut, namun realitasnya sistem keyakinan tersebut menurunkan sistem nilai lain yang bersumber pada ideologi tersebut, yaitu sistem neoliberal dan developmentalisme. Demikian pula, ideologi marxisme-sosialisme-komunisme yang diperkirakan tidak akan dapat bertahan hidup, namun kenyataannya masih tumbuh dan berkembang di masyarakat. Komunisme Uni Soviet telah tumbang tetapi sistem tersebut masih dipertahankan di negara Rusia dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Demikian pula di Asia, komunisme masih menancap kuat sebagai sistem nilai bernegara di negara China, Vietnam, dan Korea Utara.

Fenomena tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ideologi sebagai sistem nilai atau sistem keyakinan masih menjadi panduan dalam menata dan mengatur kehidupan individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa, sebab sebagaimana diungkapkan Karl Mannheim, sistem

keyakinan atau ideologi berkaitan dengan situasi di mana individu atau masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan sosial ekonomi dan pengalaman hidup. Ideologi, bagi Mannheim, muncul dari kepentingan-kepentingan dan pengalaman hidup masyarakat.

Buku ini hadir di tengah pembaca untuk meyakinkan bahwa ideologi sebagai sistem nilai selalu ada dan akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula, ideologi Pancasila yang secara partikular berlaku bagi bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi kepungan ideologi besar di dunia, seperti kapitalisme, neoliberalisme, developmentalisme, sosialisme, dan marxisme.

Kejeniusan esensial yang dimiliki Pancasila dan kemampuan terapnya dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, menjadikan Pancasila tetap dapat menjadi bintang pemandu dan sebagai ideologi yang hidup (*living ideology*) dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia di tengah perkembangan global yang menuntut tidak saja kesiapan untuk berintegrasi dengan perkembangan global, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang menjadi sumber ideologi Pancasila.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang memberi dukungan dan berkontribusi terhadap terbitnya buku ini.

1. Rektor UNNES,
2. Wakil Rektor Bidang Akademik,
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial,
4. Anggota penulis yang turut menyumbangkan gagasan dalam buku ini.

Buku ini masih jauh dari sempurna, karena tidak semua sistem nilai atau ideologi di dunia dibahas dalam buku ini. Buku ini juga tidak menjelaskan ideologi radikal atau radikalisme yang berkembang pesat pada abad 21, dikarenakan pembahasan lebih difokuskan pada eksistensi ideologi Pancasila di tengah berkembangnya ideologi inividualisme-liberalisme-kapitalisme dengan sistem nilai turunannya dan ideologi sosialisme, marxisme dan komunisme.

Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari para ilmuwan, praktisi, dan pemerhati ideologi terhadap isi buku ini. Semoga di waktu ke depan dapat direvisi, ditambahkan, dan disempurnakan.

Semarang, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii
Prakata iv
Daftar Isi vii
BAB I. IDEOLOGI POLITIK 1
A. Hakikat Ideologi Politik 3
B. Karakteristik, Dimensi, dan Fungsi Ideologi Politik 11
C. Ideologi Politik Dominan 24
D. Penutup 26

BAB II. KAPITALISME 30
A. Sejarah Kapitalisme 30
B. Peran Kapital 38
C. Sistem Pasar Bebas Penumbuh Kapitalisme 48
D. Kapitalisme Bertahan dan Berevolusi 51
E. Kritik terhadap Kapitalisme 57
F. Penutup 68

BAB III. NEOLIBERALISME 72
A. Sejarah Neoliberalisme 72
B. Peran Negara dalam Sistem Neoliberal 78
C. Kritik terhadap Neoliberalisme 89
D. Penutup 95

BAB IV. DEVELOPMENTALISME 98
A. Sejarah Developmentalisme 98
B. Teori-teori Pembangunan 102
C. Developmentalisme di Indonesia 113
D. Kritik terhadap Pembangunanisme (Developmentalisme) 123
E. Penutup 127

BAB V. SOSIALISME 129
A. Sejarah Sosialisme 131
B. Sosialisme sebagai Praktik Sosial Ekonomi 145
C. Kritik terhadap Sosialisme 153
D. Penutup 156

BAB VI. MARXISME 159
A. Sejarah Marxisme 160
B. Pilar Marxisme 162
C. Instrumen Analisis terhadap Masyarakat 164
D. Aliran Marxisme 170
E. Neo-Marxisme 178
F. Kritik terhadap Marxisme 181
G. Penutup 184

BAB VII. PANCASILA BERTAHAN DI TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI DOMINAN 186
A. Sejarah Ideologi Pancasila 189
B. Pancasila Ideologi berwatak Integralistik 200
C. Surutnya Peradaban Individualistik dan Komunisme 215
D. Tumbuhnya Peradaban Integralistik 227
E. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila 237
F. Prospek Pancasila di Tengah Arus Globalisasi 240
G. Kritik terhadap Pancasila 247
H. Penutup 255

DAFTAR PUSTAKA 259
GLOSARIUM 268
INDEKS 273

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Kapitalisme dan Krisis Ekonomi di Dunia	65
Tabel 3.1	Rasio Pendapatan Si Kaya dan Si Miskin di Dunia	92
Tabel 5.1	Perbedaan Kapitalisme dan Sosialisme	130

BAB I
IDEOLOGI POLITIK

Setiap bangsa memiliki sistem nilai atau ideologi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, bahkan individu warga negara pun memiliki ideologi yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan dalam interaksinya dengan individu lainnya dalam suatu negara. Ideologi terlihat juga pada sikap politik para politisi dari partai politik. Hal itu terutama terlihat pada sistem nilai politisi yang partainya berkuasa dan politisi yang partainya sedang tidak berkuasa.

Ideologi memengaruhi kehidupan individu maupun sosial (Sargent, 1993). Setiap program televisi, berita surat kabar, informasi di media sosial, buku, bahkan film baik secara langsung maupun tidak langsung menghadirkan ideologi. Pemahaman terhadap berbagai ideologi akan membantu individu memahami sistem nilai yang dianut oleh individu lain terutama dalam suatu interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok.

Ideologi berubah menjadi ideologi politik manakala diimplementasikan dalam bidang politik. Ideologi politik berarti gagasan etis bagaimana suatu negara diselenggarakan untuk mewujudkan tertib politik dan kesejahteraan masyarakat. Makna gagasan etis tersebut

adalah sesuai dengan karakteristik ideologi. Sebagai contoh, individualisme-liberalisme memandang bahwa tertib politik akan terwujud manakala setiap individu diberi kebebasan dalam menentukan siapa yang dikehendaki menjadi pemimpin. Dalam ideologi Pancasila, tertib politik akan terwujud apabila individu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sistem politik Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kesejahteraan akan terwujud jika individu diberi kebebasan tanpa ada hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ini adalah pandangan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ideologi Pancasila memandang bahwa kesejahteraan akan tercapai ketika individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak mematikan aktivitas ekonomi ekonomi individu lainnya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi yang dikejar oleh ideologi Pancasila agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ideologi politik hanya akan menjadi kajian teoretis belaka manakala tidak diikuti oleh perencanaan dan program yang jelas. Sebagaimana diungkapkan Carl J. Friedrich (dalam Christenson et al. 1971) bahwa ideologi merupakan sistem ide yang berhubungan dengan tindakan. Itulah sebabnya ideologi politik memerlukan tindakan pendukung yang loyal dan fanatik untuk menjadikan ideologi sebagai sistem nilai individu, kelompok,

masyarakat, dan bangsa dalam mengelola berbagai aspek kehidupan nasional.

Bagian berikut memaparkan tentang hakikat ideologi dan ideologi politik, karakteristik ideologi, dimensi ideologi, fungsi ideologi serta ideologi politik dominan di dunia.

A. Hakikat Ideologi Politik

Istilah pertama yang muncul sebelum berkembang konsep ideologi politik adalah ideologi. Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ideologi adalah filsuf Perancis yaitu Antoine de Tracy pada tahun 1796 (Eatwell, 2004). Dia adalah seorang bangsawan yang bersimpati pada revolusi Perancis 1789. Karena pandangan dan keberpihakan tersebut, dia dipenjara oleh kelompok Jacobin yaitu kelompok revolusioner sayap kiri yang dipimpin oleh Robespierre. Setelah keluar dari penjara, de Tracy mencurahkan perhatian pada apa yang mengakibatkan tindakan barbar (teror) dan sikap tidak toleran yang berpengaruh terhadap tindakan brutal yang dilakukan kelompok Jacobin yang mengatasnamakan rakyat. De Tracy adalah pengikut rasional gerakan abad 18 yang dikenal sebagai penganut pencerahan yang bersikap kritis terhadap otoritas tradisional dan mistifikasi ajaran agama serta prihatin terhadap tindakan menyimpang dari gerakan Robespierre dan kelompok Jacobin lainnya.

Ideologi berasal dari bahasa Yunani "*ideologia*" yaitu ajaran mengenai idea dan merupakan komposisi dari pengertian idea, artinya gagasan atau fenomen dan logos, artinya akal (Kusumohamidjojo, 2015).

David Miller (dalam Kusumohamidjojo, 2015) merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respons praktis kita terhadapnya

Ideologi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, dan emosi-emosi yang menentukan tindakan kolektif (Rejai, 1991).

Steger (2005) mendefinisikan ideologi sebagai sistem gagasan yang sangat luas diikuti keyakinan yang terpola, norma dan nilai pemandu serta gagasan regulatif yang diterima sebagai kenyataan atau kebenaran oleh sejumlah kelompok.

Ideologi dalam implementasinya tidak hanya menawarkan gambaran yang koheren mengenai dunia sebagaimana adanya, namun juga dunia bagaimana seharusnya. Pengalaman umat manusia yang sangat kompleks oleh ideologi dibuat gambaran yang sederhana dan mudah dipahami yang memberikan orientasi normatif

dalam ruang dan waktu serta dalam alat dan tujuan (Steger, 2005).

Ideologi dipahami de Tracy sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan (Eatwell, 2004). Berdasarkan pandangan tersebut, de Tracy hendak menunjukkan arah yang benar kepada masyarakat Perancis yang saat itu dipandang tersesat. De Tracy ingin menunjukkan ide-ide mana yang salah dan ide-ide mana yang benar agar masyarakat dapat diperbaiki. Salah satu usulan de Tracy adalah mengembangkan sistem pendidikan sekuler yang diyakini mampu menghasilkan manusia yang lebih baik.

Pengaitan ideologi dengan ilmu sebagaimana dilakukan de Tracy tidak bertahan lama. Istilah ideologi berangsur menjadi istilah negatif yang mengacu pada objek, bukan sebagai kajian ilmiah. Tokoh pertama yang menggunakan istilah ideologi sebagai istilah negatif adalah Napoleon Bonaparte. Pada awalnya Napoleon tertarik dan bersimpati pada pemikiran de Tracy, tetapi setelah menjadi kaisar Perancis, ia mengolok-olok ide de Tracy dan kelompoknya sebagai *ideologue*. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan Napoleon untuk memperoleh dukungan dari kelompok tradisional terutama gereja Katolik.

Ideologi dalam konotasi negatif ini dipahami sebagai sistem ide yang palsu dan salah secara moral yang didesain

untuk menipu, merusak, dan memperbudak (Christenson et al., 1971).

Makna ideologi dalam pengertian negatif digunakan oleh Karl Marx. Ideologi negatif dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyelubungi kepentingan masyarakat kapitalisme. Marx mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat sasaran dan gagasan yang mengarahkan cita-cita seseorang, harapan-harapannya, serta tindakan-tindakannya (Kusumohamidjojo, 2015).

Marx memahami ideologi bukan dalam pengertian ide besar yang memengaruhi masyarakat. Bersama Engels, Marx percaya bahwa ide-ide kelas penguasa berada dalam setiap masa ide-ide yang berkuasa, yakni kelas yang merupakan kekuatan material dalam masyarakat sekaligus merupakan kekuatan intelektual yang berkuasa (Eatwell, 2004). Bagi Marx, kelas yang memiliki alat produksi material yang berkuasa mengontrol alat produksi mental.

Ide sebagai sesuatu yang sangat penting dalam sejarah kehidupan sosial ditentang oleh Marx. Menurut Marx, keberadaan sosial yang menentukan kesadaran. Kekuatan ekonomi bukan pemimpin atau ide besar yang menentukan dan membawa kemajuan masyarakat. Karenanya, ideologi menjadi prinsip legal, politis, estetis, filosofis, bahkan religius yang memperkuat masyarakat kapitalis.

Ideologi merupakan kesadaran palsu, demikian ungkap Engels (Eatwell, 2004). Contohnya adalah negara demokrasi liberal adalah negara yang netral, tetapi kenyataannya negara tersebut tidak netral, tetapi berpihak kepada kaum kapitalis atau pemodal. Hukum yang dibuat pun bukan untuk menciptakan keadilan bagi semua, tetapi realitasnya disusun untuk memenuhi kepentingan penguasa atau kapitalis.

Setiap tindakan seseorang atau pun kelompok selalu dipengaruhi atau digerakkan oleh sistem nilai tertentu. Sistem nilai atau keyakinan itu disebut ideologi. Ideologi bagai cermin, yakni bagaimana kita melihat diri seperti apa adanya. Ideologi juga bagai jendela bagi pihak lain untuk meneropong kehidupan kita, sehingga diharapkan mereka memahami apa prinsip hidup kita dan apa yang kita lakukan, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan kita. Ideologi juga seperti kamera, yakni bagaimana kita memotret kehidupan secara detil, utuh dan jelas. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami kehidupan secara utuh dan komprehensif, kehadiran ideologi sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak akan ada arah yang jelas.

Ideologi selalu berkaitan dengan politik. Mengacu pendapat Carver, Steger (2005) menyatakan bahwa ada ruang khusus bagi ideologi dalam politik. Politik dipahami

sebagai arena publik tempat berbagai agenda pembicaraan dikaitkan dengan kepentingan kekuasaan dari kelompok atau kelas tertentu. Ideologi selalu memiliki dimensi politik, sebab pada akhirnya ideologi menyoal cara-cara penerapan, pembenaran, dan perubahan kekuasaan dalam masyarakat (Steger, 2005).

Heywood (2016) mengemukakan bahwa ideologi memengaruhi kehidupan politik dengan cara: (1) menstrukturkan pemahaman politik sehingga dapat menetapkan tujuan dan menginspirasi tindakan, (2) membentuk hakikat sistem politik, dan (3) bertindak sebagai sejenis semen sosial.

Namun demikian, tidak semua pemikir politik menerima ideologi sebagai variabel penting bagi politik. Berbagai ide atau ideologi kadang hanya dilihat sebagai tirai jendela yang digunakan untuk menyembunyikan realitas politik yang lebih dalam (Heywood, 2016).

Ideologi memiliki arti positif, yakni memiliki peran etis dalam mengarahkan tindakan politik. Kusumohamidjojo (2015) memandang ideologi politik sebagai gagasan-gagasan etis mengenai bagaimana suatu negara harus diselenggarakan.

Christenson, et al. (1971) mendefinisikan ideologi politik sebagai sistem keyakinan yang menjelaskan dan menjustifikasi tertib politik terpilih dalam masyarakat baik

yang sudah ada maupun yang diusulkan, dan menawarkan strategi (proses, keteraturan institusional, dan program) untuk mencapainya.

Ideologi politik adalah bentuk pemikiran politik yang memberikan akses langsung yang penting memahami bentuk dan sifat teori politik, kekayaan, ragam, dan rinciannya (Eatwell, 2004). Suatu ideologi politik merupakan sekumpulan kepercayaan dan pemikiran empiris dan normatif yang relatif koheren yang terfokus pada masalah hakikat manusia, proses sejarah dan pengaturan sosiopolitik. Ideologi tersebut biasanya berkaitan dengan suatu program untuk persoalan tertentu dalam jangka pendek. Ideologi politik merupakan hasil pemikiran kolektif, seperti halnya ideologi Pancasila yang merupakan pemikiran kolektif para *founding fathers* Indonesia dan karena merupakan tipe ideal, maka menurut Eatwell tidak boleh dicampuradukkan dengan gerakan, partai, atau rezim tertentu yang menggunakan nama itu. Pandangan Eatwell tersebut tidak tepat, karena suatu ideologi akan efektif apabila ideologi tersebut dilekatkan dengan gerakan dari suatu kelompok, partai, bahkan rezim pemerintahan. Tanpa wadah, sarana, atau organisasi yang mengimplementasikan ide-ide besar, maka ideologi hanya menjadi kajian teoretis yang melayang di langit tidak pernah membumi selamanya.

Dalam perspektif politik, ideologi dipandang berguna karena dua hal. Pertama, hakikat ideologi yang berlaku di masyarakat memengaruhi cara kerja pemerintah. Ideologi akan memengaruhi cara rakyat berpartisipasi dan bagaimana pemerintah mengambil keputusan (Ethridge dan Handelman, 2016). Kedua, tingkat konsensus ideologi dalam sistem politik berpengaruh penting terhadap kadar stabilitas. Jika masyarakat mengalami konflik ideologi yang sangat parah, seperti yang dialami Nikaragua tahun 1980-an, maka kehidupan politik tidak stabil dan sering diwarnai kekerasan. Konflik ideologi yang pernah dialami Indonesia pada masa Orde Lama menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan pemerintahan.

Ideologi politik berbeda dengan teori politik dan filsafat politik, namun memiliki kaitan dengan kedua konsep tersebut. Teori politik merujuk pada teori ilmiah atau generalisasi tentang politik dan masyarakat yang didasarkan pada data. Bagi Christenson et al. (1971) teori politik merupakan penyelidikan tentang pengetahuan politik dan realitas sosial. Teori politik bebas nilai. Filsafat politik tidak bebas nilai, karena filsafat politik berfungsi evaluatif dan normatif. Filsafat politik berisi seperangkat ide tentang bagaimana pemerintahan dan rakyat seharusnya berperilaku. Christenson et al. (1971) memandang filsafat politik sebagai penyelidikan tentang prinsip-prinsip

mengenai negara dan masyarakat yang baik. Setiap ideologi politik berisi teori dan filsafat politik tentang bagaimana rakyat dan pemerintah bertindak dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Ideologi politik menyerap teori dan filsafat politik sebagai suatu sistem keyakinan (*beliefs system*) yang memiliki sifat empiris sekaligus juga mengandung analisis normatif dalam perilaku.

B. Karakteristik, Dimensi dan Fungsi Ideologi

1. Karakteristik Ideologi

Christenson, et al. (1971) merinci 9 karakteristik ideologi. Pertama, ideologi muncul dari kondisi krisis. Ideologi muncul manakala orang memiliki persepsi yang kuat dan merasa hidupnya terlantar atau dieksploitasi di bawah tertib politik sebelumnya atau diancam statusnya oleh perubahan fundamental yang terjadi di masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kehidupan masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan melahirkan ideologi agar rakyat dapat menemukan kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, ideologi liberal muncul ketika masyarakat mengalami suasana kehidupan yang tidak memuaskan dalam sistem konservatif dan feodal. Demikian pula, para penggagas sosialisme percaya bahwa ketidakberhasilan ideologi liberalisme-kapitalisme dalam menciptakan keadilan, menyebabkan lahirnya ideologi sosialisme-marxixme.

Kedua, ideologi memiliki ruang lingkup yang luas dan bervariasi. Dalam dimensi horisontal, ideologi memiliki pandangan dunia (*weltanschauung*) yang menyeluruh. Ideologi totalitarianisme misalnya, memerlukan otoritas publik untuk mengatur berbagai aspek signifikan dalam kehidupan. Dalam dimensi vertikal, ideologi mengandung beberapa strata pemikiran dan keyakinan, dari ide-ide yang sederhana hingga simbol yang kompleks yang mengekspresikan ide-ide dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ideologi eksis dalam berbagai basis dan menghasilkan berbagai derajat pemahaman dan penerimaan.

Ketiga, ideologi merupakan pola sistematik dari pemikiran politik. Ideologi yang dipasarkan dalam arena politik bukanlah ide yang serampangan dan terserak, tetapi terpola dan teratur sebagai ide yang menawarkan penjelasan dan visi dari nasib umat manusia. Ideologi merupakan pola ide-ide yang terintegrasi dalam satu atau beberapa premis dasar yang berisi aturan perubahan dan pengembangan. Mengutip pandangan George Orwell (dalam Christenson et al. 1971), ideologi merupakan sesuatu ide yang abstrak, bukan gambaran realitas, tetapi merupakan model yang diturunkan dari persepsi realitas.

Keempat, ideologi memiliki elemen empiris dan normatif. Elemen empiris menegaskan bahwa kondisi-

kondisi tertentu eksis, sedangkan elemen normatif menegaskan bahwa tertib politik tertentu telah dipilih. Ideologi sebagai sistem keyakinan memuat sejumlah nilai yang berhubungan dengan penerimaan terhadap proposisi deskriptif tertentu. Ideologi memuat sesuatu yang ada dan sesuatu yang seharusnya terjadi dalam politik.

Kelima, ideologi cenderung ekslusif, absolut, dan universal. Setiap ideologi memiliki logika dan bukti sendiri yang secara ekslusif mengandung prinsip-prinsip kemajuan dan keadilan yang benar. Ideologi bukan subjek untuk bargaining dan kompromi, tetapi merupakan aturan dan standar tingkah laku yang tidak dapat dinegosiasikan. Meskipun ideologi muncul dari dan diterapkan dalam konteks politik yang unik, tetapi memiliki cakupan universal. Sebagai contoh, ideologi liberalisme-kapitalisme yang pada awalnya berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, dalam perkembangannya memengaruhi kehidupan ekonomi dan politik negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Keenam, ideologi adalah argumen persuasif yang didesain untuk memotivasi keterlibatan aktif. Ideologi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membujuk dan menggerakkan emosi. Ideologi mampu menginspirasi dan memelihara sistem keyakinan dan tindakan yang

mentransformasikan kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ide-ide yang ditransformasikan.

Ketujuh, ideologi bersifat personal, memiliki pahlawan, seperti bapak pendiri bangsa, pemimpin karismatis, dan para martir, memiliki dokumen suci yang memuat manifesto, deklarasi, dan konstitusi, serta sejumlah ritual seperti janji-janji, lagu kebangsaan, salam hormat, dan hari libur nasional.

Kedelapan, memerlukan pembangunan, tetapi juga resisten terhadap perubahan fundamental. Para ideologis menawarkan ide-ide bagai barang-barang yang komplet dan otoritatif, tetapi juga resisten terhadap revisi terhadap hasil ciptaannya. Jikalau ada perubahan terhadap sistem keyakinan tersebut, perubahan tersebut cenderung datang perlahan dan menyakitkan serta perubahan itu tergantung pada sifat tertutup atau terbuka dari struktur ideologi.

Kesembilan, ideologi terjalin dalam gerakan politik. Ideologi memerlukan organisasi, karena melalui organisasi itu ideologi didiseminasikan dan diimplementasikan.

2. Dimensi Ideologi

Rejai (1991) mengemukakan 5 dimensi ideologi yang memungkinkan suatu ideologi dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu (1) *cognition* meliputi pengetahuan dan keyakinan, (2) *affect* mencakup perasaan dan emosi, (3) *valuation* berupa norma dan penilaian, (4) *program*

berwujud rencana dan tindakan, serta (5) *social base*, yakni adanya kelompok pendukung dan kolektivitas.

Dimensi kognitif (*cognition*) merujuk pada ideologi sebagai pandangan dunia, pandangan tentang masyarakat dan politik, dan persepsi tentang realitas sosial dan politik. Pandangan dunia memuat elemen pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan memuat aturan-aturan logik agar ideologi memiliki konsistensi internal. Ideologi yang berisi pengetahuan tersebut juga seperti ilmu dapat diuji replikabilitas dan verifiabilitasnya. Sementara itu, keyakinan atau *beliefs* tidak memerlukan koherensi logika atau dibangun secara saintifik. Keyakinan tentang sesuatu diterima begitu saja sebagai basis sosialisasi, kebiasaan atau repetisi tindakan. Dengan kata lain, ideologi sebagai *beliefs* tidak memerlukan konsistensi antara keyakinan (*beliefs*) dan realitas.

Ideologi sebagai *beliefs* bisa saja mengandung elemen ilusi atau mitos. Bahkan ideologi mungkin memiliki mitos besar atau mitos kecil. Sebagai contoh, ideologi komunis memiliki mitos masyarakat tanpa kelas dan kesatuan kelas pekerja. Nazi pada era Jerman mempunyai mitos ras super dan pemimpin superhuman. Amerika Serikat dalam setengah abad yang lalu memiliki Presiden Kennedy dengan mitos New Frontier, Presiden Johnson dengan Great Society, Presiden Nixon dengan Generation of Peace, Presiden Carter

dengan Human Rights, Presiden Reagan dengan Counterterrorism, dan Presiden Bush dengan Thousand Points of Light. Indonesia di bawah Presiden Soekarno memiliki mitos Revolusi Belum Selesai, Soeharto mempunyai mitos Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya, dan Presiden Joko Widodo dengan slogan Membangun Dari Pinggiran.

Mitos memerlukan penyederhanaan. Banyak sistem pemikiran tergantung pada penyederhanaan dan interpretasi terhadap suatu realitas (Rejai, 1991). Terkait hal ini, ilustrasi Plato dapat dijadikan sebagai referensi. Ketika kita melihat lanskap alam, misalnya pepohonan, maka di sana terdapat banyak jenis pohon, namun kita tidak melihat seluruh pohon. Demikian pula, begitu banyak kuda dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melihat semua kuda. Persepsi kita terhadap pohon dan kuda adalah sesuatu yang parsial dan sederhana. Pendek kata, fungsi mitos adalah menyederhanakan realitas kepada kita dan mengkomunikasikannya seketika.

Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan simbol. Seluruh ideologi politik terkait dengan persepsi simbolik dan komunikasi simbolik (Rejai, 1991). Simbol mengambil dua bentuk, yaitu linguistik dan nonlinguistik. Simbol linguistik digunakan dalam bentuk kata-kata dan ungkapan agar penyampaian pesan dapat berlangsung cepat

dan efisien. Misalnya, kita menyampaikan simbol "*law and order*", mengandung makna bahwa kita tidak mentoleransi tantangan terhadap *status quo*, kenyamanan, keamanan, dan kepemilikan. Contoh simbol linguistik adalah FLAG kepanjangan dari Family, Life, America, dan God. Hal itu menandakan bahwa di Amerika, keluarga itu penting dalam hidup masyarakat Amerika dan mereka percaya Tuhan. Ideologi ini berpengaruh terhadap kebijakan Amerika yang prokehidupan dan antiaborsi.

Simbol nonlinguistik sebagaimana praktik di Amerika adalah pembangunan Washington Monument dan Statue of Liberty. Simbol nonlinguistik ini hendak menjelaskan kepada publik mengenai sejarah bangsa Amerika dan perhatian Amerika kepada nilai kebebasan. Indonesia mempunyai simbol nonlinguistik yang sangat terkenal yaitu Monumen Nasional atau Monas yang dibangun Presiden Soekarno, yang menunjukkan kepada masyarakat dunia, khususnya di Asia bahwa Indonesia bukan negara kecil yang diremehkan kemampuannya dalam pembangunan.

Ideologi memiliki dimensi afektif (*affect*), yaitu mempunyai konten atau elemen emosi dan/atau rasional. Ideologi fasisme dan nazisme dominan pada konten emosional. Ideologi komunis memiliki konten rasional. Ideologi liberalisme-kapitalisme memiliki konten rasional dan kalkulasi. Ideologi demokrasi cenderung berkonten

rasional. Ideologi Pancasila memuat dua-duanya baik emosional maupun rasional.

Rejai (1991) menjelaskan bahwa suatu ideologi pada suatu saat bisa bersifat rasional dan pada saat lainnya dapat menunjukkan watak emosional. Suatu ideologi bersifat rasional manakala berada pada kondisi dan waktu normal; sedangkan pada saat krisis nasional, ideologi akan memperlihatkan watak emosional. Karakter emosional ini tampak sekali pada ideologi Pancasila ketika bangsa Indonesia mengalami perpecahan karena konflik etnis dan sosial serta konfrontasi dengan negara lain. Simbol "Pancasila Rumah Kita" yang dikumandangkan pada 3 tahun pertama pemerintahan Jokowi merupakan contoh dari upaya penguatan ideologi Pancasila dalam konteks emosi.

Dimensi afektif (*valuation*) dari ideologi dapat digunakan untuk melihat apakah suatu ideologi bersifat terbuka atau tertutup. Ideologi dikatakan terbuka apabila mengakui adanya informasi dan bukti baru serta mengalami modifikasi dan perubahan dalam prosesnya. Sebaliknya, ideologi bersifat tertutup jika tidak mengakomodasi adanya bukti dan informasi baru. Ada kalimat klise, "*my mind's made up*," pikiran saya sudah terbentuk. Itulah yang sering menjadi alasan mengapa pikiran-pikiran baru tidak bisa diterima dalam ideologi yang memiliki sifat tertutup.

Dimensi evaluatif dari ideologi menunjukkan adanya penilaian dengan dua cara, yaitu secara negatif, yaitu dengan mencela sistem sosial dan politik terdahulu sebagai sistem yang korup, tidak bermoral, serta menyuarakan propaganda yang menarik dengan prinsip-prinsip moral baru, dan secara positif, yakni menata seperangkat norma yang sesuai dengan rekonstruksi sosial dan politik, seperti kasus di Amerika dengan norma kebebasan, kesamaan, persaudaraan, dan humanitas (Rejai, 1991).

Ideologi dalam sisinya yag positif mengajukan arah yang jelas tentang masyarakat yang baik. Ideologi memberikan nilai tertinggi (*posit an ultimate value*) berupa kebaikan final, sebuah utopia. Ide Karl Marx tentang masyarakat tanpa kelas merupalan ilustrasi yang tepat terkait hal ini.

Dimensi program (*program*) dari ideologi mengandaikan bahwa nilai-nilai dan tujuan diwujudkan dalam sedikit atau banyak dari program kegiatan yang komprehensif. Ideologi telah menunjukkan sistem keyakinan yang berhubungan dengan tindakan serta juga mencari pola-pola tindakan spesifik untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Tindakan atau program dari ideologi diarahkan untuk memelihara dan mengabadikan status quo atau menuju perubahan dari tatanan sosial yang ada. Perubahan diperlukan baik oleh kaum reformis maupun

kaum radikal dengan cara membujuk dan mengedukasi rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan terbatas. Perubahan yang radikal, cepat, dan penuh kekerasan merupakan cara yang ditunjukkan ideologi totalitarian, seperti Nazi dan Komunis.

Dimensi basis sosial (*social bases*) mengandaikan bahwa ideologi memerlukan kelompok sosial, kelas, kolektivitas, atau bangsa (Rejai, 1991). Untuk menjadi ideologi harus memiliki basis massa. Kehadiran populasi dalam jumlah besar sebagai pendukung ideologi adalah dalam rangka memperoleh pemahaman dan komitmen untuk bertindak dari mereka agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Marxisme merupakan contoh dari ideologi potensial yang memobilisasi massa dan menjadi dorongan utama untuk melakukan tindakan kolektif. Fungsi mobilisasi ini tidak akan terjadi manakala tidak ada organisasi. Organisasi inilah yang menjembatani hubungan antara sistem keyakinan dengan tindakan (Rejai, 1991). Dalam organisasi ini membutuhkan fungsi elit. Pada ideologi komunis, fungsi ini dijalankan oleh sebuah Diktator Proletariat. Dalam ideologi Pancasila, fungsi ini dilakukan oleh sebuah Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat BP7 (masa Orde Baru) atau sekarang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

(UKP-PIP) yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ideologi memiliki beberapa level fungsional, yaitu (1) ideologi sebagai distorsi, (2) legitimasi, dan (3) integrasi (Steger, 2005). Pertama, ideologi sebagai distorsi adalah produksi citra-citra yang menyimpang dari realitas sosial. Proses distorsi menyembunyikan pertentangan antara penggambaran sesuatu dalam teori dengan perwujudannya pada tataran realitas material. Legitimasi merupakan level fungsional kedua dari ideologi. Dalam kaitan legitimasi, terdapat klaim legitimasi yang dibuat oleh otoritas yang berkuasa dan kepercayaan pada legitimasi otoritas diberikan oleh mereka yang tunduk pada pihak yang berkuasa. Contoh dari legitimasi adalah klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur khususnya di daerah pinggiran dan terpencil. Klaim tersebut diharapkan diakui oleh kekuatan politik dan masyarakat khususnya yang berseberangan dengan Jokowi. Level fungsional ketiga dari ideologi adalah integrasi. Dalam level yang paling dalam, menurut Riceour, ideologi memainkan peran mediasi atau integratif. Ideologi memberikan stabilitas kepada masyarakat saat ia menciptakan, mempertahankan, dan melindungi identitas sosial pribadi dan kelompok. Dalam fungsi ini, ideologi juga menawarkan berbagai simbol, norma, dan citra yang merangkai dan

mempertautkan identitas individu dengan identitas kelompok (Steger, 2005). Pancasila sebagai contoh fungsi integratif merupakan ideologi yang memberi identitas kepada bangsa Indonesia, sekaligus juga mampu mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia untuk bersatu membangun Indonesia mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Fungsi Ideologi

Orang menggunakan sistem keyakinan untuk membantu mereka dalam memahami kehidupan dan agar dapat hidup dalam lingkungan alam dan sosial mereka. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam kehidupan sosial, ideologi memiliki sejumlah fungsi. Christenson et al. (1971) menyebutkan 5 fungsi ideologi. Pertama, sebagai sistem keyakinan, ideologi menyediakan struktur kognitif yakni sebuah formula ide-ide melalui mana kehidupan dipersepsi, dipahami, dan diiterpretasikan. Orientasi kognitif dari ideologi politik membantu orang untuk menghindari ambiguitas dalm kehidupan mereka dan merasakan adanya kepastian dan keamanan. Kedua, ideologi menyediakan formula preskriptif atau sebagai panduan bagi tindakan individu dan sosial serta penilaiannya. Ideologi tidak hanya menyediakan alternatif sejumlah tindakan politik, tetapi juga menyediakan justifikasi diri untuk

mengevaluasi perilaku politik bagi pihak lain dan memberikan dasar bagi legitimasi politik. Ketiga, ideologi sebagai sarana pengelolaan konflik dan integrasi. Pada level personal, ideologi membantu individu dalam mengatasi konflik dalam dirinya dan dengan pihak lain serta memberikan rasa penyatuan dalam hidupnya melalui integrasi berbagai aspek kehidupan individu. Dalam aspek sosial, ideologi mengeliminasi berbagai konflik dan dan rutinitas lainnya di sepanjang jalur persaingan yang tidak mengganggu. Pendek kata, masyarakat tidak hanya memerlukan bagaimana konflik dikendalikan, tetapi juga bagaimana anggota-anggotanya terintegrasi secara politik. Keempat, ideologi melakukan identifikasi diri, dalam hal mana ideologi tidak hanya merupakan lensa melalui mana orang melihat dunia, tetapi juga merupakan cermin di mana mereka melihat dirinya dan jendela melalui mana yang lain melihatnya. Ideologi merupakan cara orang-orang dan bangsa mendefinisikan dan melihat dirinya dan harapan bagi yang lain untuk melihatnya dan menginterpretasikan tindakan mereka. Secara khusus, ideologi merupakan instrumen penting untuk identifikasi diri bagi anak-anak muda (Christenson et al., 1971). Kelima, ideologi sebagai kekuatan dinamis bagi kehidupan individu dan kolektif dan menyediakan misi dan tujuan yang sama serta menghasilkan komitmen untuk bertindak bersama. Preskripsi ideologi

tidak hanya merupakan standar perilaku, tetapi juga merupakan tujuan bersama yang harus dikejar, karena setiap ideologi menjanjikan kehidupan dan masyarakat yang baik. Dostoevsky berucap, "tanpa ideologi, orang tidak akan hidup dan juga tidak dapat mati" (Christenson et al., 1971).

C. Ideologi Politik Dominan

Ideologi liberalisme/kapitalisme dan sosialisme/ marxisme sejak dulu menjadi ideologi politik yang dominan di dunia. Jika muncul ideologi lainnya, itu pun merupakan varian atau turunan dari kedua ideologi tersebut. Misalnya, fasisme, ideologi totaliter, dan sosialisme demokratik merupakan varian dari ideologi sosialisme atau marxisme; sedangkan neoliberalisme dan developmentalisme merupakan varian dari ideologi liberalisme/kapitalisme. Munculnya feminisme merupakan respons dan sekaligus derivasi dari dan terhadap ideologi liberalisme dan sosialisme.

Liberalisme/kapitalisme merupakan ideologi besar yang dianut oleh banyak negara. Ideologi ini mengacu pada pemikiran John Locke tentang kebebasan manusia. Dengan kebebasan yang dimiliki, manusia dapat memaksimalkan karya kreatifnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Mekanisme pasar dengan *invisible hand* mampu mengatur kegiatan ekonomi dan menciptakan persaingan yang memungkinkan orang

beraktivitas ekonomi secara rasional. Kapitalisme yang bersumber pada sistem nilai liberal dipercaya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berlawanan dengan sistem liberalisme-kapitalisme yang lebih mengutamakan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, sistem sosialisme-marxisme yang kemudian diterapkan dalam sistem komunis menolak ide kebebasan individu. Para penganut ideologi ini meyakini bahwa kebebasan individu tanpa pengaturan dan pengendalian oleh sebuah kekuasaan yang otoritatif akan menghasilkan manusia rakus dan predator bagi lainnya, seperti halnya yang dikhawatirkan Thomas Hobbes.

Penganut sosialisme percaya bahwa dengan kepemilikan kolektif dimana negara menjadi pengendali bahkan sumber kekuasaan akan mampu menciptakan keadilan bagi semua. Sosialisme juga diyakini menebarkan prinsip egalitarianisme dan mengajarkan kedermawanan untuk membantu kaum miskin dan mencintai mereka seperti layaknya seorang saudara (Crick, 2001).

Ideologi liberalisme dan kapitalisme dalam abad 20 dan 21 dominan dibandingkan ideologi sosialisme-marxisme maupun ideologi turunan lainnya, karena di samping memenuhi dimensi ideologi yang diutarakan Rejai, misalnya adanya basis pendukung yang massif di Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika; juga karena ideologi tersebut

mampu beradaptasi dan menghasilkan bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern.

Saat ini tidak ada lagi implementasi ideologi yang rigit dan murni tanpa ada pengaruh dari ideologi lainnya. Sebagai contoh, China yang pada abad 19 dan 20 sangat kuat rasa komunismenya bersama dengan negara Uni Soviet (kini Rusia) dan beberapa negara komunis di Asia dan Eropa Timur, pada abad 21 komunisme China telah menyerap unsur-unsur tertentu dari ideologi kapitalisme, terutama dalam aspek ekonomi.

Amerika Serikat yang boleh dibilang merupakan pencetus dan tempat subur berkembangnya ideologi liberalisme-kapitalisme, dalam perkembangan terakhir tampak kuat menerapkan otoriterisme sebagai ciri komunisme yaitu dalam hal mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Beberapa kepala negara Amerika menunjukkan gaya otoriter bahkan totaliter dalam mengambil kebijakan luar negeri seperti yang ditunjukkan Donald Trump dalam menghadapi imigran muslim.

D. Penutup

Ideologi merupakan sistem gagasan yang sangat luas diikuti keyakinan yang terpola, norma dan nilai pemandu serta gagasan regulatif yang diterima sebagai kenyataan atau kebenaran oleh sejumlah kelompok. Ketika diberi tambahan kata politik, ideologi menjadi ideologi politik yang

berarti sistem keyakinan yang menjelaskan dan menjustifikasi tertib politik terpilih dalam masyarakat baik yang sudah ada maupun yang diusulkan, dan menawarkan strategi (proses, keteraturan institusional, dan program) untuk mencapainya.

Ideologi politik merupakan gagasan etis bagaimana suatu negara diselenggarakan untuk mewujudkan tertib politik dan kesejahteraan masyarakat. Makna gagasan etis tersebut adalah sesuai dengan karakteristik ideologi. Dalam individualisme-liberalisme, tertib politik akan terwujud manakala setiap individu diberi kebebasan dalam menentukan siapa yang dikehendaki menjadi pemimpin. Dalam ideologi Pancasila, tertib politik akan terwujud apabila individu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sistem politik Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum

Ideologi memiliki karakteristik, yaitu (1) ideologi muncul dari kondisi krisis, (2) ideologi memiliki ruang lingkup yang luas dan bervariasi, (3) ideologi merupakan pola sistematik dari pemikiran politik, (4) ideologi memiliki elemen empiris dan normatif, (5) ideologi cenderung ekslusif, absolut, dan universal, (6) ideologi adalah argumen persuasif yang didesain untuk memotivasi keterlibatan aktif, (7) ideologi bersifat personal, memiliki pahlawan, seperti bapak pendiri bangsa, pemimpin karismatis, dan para

martir, memiliki dokumen suci yang memuat manifesto, deklarasi, dan konstitusi, serta sejumlah ritual seperti janji-janji, lagu kebangsaan, salam hormat, dan hari libur nasional, (8) ideologi memerlukan pembangunan, tetapi juga resisten terhadap perubahan fundamental, dan (9) ideologi terjalin dalam gerakan politik.

Ideologi dapat bertahan dan diimplementasikan secara efektif tergantung pada bagaimana dimensi ideologi diimplementasikan. Dimensi ideologi tersebut adalah (1) *cognition* berupa pengetahuan dan keyakinan, (2) *affect* mencakup perasaan dan emosi, (3) *valuation* berupa norma dan penilaian, (4) *program* berwujud rencana dan tindakan, serta (5) *social base*, yakni adanya kelompok pendukung dan kolektivitas.

Ideologi memiliki 5 (lima) fungsi ideologi. Pertama, sebagai sistem keyakinan, ideologi menyediakan struktur kognitif yakni sebuah formula ide-ide melalui mana kehidupan dipersepsi, dipahami, dan diiterpretasikan. Kedua, ideologi menyediakan formula preskriptif atau sebagai panduan bagi tindakan individu dan sosial serta penilaiannya. Ketiga, ideologi sebagai sarana pengelolaan konflik dan integrasi. Keempat, ideologi melakukan identifikasi diri, dalam hal mana ideologi tidak hanya merupakan lensa melalui mana orang melihat dunia, tetapi juga merupakan cermin di mana mereka melihat dirinya dan

jendela melalui mana yang lain melihatnya. Kelima, ideologi sebagai kekuatan dinamis bagi kehidupan individu dan kolektif dan menyediakan misi dan tujuan yang sama serta menghasilkan komitmen untuk bertindak bersama.

Dari berbagai ideologi yang tumbuh dan berkembang di dunia, terdapat dua ideologi besar yang memengaruhi eksistensi ideologi Pancasila, yaitu ideologi individualisme-liberalisme-kapitalisme dan ideologi marxisme-komunisme. Islam yang semula hanya dipahami sebagai agama yang terpisah dari kehidupan politik, belakangan muncul sebagai ideologi yang menggeser pengaruh ideologi marxisme-komunisme melalui pemikiran dan gerakan radikal untuk memurnikan nilai-nilai Islam.

Ideologi di dunia yang tumbuh belakangan seperti neoliberalisme, developmentalisme, neomarxisme, feminisme, dan lainnya merupakan turunan dari dua ideologi besar tersebut.

BAB II
KAPITALISME

Kapitalisme layak disebut sebagai ideologi paling kuat dan berjaya dalam beberapa abad terakhir. Kejayaan ideologi ini tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan jangkauannya pada wilayah dan berbagai bidang kehidupan, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan ketahanannya dalam kontestasi ideologi dunia. Kehadiran ideologi ini dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya dalam bidang makro seperti pengelolaan ekonomi negara, kapitalisme juga memengaruhi bidang mikro seperti kehidupan pribadi orang per orang. Untuk memahami dialektika yang mengiringi lahir dan tumbuhnya kapitalisme, diperlukan perspektif historis dan sosiologis yang mendalam terhadapnya. Namun demikian, ideologi kapitalisme juga memiliki kelemahan yang dalam praktiknya menimbulkan persoalan besar khususnya dalam aspek ekonomi.

A. Sejarah Kapitalisme

Kelahiran kapitalisme tidak bisa dipisahkan dengan berkembangnya moral individualisme (Ebenstein dan Fogelman, 1990:148). Sebagai gerakan moral, individualisme berpijak pada kepercayaan dasar bahwa manusia merupakan makhluk yang independen.

Kepercayaan terhadap independensi manusia diikuti keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas menentukan berbagai pilihan. Pilihan politik, ekonomi, agama, dan bidang lain seyogyanya diserahkan kepada masing-masing individu.

Individualisme sebagai gerakan moral berkembang menjadi gerakan sosial menimbulkan sejumlah dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang keagamaan, gerakan individualisme menimbulkan reformasi yang berorientasi terwujudnya kebebasan beragama. Dalam bidang penalaran, individualisme turut mendorong aneka eksperimen yang melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, individualisme menimbulkan ilmu-ilmu sosial. Adapun dalam bidang ekonomi, individualisme melahirkan sistem ekonomi baru yang disebut sebagai kapitalisme.

Kapitalisme merujuk pada sistem ekonomi dan ideologi, yang didefinisikan berdasarkan ketergantungannya kepada pertukaran ekonomi dan kepemilikan swasta dalam mengalokasikan sumberdaya masyarakat (Ethridge dan Handelman, 2016). Dalam ideologi kapitalisme ini terdapat dua unsur yang bersifat komplementer, yaitu (1) kapitalisme memberi penekanan yang besar pada individualisme dan (2) pemikiran kapitalis seringkali

diasosiasikan dengan ketidakpercayaan kepada kontrol pemerintah terhadap sumberdaya sosial.

Kapitalisme dipahami sebagai sebuah sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu yang mencakup hak kepemilikan atas kekayaan secara privat (Al-Jihad, 2018). Kapitalisme juga dimaknai sebagai sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran dalam hal mana kekayaan terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan terus-menerus. Dalam kamus The Macmillan Dictionary of Modern Economics, kapitalisme diartikan sebagai sistem politik, sosial, dan ekonomi di mana hak milik, termasuk aset kapital dimiliki dan dikontrol oleh individu (Al-Jihad, 2018)

Sistem kapitalisme bukan hanya dipahami sebagai sistem ekonomi semata, melainkan merupakan sistem sosial yang menyeluruh yang memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 dan menyebar luas ke seluruh kawasan Eropa Barat-laut dan Amerika Utara (Ebenstein dan Fogelman, 1990:148).

Masyarakat kapitalis tumbuh dan berkembang berkat adanya perkembangan kapitalisme. Masyarakat kapitalis memiliki ciri sebagai berikut: (1) tatanan ekonominya memiliki ciri pasar kompetitif dan perusahaan ekspansionis, (2) ekonominya berbeda dan terlindungi dari arena sosial

lainnya (institusi politik), (3) pemisahan politik dari ekonomi didasarkan atas dominasi hak milik pribadi dalam sarana produksi, (4) otonomi negara dikondisikan meskipun tidak ditentukan secara kuat oleh ketergantungannya kepada akumulasi modal (Giddens, 2005).

Kapitalisme berkembang bersamaan dengan perkembangan tatanan masyarakat Eropa terutama di Inggris. Peradaban masyarakat Eropa diyakini memengaruhi perkembangan peradaban dunia hingga kini. Pertumbuhan masyarakat internasional, baik dalam konteks negara bangsa maupun organisasi nonpemerintah, juga berawal dari Eropa. Bahkan titik awal dari masyarakat internasional dapat juga dikatakan sebagai titik awal bagi berdaulatnya negara nasional sebagaimana diakui dalam perjanjian West Phalia pada tahun 1648 (Samekto, 2008:2).

Negara-negara baru di Eropa terbentuk sebagai dialektika antara hukum gereja dan sistem kapitalisme. Tatanan sosial lahir dan terbentuk tidak seperti yang terlihat sekarang ini. Pada saat negara-negara baru tersebut lahir, relasi antaranggota masyarakat dalam suatu negara maupun dalam hubungan antarnegara masih didominasi oleh hukum gereja. Sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat pun masih berskala kecil, bersifat tradisional, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung bersifat lokal. Kehidupan masyarakat bertumpu pada

wilayah geografi yang tetap. Tanah digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Kegiatan perdagangan hanya berlangsung di sekitar wilayah tersebut. Barang dan makanan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten), tidak ada yang diperjualbelikan. Dalam konteks ini, konsep pasar belum ada.

Struktur sosial masyarakat tradisional menjadi berubah manakala terjadi proses industrialisasi di negara-negara Eropa barat. Sistem ekonomi berskala kecil yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat tradisional Eropa mulai tergerus dengan masuknya industrialisasi sebagai sistem ekonomi berskala besar (Samekto 2008:4). Industrialisasi di Eropa barat berkembang dikarenakan adanya pengaruh dari *renaissance* yang melanda Eropa pada abad 15.

Samekto (2008) memetakan tatanan sosial masyarakat Eropa dalam beberapa periode besar yang khas yaitu:

1. Zaman Kekaisaran Romawi, dari tahun 27 SM hingga tahun 476 M
2. Zaman Abad Pertengahan, dari tahun 476 hingga tahun 1492
3. Zaman Renaissance dari tahun 1493 hingga 1650
4. Zaman Aufklarung (Abad Pencerahan) dari tahun 1650 hingga awal 1800-an
5. Abad XIX atau modern.

Masing-masing tahap tersebut ditandai oleh tatanan sosial yang merefleksikan perkembangan pemikiran manusia pada zaman yang bersangkutan. Menurut pandangan Samekto (2008:5), munculnya kapitalisme berhubungan erat dengan perkembangan pemikiran dan tatanan sosial pada zaman *renaissance.* Kusumohamidjojo (2015) menyebut *renaissance* sebagai kebangkitan atau kelahiran kembali. Makna kelahiran kembali adalah kebangkitan kembali dari gagasan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuan pikirnya. Pusat perhatian *renaissance* adalah manusia, terutama pemikirannya. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada zaman tersebut hilang. Religiusitas tetap ada, namun sudah dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan yang lain. Hal tersebut terlihat dalam pandangan tentang alam, dimana alam masih diterima sebagai sumber-sumber norma hidup, akan tetapi alam tidak lagi dikaitkan dengan persoalan ketuhanan. Pada masa tersebut, telah terjadi apa yang disebut dengan sekularisasi.

Zaman *renaissance* memberi pengaruh cukup besar bagi perkembangan kapitalisme, yakni dengan berkembangnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah gerakan menggugat absolutisme kekuasaan gereja Katolik di Eropa dalam urusan duniawi (Samekto, 2008:6).

Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther. Konsep Martin Luther pada hakikatnya adalah penyangkalan terhadap otoritas mutlak Gereja Katolik Roma. Ajaran Martin Luther dengan cepat berkembang di Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Belanda. Pemikiran Luther selanjutnya dikembangkan oleh Johan Calvin. Dalam pandangan Calvin, yang dinamakan hukum alam bukan hukum yang direncanakan Tuhan atas dunia, tetapi rasa keadilan yang diciptakan Tuhan pada setiap diri manusia (Samekto, 2008:7).

Gerakan reformasi sebagaimana dipelopori oleh Martin Luther dan selanjutnya dikembangkan oleh Calvin, dalam pandangan Weber melahirkan apa yang disebut dengan Etika Protestan (*Protestant Ethic*). Etika Protestan dilandasi oleh ajaran Calvin yang melahirkan doktrin "kerja bukanlah untuk semata-mata sarana atau alat ekonomi, kerja adalah suatu tujuan akhir spiritual" (Samekto, 2008). Agar dapat menjauhkan diri dari kemiskinan, wajib bagi manusia untuk memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Thomas Aquinas memiliki pandangan yang berbeda dari Calvin. Jika kerja Calvin merupakan tujuan akhir spiritual atau kerja sebagai ibadah, sedangkan kerja Aquinas sekadar untuk memenuhi kepentingan individu dan masyarakat.

Protestanisme merupakan ideologi kaum Burg, yakni kaum pedagang di kota-kota Eropa barat yang mulai membentuk pusat-pusat kegiatan baru di kota-kota yang otonom terhadap kekuasaan absolut sang raja. Bersamaan dengan munculnya kaum Burg ini, terjadilah pergeseran pusat-pusat kegiatan yang semula adalah biara-biara dan kerajaan beralih ke kota-kota sebagai pusat kegiatan perdagangan. Di sinilah dimulai industrialisasi dan kapitalisme.

Sejarah perkembangan sosial ekonomi masyarakat Eropa membenarkan pandangan bahwa Protestanisme yang dibangun oleh Luther dan Calvin memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan kapitalisme awal (muda). Calvinisme menawarkan energi moral dan dorongan menjadi wirausahawan kapitalis (Weber, 2001). Formasi pandangan moral Calvinisme mengembangkan disiplin pekerja baik level rendah maupun menengah dari organisasi ekonomi kapitalis.

Ideologi kapitalisme memiliki dinamika perkembangan sendiri terlepas dari pengaruh Etika Protestan. Tidak seluruh ajaran etika Protestan menjadi landasan kapitalisme di Eropa Barat. Perkembangan kapitalisme juga dipengaruhi oleh ajaran rasionalisme dan perkembangan paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan.

Asal-usul perkembangan kapitalisme sebagaimana dikatakan Marx adalah bersamaan dengan munculnya kaum borjuasi yang berhasil membentuk kegiatan di kota yang disebutnya revolusioner. Hal ini membawa implikasi pada perubahan bentuk pengorganisasian sosial ekonomi masyarakat. Jika pada zaman tradisional, kegiatan ekonomi berskala kecil, maka pada masa industrialisasi, kegiatan ekonomi diorganisasikan dalam skala besar. Rasionalitas, prosedur formal, kecepatan dan impersonal menjadi tolok ukur kegiatan ekonomi era industrialisasi (Samekto, 2008:10).

B. Peran Kapital

Kapital merupakan kunci penting dari konsep kapitalisme. Kapital merupakan salah satu dari hal-hal yang dipakai untuk menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital sebagai uang menjadi kapital sebagai komoditi, diikuti oleh retransformasi dari kapital sebagai komoditi menjadi kapital sebagai uang yang bertambah (Heilbroner, 1991:21). Inilah rumus *money capital money* atau M-C-M yang terkenal dari Marx atas metamorfosis yang berulang dan meluas yang dijalani oleh kapital. Proses yang berulang dan ekspansif tersebut diarahkan untuk membuat barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu pengorganisasian niaga dan produksi. Adanya kenyataan fisik, yaitu komoditi berupa benda-benda kemewahan, tidak dinilai sebagai

prestasi pencarian kekayaan dalam kapitalisme jika benda dan jasa tersebut masih berada di tangan kapitalis.

Uang dan benda-benda kemewahan yang hanya dilihat dipakai sebagai lambang prestise kekayaan saja, bukanlah kapital. Proses ekspansif dari uang dan benda dalam siklus **M-C-M**-lah yang membuat uang dan benda-benda menjadi kapital. Eksistensi fisik barang dan jasa merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Uang ditransformasi lagi menjadi barang komoditi dan bila telah terjual, uang yang dihasilkan tidak dianggap sebagai produk akhir dari pencarian, melainkan sebagai suatu tahap dalam lingkaran yang tak berakhir (Heilbroner, 1991:21). Atas dasar hal tersebut, kapital bukanlah benda material, melainkan suatu proses pemakaian benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensi dinamikanya yang berkelanjutan.

Kapital ibarat daging dan darah bagi manusia. Daging dan darah menjalankan fungsi untuk mengembangkan siklus hidup manusia. Seperti halnya daging dan darah bagi kehidupan manusia, benda-benda kapital bukan kapital itu sendiri, melainkan benda-benda yang memiliki tujuan pengorganisasian yang meluas. Uang dalam kapital, bukanlah kapital, melainkan uang yang dipakailah yang menjadi kapital. Uang bertindak sebagai kapital, yakni sebagai satu perantara dalam suatu proses yang sasarannya

adalah memberi kemampuan kepada kapitalis untuk terlibat dalam lingkaran *money-capital-money* (**M-C-M**) dalam aktivitas perdagangan.

Kapital tidak dipahami dalam pengertian proses fisik saja, tetapi juga dimengerti dalam proses sosial. Uang dan benda-benda kemewahan yang ditransformasi menjadi barang kapital merupakan suatu jaringan kegiatan sosial yang memungkinkan terjadinya metamorfosis **M-C-M** yang berlangsung terus. Dalam proses ini terdapat relasi sosial antara para pemilik uang dan barang, yang merupakan perwujudan sementara dari kapital dan para pemakainya memerlukannya untuk melaksanakan kegiatan produksi.

Ide kapital sebagai suatu hubungan sosial berkaitan dengan persoalan pokok hubungan yaitu dominasi. Dalam dominasi, kapitalis cukup memamerkan simbol kekuasaan yang dimilikinya, bisa memaksakan namun tidak dengan kekerasan atau membuat penderitaan bagi pihak lainnya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, para kapitalis dapat memainkan kekuasaannya melalui tangan negara, misalnya dalam menerapkan perjanjian kontraktual. Negara karena hukum, bisa meminjami kekuasaan penghukumnya untuk membubarkan pemogokan dan para demonstran buruh untuk melindungi jalur-jalur atau area produksi yang dimiliki kapitalis. Kapitalis tidak memiliki kekuatan

pemaksa meskipun mempunyai kekayaan. Negaralah yang memiliki kekuatan pemaksa tersebut.

Dominasi kapitalis terletak dalam haknya untuk misalnya tidak menjual kepada pihak lain yang tidak mau menerima harga yang ditawarkan. Demikian pula, kapitalis memiliki kekuasaan (dominasi) terhadap pekerja (buruh) dengan tidak memberi kerja kepada mereka dikarenakan tidak mau memenuhi syarat-syarat yang diajukan perusahaan. Dominasi yang diperagakan masyarakat kapitalis berbeda dengan dominasi masyarakat era prakapitalisme. Dominasi yang diwujudkan melalui kapital dalam masyarakat kapitalis, membebaskan masyarakat dari cara dominasi masa sebelumnya yang lebih kejam.

Kapital menerapkan pengaruh pengatur dan pendisiplinnya dalam kondisi sosial yang menjadikan tindakan menahan kapital menjadi tindakan yang memiliki konsekuensi sosial (Heilbroner, 1991:24). Ini melibatkan dua hal. Pertama, munculnya kelas yang berorientasi kepada kapital. Para saudagar yang semula dalam posisi tidak menentukan dalam masyarakat, dengan mengambil alih fungsi-fungsi sosial strategis, mulai dari pemberian pinjaman uang kepada penguasa hingga mencukupi kebutuhan kota, menjadikan posisinya sangat menentukan. Kedua, dominasi kapital bertumpu pada munculnya kelas pekerja yang kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada

akses peralatan dan tanah yang secara sah bisa ditolak oleh pemilik tanah. Dalam kaitan ini, Adam Smith menulis: "banyak pekerja tidak bisa hidup selama seminggu, hanya sedikit yang dapat hidup selama sebulan, dan tidak bisa hidup selama setahun tanpa pekerjaan. Pada akhirnya pekerja mungkin sama pentingnya bagi majikan, seperti majikan itu penting baginya, tetapi keperluan pekerja itu tidak begitu mendesak (Heilbroner, 1991:25).

Ketergantungan dalam relasi sosial, sebagaimana dilihat Marx, menunjukkan adanya penghapusan hubungan sosial sebelumnya dalam hal mana para petani berhak atas dasar hukum dan adat, untuk mempertahankan sebagian dari hasil panennya, dan juga para pekerja kota untuk memiliki sendiri sarana produksi, misalnya alat pintal, satu piring pemutar pembuat gerabah dan lain-lain. Relasi yang berubah ini, dalam pandangan Heilbroner (1991:25), merupakan produk akhir dari revolusi panjang yang dimulai pada abad 15. Penghancuran serikat-serikat dagang yang dilindungi dan penciptaan suatu proletariat dari masyarakat kumuh dan kekuatan penghancur dari teknologi baru telah mengganggu hubungan sosial dari sistem sosial ekonomi kuno dan menyediakan jalan lapang bagi rezim kapital. Akibatnya, hak-hak yang sudah mapan dalam hal akses langsung kepada hasil produksi sendiri digantikan oleh hak-

hak baru dalam hal mana para petani dan pekerja secara legal tidak diberikan akses bagi sarana kehidupannya.

Surplus dan laba merupakan nilai penting dari kapitalisme. Dari mana laba dapat diperoleh kapitalis? Laba timbul dari kerja upahan dan hal itu terjadi jika majikan membayar pekerja kurang dari nilai produk pekerja. Laba kapitalis diperoleh dari nilai lebih, dalam hal mana nilai tenaga kerja telah dibayar, tetapi nilai ini jauh lebih sedikit daripada yang dapat diperas kapitalis dari tenaga kerja, dan justru perbedaan itu-kerja yang tidak dibayar-yang menjadi bagian si kapitalis (Engels, 2012).

Smith dan Ricardo percaya bahwa melalui mekanisme pasar, upah bagi pekerja di bawah nilai output pekerja dapat diperoleh sehingga margin keuntungan dapat dinikmati oleh kapitalis. Sebagaimana diakui Smith, nilai yang ditambahkan pekerja kepada material, mengubah diri menjadi dua bagian, yang satu membayar upah para pekerja dan satunya lagi membayar laba untuk majikan (Heilbroner, 1991:44). Asal usul laba dapat ditelusuri dan terletak dalam pembagian nilai yang diciptakan oleh kerja serta pengklaiman kapitalis atas laba sebagai imbalan karena merisikokan *stock* (kapital) dalam perusahaan. Laba ini menjadi hak kapitalis dengan suatu sisa, setelah ia membayar semua upah dan biaya-biaya produksi lainnya atau dengan kata lain laba yang diperoleh kapitalis tampak sebagai sisa, yang dianggap

menjadi hak para pemilik kapital, bukan hak para tenaga kerja (Heilbroner, 1991:48).

Kapitalis memiliki cara sendiri dalam menjaga agar upah pekerja tetap dan laba dapat ia peroleh. Sebagaimana diyakini Smith dan Ricardo, margin laba dapat dipertahankan karena upah-upah yang meningkat akan mendorong pertumbuhan populasi dan pertumbuhan populasi ini pada gilirannya akan mengurangi atau menurunkan peningkatan dalam upah, sehingga dapat memelihara bagian yang diperoleh kapitalis (Heilbroner, 1991:46).

Laba atau keuntungan dalam pandangan Marx, merupakan pembagian yang tidak adil atas produk, yakni melalui pembedaannya antara kerja sebagai proses dan kerja sebagai komoditi (Heilbroner, 1991:47). Kerja sebagai proses terdiri dari energi dan inteligensia seseorang yang terlibat dalam produksi; sedangkan kerja sebagai komoditi terdiri dari suatu benda yang dihasilkan untuk dijual, yaitu berupa kekuatan kerja atau kapasitas kerja seorang pekerja. Dalam sistem kerja berupah, majikan membayar upah kepada pekerja, sebaliknya pekerja memberikan tenaga atau energinya untuk menghasilkan produk yang diinginkan majikan. Surplus bergerak dalam suatu margin yang terjadi berulang antara nilai pasar dari komoditi yang dihasilkan oleh pekerja selama hari kerja dan upah-upah yang

dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatan kerja pekerja, ditambah ongkos-ongkos dari barang-barang kapital lainnya.

Margin laba adalah nilai surplus yang diperoleh dari kerja yang tidak dibayar (tidak berupah), yang menjadi hak kapitalis berkat posisi dominannya dalam ikatan kerja upahan. Dari nilai tersembunyi ini, Marx dapat memperluas rumus **M-C-M** dari suatu jumlah uang tertentu menjadi jumlah uang yang lebih besar, dalam bentuk rumus baru yaitu **M-C-C-M**, yang dihasilkan dari nilai **C** menjadi $\mathbf{C^1}$.

Surplus dan laba dalam rezim kapital diperoleh melalui proses eksploitasi, di mana surplus diambil dari populasi yang bekerja demi keuntungan suatu kelas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kaum kapitalis hidup dari pemerasan dan kaum buruh dari upah kerjanya (Malaka, 2018). Meskipun terkadang surplus memberikan manfaat sosial, namun pengambilan surplus tetap bersifat eksploitatif. Sebagaimana dikemukakan Heilbroner (1991:49), surplus apakah kecil atau besar, biasanya direnggutkan dari para produsen, misalnya pemerintah terhadap produsen atau orang per orang yang dengan kekuatan yang lebih unggul atau dengan memanfaatkan perasaan ketundukan religius atau tradisional, telah mendudukkan mereka menjadi tuan-tuan negeri. Laba yang diperoleh melalui pengambilan dan akumulasi surplus

dalam rezim kapital merupakan darah kehidupan kapitalisme, bukan saja karena merupakan sarana yang dipakai masing-masing kapitalis untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan untuk ekspansinya, tetapi juga karena laba menjadi sarana bagaimana hubungan dominasi dapat dipertahankan. Benar apa yang dikatakan Baumol, et al (2010) bahwa di sepanjang sejarah dan hampir semua masyarakat, akumulasi kekayaan merupakan tujuan utama orang-orang melakukan usaha serta cara memperoleh kekayaan dengan cara mengambilnya dari pihak yang lebih lemah.

Uraian panjang lebar tentang sejarah hingga substansi kapitalisme menunjukkan adanya benang merah bahwa kapitalisme memiliki sifat dasar yang mencirikan kapitalisme sejak awal perkembangannya, yaitu (1) pemilikan perorangan, (2) perekonomian pasar, (3) persaingan, dan (4) keuntungan (Ebenstein dan Fogelman, 1990:148).

Pemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, dan sumber alam) dalam sistem kapitalisme dikuasai secara perorangan, bukan oleh negara. Meskipun demikian, prinsip ini tetap mengakui adanya kepemilikan negara, yang berwujud monopoli yang bersifat alamiah atau menyangkut pelayanan jasa kepada masyarakat umum. Sifat dasar kedua dari kapitalisme adalah perekonomian pasar atau sistem

pasar bebas. Perekonomian pasar dalam sistem kapitalis didasarkan pada spesialisasi kerja. Setiap orang hanya memasok sebagian kecil dalam memenuhi kebutuhannya melalui keterampilan dan pekerjaan pribadi. Barang dan jasa tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produsen sendiri, seperti yang terjadi pada masyarakat prakapitalis, tetapi ditujukan untuk diperjualbelikan dalam pasar. Ciri pokok lainnya dari kapitalisme adalah persaingan atau kompetisi. Dalam perekonomian prakapitalis, faktor adat dan kebiasaan menentukan apakah suatu barang dan jasa berharga atau tidak. Dalam masyarakat modern kapitalis, alternatif untuk bersaing bisa saja dimonopoli oleh swata maupun negara. Dalam kapitalisme, terjadi interaksi bebas antara penjual dan pembeli, yang diwujudkan dalam penentuan harga barang dan jasa. Prinsip keuntungan atau laba merupakan ciri lainnya dari sistem kapitalisme. Perekonomian kapitalis memberikan lebih banyak peluang untuk meraih keuntungan daripada sistem perekonomian lainnya, karena perekonomian kapitalis menjamin adanya tiga kebebasan yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi lainnya, yaitu (1) kebebasan berdagang dan menentukan pekerjaan, (2) kebebasan hak milik, dan (3) kebebasan mengadakan kontrak (Ebenstein dan Fogelman, 1990:152).

C. Sistem Pasar Bebas Penumbuh Kapitalisme

Sistem kapitalisme memiliki kebaikan-kebaikan bagi pendukungnya dan keburukan-keburukan bagi para penentangnya. Kebaikan dan keburukan kapitalisme terutama dapat dilihat pada sistem pasar bebas. Jika umumnya para pengkritik cenderung melihat pasar bebas sebagai pasar yang memupuk sifat-sifat buruk manusia, seperti kepentingan pribadi, ketamakan, nafsu, dan sebagainya; sementara para pendukungnya melihat bahwa sistem pasar bebas melalui tangan tidak kelihatan (*invisible hand*), dapat menghasilkan manfaat sosial total. Kemakmuran masyarakat akan tercapai jika individu diberi kebebasan untuk beraktivitas ekonomi tanpa adanya tekanan dari siapapun. Bahkan negara Inggris dan Amerika Serikat mampu menjadi pemimpin ekonomi dunia karena komitmennya terhadap kebijakan pasar bebas (Chang & Irene Grabel, 2008:1). Bukti historis lainnya menunjukkan bahwa Perancis pada abad 18 mengalami kekalahan dari Inggris sebagai pemain utama di pentas dunia karena pemerintahnya gemar mencampuri urusan warganya (Chang & Irene Grabel, 2008:4).

Marx meramalkan bahwa dalam sistem kapitalisme, kaum pekerja dieksploitasi tenaga dan energinya untuk kepentingan pemerolehan laba maksimal bagi kapitalis, sehingga selamanya mereka akan berada posisi subordinat

tertelan oleh mesin besar industri kapitalis, sehingga menimbulkan konflik akut antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan sistem kapitalisme bangkrut, ternyata di Amerika Serikat tidak terbukti.

Di Amerika Serikat, dengan berkembangnya serikat-serikat buruh yang dilindungi oleh pemerintah, pekerja tidak lagi menjadi bulan-bulanan majikan, karena mereka dapat mengelola serikat buruh sendiri, memilih untuk menjadi penganggur, membuat perjanjian kerja, mengelola program pensiun bagi perusahaannya sendiri, menanam modal kembali, mendirikan pusat pelatihan yang dapat mengikuti perkembangan pasar, dan sebagainya.

Sistem politik Amerika Serikat yang menghargai hak asasi manusia, pekerja dapat menjadi majikan bagi dirinya sendiri, namun praktik yang terjadi di negara-negara dunia ketiga tidak selamanya sejalan dengan sistem yang berkembang di Amerika Serikat. Meskipun demikian, sistem pasar mengandung unsur kebebasan bagi para pelakunya. Sistem yang tidak bebas adalah sistem yang tidak manusiawi. Sistem pasar bebas harus dilihat sebagai hal terbaik yang dapat diciptakan oleh peradaban barat.

Para pengkritik sistem pasar bebas khawatir jika pasar tidak terkendali akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Mereka pun yakin bahwa tidak semua pelaku ekonomi dalam sistem pasar bebas memiliki informasi yang

sama untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Arsyad (2010:77) menyatakan bahwa kondisi persaingan sempurna hanya ada dalam abstraksi dan tidak ada dalam kenyataan, karena asumsi adanya informasi sempurna dan dan tidak adanya biaya transaksi dari model persaingan sempurna kurang realistis. Pasar sering gagal dalam hal distribusi karena adanya kapitalis besar yang menguasai faktor produksi.

Masyarakat sering tidak berhasil mendapat manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi kelompok masyarakatnya bila mereka menghasilkan dan menjual barang di pasar bebas. Orang yang bebas dalam interaksi pasar dapat saja memperoleh kemakmuran yang didambakan, namun tanpa disadari mereka juga dapat menjadi konsumen tidak terkendali, yang bisa menjadi kendala bagi perkembangan kapitalisme dengan sistem pasar bebasnya. Perilaku boros dengan membeli barang-barang *prestise* yang kadang tidak dibutuhkan, bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan dan disintegrasi sosial.

Orang yang bebas bisa saja membuat keputusan yang sangat buruk, bahkan jahat. Tidak ada jaminan bahwa ketika seorang individu bebas dari kekuasaan orang lain, pasar atau negara akan selalu memilih hal yang baik. Sebagai contoh, orang bebas menjual heroin yang membuatnya kaya, tetapi hal itu jelas tidak bermoral. Demikian pula, orang

bebas mempekerjakan anak di bawah umur, namun hal itu jelas merupakan perilaku tidak beretika. Tidak adanya intervensi negara dalam sistem kapitalisme berbasis pasar bebas, dalam beberapa kasus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memukau, namun pertumbuhan ekonomi demikian tidak mampu mengatasi persoalan akut ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan sebagaimana terjadi di negara-negara dunia ketiga. Hayek meyakini bahwa tidak ada ruang keadilan dalam ekonomi pasar (Machan, 1988). Tidak berlebihan jika di negara-negara dunia ketiga, perekonomian yang dibangun dan dikembangkan diimbangi oleh intervensi negara. Di beberapa negara, fungsi pengendalian dijalankan dengan membentuk badan-badan pengawas atau pengendali, untuk memastikan bahwa sistem pasar dapat berjalan dengan baik.

D. Kapitalisme Bertahan dan Berevolusi

Sejak kemunculannya pada awal atau prakapital hingga kini, kapitalisme dihantam oleh bertubi-tubi krisis ekonomi, baik pada tahun-tahun 1930-an, 1990-an, maupun era 2000-an. Namun demikian, sistem ini tetap bertahan, terlebih lagi gerakan demokratisasi turut menopang berlangsungnya sistem kapitalisme di dunia. Sebagaimana dilaporkan Harvey (2010:97), kapitalisme mampu bertahan

hidup sedemikian lama melewati berbagai krisis dan reorganisasi serta lolos dari prediksi-prediksi suram dari kalangan kiri maupun kanan yang meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh tidak lama lagi. Daya tahan hidup kapitalisme sungguh merupakan misteri yang perlu diungkap lebih lanjut. Lefebvre telah berhasil menemukan kunci penjelasan melalui pernyataan terkenalnya bahwa kapitalisme bisa bertahan hidup lewat penciptaan perluasan ruang (*production of space*) (Harvey, 2010:97). Imperialisme merupakan bentuk penciptaan dan perluasan ruang global bagi tumbuh suburnya kapitalisme.

Marx memiiki pandangan kritis terhadap kelangsungan sistem kapitalisme. Marx menjelaskan adanya berbagai krisis yang menjadi penyebab bangkrutnya kapitalisme. Inti dari pendapat Marx`adalah bahwa dalam kapitalisme terdapat tendensi kronis, yaitu kejatuhan laba yang menciptakan krisis overakumulasi. Krisis ini ditandai oleh surplus kapital (dalam bentuk komoditi, uang atau kapasitas produksi) dan surplus kekuatan tenaga kerja yang mengiringinya, dibarengi oleh ketiadaan cara untuk menggunakan surplus tersebut secara menguntungkan. Krisis yang terjadi pada tahun 1930-an menunjukkan pendayagunaan kapasitas yang rendah, surplus komoditi yang tidak bisa dijual, dan akibatnya terjadi pengangguran dalam jumlah besar. Penyebab dari krisis overakumulasi

ialah ketiadaan kesempatan pemanfaatan surplus secara menguntungkan, karenanya kunci solusi dari persoalan ekonomi tersebut dikembalikan pada pemanfaatan kapital.

Solusi untuk menghindari terjadinya devaluasi dan krisis dalam sistem kapitalisme, adalah dengan menyerap surplus kapital. Caranya adalah ekspansi geografis dan reorganisasi spasial (Harvey, 2010:99). Ekspansi geografis seringkali menghasilkan investasi dalam infrastruktur fisik dan sosial yang bertahan lama, seperti jaringan transportasi, komunikasi, pendidikan, dan riset, maka penciptaan dan rekonfigurasi relasi keruangan menjadi salah satu cara untuk menunda terjadinya tendensi ke arah krisis kapitalisme. Sebagai misal, ketika Amerika Serikat terkena krisis ekonomi pada tahun 1930-an, pemerintah menyelenggarakan proyek pekerjaan umum yang berorientasi masa depan di lokasi-lokasi yang sejauh ini belum berkembang dengan maksud untuk mengatasi problem surplus kapital dan tenaga kerja.

Radius spasial menurut Harvey (2010) dapat ditembus oleh para kapitalis pedagang. Kapitalis-kapitalis pedagang inilah yang memiliki peran strategis dalam menembus batas-batas spasial dengan membawa barang-barang komoditi untuk dijual melampaui batas territorial. Pada abad pertengahan misalnya, ketika berhadapan dengan keterbatasan pasar-pasar lokal dan biaya transportasi yang

tinggi, para pedagang berubah menjadi penjaja keliling yang menjual barang dagangan mereka menelusuri wilayah-wilayah yang sangat luas. Pada era modern, lokasi spasial selalu menghadirkan suatu keuntungan monopolistik tertentu, seperti tidak ada seorang pun yang akan menempatkan pabrik mereka di tempat di mana sudah ada pabrik dengan komoditi sejenis. Dalam lokasi spasial ini akan berlangsung pertarungan bebas di dalam ekonomi ruang, karena adanya kecenderungan kapital untuk memiliki kontrol monopoli (Harvey, 2010:107).

Teori kapitalisme abstrak, termasuk neoliberal sebagai variannya, terus menerus berada dalam situasi kompetisi, dalam hal mana kapitalis mendambakan kekuasaan monopoli. Produk akhir dari kompetisi adalah monopoli atau oligopoli dan semakin keras kompetisi, maka akan semakin cepat sistem kompetisi tersebut berubah menjadi monopoli atau oligopoli. Pemanfaatan strategi spasial yang dijalankan kapitalis untuk menciptakan dan melindungi kekuasaan monopoli di mana pun dan kapan pun mereka bisa. Kapital berbasis spasial dapat melanggengkan monopoli selama jarak belum ditembus oleh kemajuan teknologi. Begitu kemajuan teknologi mampu mengatasi persoalan jarak, kekuasaan monopoli kapitalis menjadi lunak. Sebagai misal, setelah mobil-mobil impor dari Jepang masuk ke Amerika, maka dominasi mobil Amerika menjadi

berkurang, bahkan para pengusaha otomotif di sana khawatir mobil Jepang dapat mengalahkan pasar mobil Amerika.

Uraian di atas menjelaskan bahwa lanskap geografis dari aktivitas kapitalis diselimuti oleh kontradiksi-kontradiksi dan ketegangan-ketegangan. Lanskap tersebut terus menerus tidak stabil ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan teknis dan ekonomi. Ketegangan-ketegangan dan kontradiksi-kontradiksi antara kompetisi dan monopoli, antara konsentrasi dan penyebaran, antara sentralisasi dan desentralisasi, antara diam dan bergerak, antara inersia dan dinamisme, yang semuanya bersumber pada proses molekular akumulasi kapital dalam ruang dan waktu yang tiada henti. Ketegangan-ketegangan tersebut terperangkap dalam logika ekspansionis dari suatu sistem kapital yang tiada henti berlangsung di dalamnya yang didominasi oleh motif untuk memperoleh laba.

Ketegangan-ketegangan dan kontradiksi-kontradiksi dalam titik tertentu telah menghasilkan konfigurasi geografis yang mengarah pada stabilitas. Konfigurasi geografis tersebut merujuk pada suatu kawasan (region), yaitu terciptanya ekonomi regional yang telah mencapai suatu tingkatan koherensi tertentu dalam struktur produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi (Harvey, 2010:113). Ekonomi regional ini mampu mengorganisasi diri dan dapat

menjadi pertumbuhan akumulasi kapital. Bersatunya negara-negara Eropa dalam Uni Eropa dan negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN merupakan contoh dari ekonomi regional yang cukup berhasil mempertahankan akumulasi kapital. Pasar bersama juga bisa dibentuk untuk jaringan pasar antar negara, misalnya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan MERCOSUR yaitu pasar bersama bagi negara-negara bagian selatan dari Amerika Latin. Ekonomi berbasis spasial tidak hanya melintas batas ke luar entitas politik (negara), tetapi juga berupa kawasan-kawasan pertumbuhan di dalam negara, misalnya ekonomi regional di delta sungai Mutiara dan lembah Yangtze di China dan kawasan Jabodetabek dan Batam di Indonesia. Kompetisi dan spesialisasi antarkawasan di dalam dan di antara ekonomi regional tersebut menjadi fitur fundamental dari beroperasinya kapitalisme.

Simpulan dari uraian di atas adalah pembukaan kawasan-kawasan baru sebagai ruang akumulasi kapital yang dinamis, penetrasi formasi-formasi sosial yang telah ada oleh relasi-relasi sosial dan pengaturan-pengaturan institusional yang kapitalis menjadi strategi penting untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja. Dengan demikian, kapitalisme dapat tumbuh di sistem mana pun, baik itu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat,

maupun demokrasi yang tidak memiliki embel-embel sekalipun.

E. Kritik terhadap Kapitalisme

Karl Marx adalah seorang filsuf yang sangat menaruh perhatian kepada kelompok marginal, terutama kaum buruh. Dia adalah kritikus paling tajam terhadap kapitalisme. Namun demikian, ia sangat mengagumi prestasi kelompok borjuis yang dinilainya lebih jujur daripada kaum feodalis. Menurut Marx, nilai-nilai feodal tidak lebih dari selubung ideologi, sebab diyakininya, masyarakat feodal merupakan masyarakat yang dibangun berdasarkan penghisapan manusia atas manusia (Samekto, 2008:11). Tidak seperti kaum feodal yang mengandalkan keuntungan dari cara menghisap hak manusia lainnya, kaum borjuis mencari keuntungan dengan menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Semua hubungan ekonomi tidak didasarkan pada penghisapan terhadap manusia lainnya, melainkan diletakkan pada hukum pasar.

Sistem kapitalisme baik secara teoretis maupun empiris menimbulkan alienasi pada diri kaum buruh. Marx menggunakan istilah alienasi untuk menyatakan pengaruh produksi kapitalis terhadap manusia dan masyarakat. Menurut Marx (dalam Ritzer dan Goodman, 2011), alienasi terdiri atas 4 unsur dasar. Pertama, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari aktivitas produktif

mereka. Buruh bekerja untuk kapitalis yang memberi mereka upah untuk menyambung hidup dengan imbalan bahwa mereka menggunakan para pekerja menurut cara-cara yang mereka tentukan. Oleh karena aktivitas produktif miliki kapitalis dan karena mereka yang memutuskan apa yang harus dikerjakan pekerja, maka pekerja teralienasi dari aktivitas tersebut.

Kedua, pekerja tidak hanya teralienasi dari aktivitas-aktivitas produktif, akan tetapi juga tujuan dari aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu produk. Produk kerja mereka tidak menjadi milik mereka, tetapi menjadi miliki kapitalis. Kapitalis akan menggunakan hasil kerja buruh tersebut untuk dijual demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Produk yang dihasilkan buruh tidsak bisa secara langsung digunakan biuruh manakala mereka membutuhkan. Sebagai contoh, buruh pabrik roti ketika kelaparan dia tidak bisa makan roti yang dibuatnya kecuali dia mampu membayar seperti para pembeli lainnya.

Ketiga, para pekerja di dalam kapitalisme teralienasi dari sesama pekerja. Dalam kapitalisme, suasana kerja kooperatif tidak berlangsung, mereka tidak saling mengenal meskipun bekerja berdampingan. Seperti dikemukakan Marx berikut.

> Anda bisa bekerja berdampingan dengan seseorang selama beberapa bulan tanpa mengetahui namanya. Satu hal yang anda tahu, anda terlalu sibuk untuk sekadar berbicara. Dia

> tidak bisa mendengar anda…anda harus berteriak ketika berbicara padanya. Anda diawasi oleh orang-orang berkemeja putih yang berkeliling setiap saat dan jika mereka melihat anda menggerakkan bibir anda, maka mereka berkata "orang ini perlu bekerja lebih banyak lagi". Begitulah, bahkan untuk bicara pun dia tidak punya waktu (Ritzer dan Goodman, 2011).

Agar tidak terjadi kooperasi antara pekerja, kapitalis mengadu pekerja dengan pekerja lainnya untuk dilihat mana yang bekerja lebih cepat, mana yang bisa memproduksi lebih banyak, dan mana yang bisa menyenangkan atasan.

Keempat, para pekerja dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari potensi kemanusiaan mereka sendiri. Kerja tidak lagi menjadi transformasi diri dan pemenuhan sifat dasar manusia, akan tetapi membuat manusia menjadi mesin kapitalis. Semua hal yang dilakukan oleh pekerja sudah diprogram, sehingga mereka tidak mampu mengekspresikan kualitas kemanusiaannya yang paling dalam.

Sistem kapitalisme, dalam realitasnya, tidak dapat berkembang hanya berkutat pada entitas geografi terbatas. Sistem ini mengharuskan adanya ekspansi keluar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja murah (Samekto, 2008:13). Pelaku pasar banyak dan bersifat kompetitif, maka terjadilah rebutan akan penguasaan pasar, pasokan bahan mentah, dan tenaga

kerja murah. Semua ini untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal negara asalnya. Proses ini melahirkan sejarah penaklukan (*imperialisme*) dan penjajahan (*kolonisasi*). Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung selama abad 18 dan 19, dan pada pertengahan abad 20 mulai sirna setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana mulai gerakan nasionalisme negara-negara jajahan berhasil membebaskan diri. Pasca berakhirnya imperialisme lama, muncul bentuk imperialisme baru yang menamakan diri sebagai *neoliberalisme*. Kapitalisme di berbagai tempat telah melahirkan imperialisme dan kolonialisme di negara-negara dunia ketiga. Ideologi turunannya pun yaitu *neoliberalisme* juga melahirkan penjajahan baru di negara-negara yang tingkat ketergantungannya tinggi kepada negara-negara donor. Sistem kapitalisme dan turunannya ini melahirkan ketimpangan dan tidak mampu mewujudkan tatanan global yang adil.

Alienasi pada diri pekerja dan tumbuhnya imperialisme dan kolonialisme merupakan dampak buruk dari kapitalisme. Sistem kapitalisme dalam praktiknya juga melahirkan berbagai krisis. Ini merupakan dampak buruk yang lain. Krisis demi krisis dialami oleh negara-negara kapitalis dan negara-negara yang menggunakan kapitalisme sebagai sistem dan ideologi ekonomi. Krisis periodik yang melanda sistem kapitalisme merupakan tanda-tanda

kematian kapitalisme global (Al-Jihad, 2018). Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam (Nawatmi, 2009) menguraikan sejarah kronologi krisis ekonomi dunia secara komprehensif. Menurut Roy Davies dan Glyn Davies, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Hal ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia. Pada masa Depresi besar 1930-an, sistem ini diperkirakan sudah di tepi jurang keruntuhan, tetapi ternyata bisa diatasi dengan munculnya Keynes. Perang dunia kedua, sebenarnya juga manifestasi krisis kapitalisme dalam bentuk antagonisme antara negara-negara industri pertama dan negara-negara industri angkatan kedua yang diwakili Jerman, Italia dan Jepang. Krisis ini dapat diatasi dengan kekerasan yang dilambangkan oleh bom atom yang dijatuhkan tentara Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya Rencana Marshall berhasil menyelamatkan kapitalisme dengan kebangkitan bersama diantara negara-negara industri pertama dan angkatan kedua menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang kini disebut Blok Barat. Munculnya negara-negara industri baru juga dianggap sebagai bentuk kesuksesan kapitalisme sebagai sistem. Akhirnya kapitalisme telah bangkit menjadi paham yang perlu dipertahankan. Padahal fakta menunjukkan bahwa

sejarah kapitalisme adalah sejarah krisis (Nawatmi, 2009; Novianto, dkk. , 2016).

Krisis ekonomi kedua yang menonjol adalah pada tahun 2008. Krisis tersebut terjadi di Amerika Serikat, dimulai dari krisis yang disebabkan oleh kredit perumahan (*subprime mortgage*) sebagai dampak dari gelembung ekonomi, yaitu antara tahun 1997 dan 2006 harga rumah di Amerika meningkat sebesar 124% (Faizal Noor, 2013). Selama dua dekade (1980-2001) harga rata-rata rumah di Amerika berkisar 2,9-3,1 kali pendapatan rata-rata rumah tangga. Rasio tersebut meningkat menjadi 4,0 pada tahun 2004 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 menjadi 4,6. Kemudahan mendapat kredit dan ekspektasi bahwa harga rumah akan terus meningkat telah mendorong masyarakat mengambil kredit rumah dengan tingkat bunga di bawah harga pasar. Namun pada tahun 2008 harga rata-rata rumah mengalami penurunan sebesar lebih dari 20%, sehingga membawa dampak pada ketidakmampuan para pengambil kredit perumahan membayar cicilan kredit rumah setelah masa tenggang berakhir (Faizal Noor, 2013). Hal ini menyebabkan banyak pengambil kredit rumah mengalami gagal bayar (Basri dan Munandar, 2009). Gagal bayar ini sudah terjadi pada pertengahan tahun 2005 dikarenakan naiknya tingkat suku bunga kredit perumahan rakyat (KPR) (Nawatmi, 2009). Mengingat KPR *subprime*

mortgage juga diperdagangkan melalui penerbitan instrumen derivatifnya (CDO, MBS dan lainnya sampai tujuh lapis) di pasar modal, kasus *default* juga merontokkan pasar keuangan di AS dan dunia yang memiliki instrumen derivatif CDO dan MBS dari KPR *subprime mortgage* (Nawatmi, 2009). Sejak itulah dimulai episode kejatuhan dan kebangkrutan bank investasi di AS dan Eropa yang kebetulan memegang instrumen derivatif tersebut (Basri dan Munandar, 2009). Harga-harga saham di seluruh dunia berguguran. Dow Jones terjun bebas hampir 600 poin sebagai rekor terendah sejak empat tahun terakhir. Indeks saham lain di AS juga turun mencemaskan. Inilah wujud *the market failures* yang harus dipahami oleh para pengagum ideolog *laisses-faire.* Asumsi para fundamentalis pasar bahwa pasar *otomatically self-correcting*, serta *self regulating* menunjukkan bukti kegagalannya, bahkan dana talangan (*bailout*) USD 700 miliar di AS, 691 milyar dolar di Inggris, 680 milyar dolar di Jerman, 544 milyar dolar di Irlandia, 492 milyar dolar di Perancis, 200 milyar dolar di Rusia dan negara-negara di Asia sebesar 80 milyar dolar (Nawatmi, 2009). Itulah sebabnya, sistem kapitalisme dengan liberalisme sebagai induknya diragukan mampu membahagiakan masyarakat.

Makhlani (2012) dan Piliyanti (2009) mengungkapkan data krisis ekonomi sebagai dampak kapitalisme secara

detil, yaitu dimulai dari kepanikan 1797 di Inggris, depresi 1807 di Amerika Serikat, kepanikan 1819 di Amerika Serikat, kepanikan 1837 di Amerika Serikat, kepanikan 1857 di Amerika Serikat, kepanikan 1873 di Eropa dan AS, depresi berkepanjangan tahun 1873-1896 di Amerika Serikat, krisis keuangan Jepang dan Jerman pada tahun 1920, resesi perang dunia pertama di Eropa dan AS tahun 1921, *Great Depression* (1929/1930), krisis moneter tahun 1940 di Prancis, Hungaria, dan Jerman, resesi ekonomi tahun 1953 pasca perang Korea, pada tahun 1970 krisis perbankan di Inggris dan krisis Euro akibat pelepasan sistem"Breton Wood, dimana saat itu kegiatan spekulasi merajalela, krisis minyak 1973, pada tahun 1980 juga terjadi krisis utang Polandia dan Mexico, tahun 1990 krisis keuangan Mexico, pada tahun 1998 krisis keuangan Asia Tenggara termasuk Indonesia, pada tahun 2008 krisis keuangan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun tahun 2018 sebagian negara Eropa dan Amerika Latin mengalami krisis utang.

Gambaran mengenai dampak kapitalisme terhadap krisis ekonomi yang dialami benyak negara dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Kapitalisme dan Krisis Ekonomi Dunia

No	Tahun	Jenis Krisis
1	1797	Kepanikan Ekonomi di Inggris
2	1807	Depresi Ekonomi di AS
3	1819	Kepanikan Ekonomi di AS
4	1837	Kepanikan Ekonomi di AS
5	1857	Kepanikan Ekonomi di AS
6	1873	Kepanikan Ekonomi di Eropa dan AS
7	1873-1896	Depresi berkepanjangan di AS
8	1920	Krisis keuangan di Jepang dan Jerman
9	1921	Resesi perang dunia pertama di Eropa dan AS
10	1929/1930	Great Depression
11	1940	Krisis moneter tahun di Prancis, Hungaria, dan Jerman
12	1953	Resesi ekonomi pasca perang Korea
13	1970	Krisis perbankan di Inggris dan krisis Euro akibat pelepasan sistem"Breton Wood, sebagai dampak dari kegiatan spekulasi
14	1973	Krisis Minyak Dunia

15	1980	Krisis utang Polandia dan Mexico
16	1990	Krisis Keuangan Mexico
17	1998	Krisis keuangan (moneter) Asia Tenggara
18	2008	Krisis Keuangan AS
19	2011-2018	Krisis utang di Eropa dan Amerika Latin

Berbagai krisis tersebut muncul dari rahim kapitalisme, yaitu siklus yang akan terjadi sebagai akibat dari sektor moneter yang penuh spekulasi yang mendominasi aktivitas perekonomian.

Dari berbagai krisis ekonomi yang dialami negara penganut ideologi kapitalisme, Piliyanti (2009) melihat empat hal yang menjadi kelemahan kapitalisme. Pertama, munculnya kesenjangan perimbangan dalam distribusi antarindividu dan sarana-sarana produksi hanya akan terkumpul pada satu kelompok yang memiliki modal kuat. Pengaruh semangat materialis akan membuat masyarakat terbelah ke dalam dua kelompok, yaitu golongan kaya dan kelompok miskin. Kedua, timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena meningkatnya pengangguran yang disebabkan banyaknya produsen yang berhenti berproduksi dan menutup pabrik. Hal ini disebabkan karena produsen komoditas sebagai kebutuhan

mewah tertentu meningkat demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik modal besar, dan langkah ini memaksa pasar untuk menyerapnya. Ketiga, meningkatnya praktik monopoli secara empiris aplikatif dan yuridis sebagai bagian dari usaha untuk melemahkan semangat persaingan. Regulasi-regulasi monopoli dan semi monopoli sering ditujukan untuk mengeruk keuntungan yang masih dapat diraih dengan jalan aturan hukum dalam produksi dan peningkatan biaya *(cost)* melalui strategi penguatan aturan-aturan produksi. Banyak pihak dengan sengaja menghancurkan bahan produksi dan melarang bidang pertanian atau industri beberapa komoditas tertentu dengan tujuan untuk menaikkan harga. Keempat, kebebasan tanpa batas dalam pekerjaan dan alokasi kekayaan.

Kapitalisme di dunia berada di bawah genggaman Amerika Serikat. Kapitalisme dengan ideologi turunannya seperti *developmentalisme* dan *neoliberalisme*, dipaksakan oleh Amerika Serikat sebagai model pembangunan ekonomi kepada negara-negara di dunia, yaitu negara-negara di kawasan Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia, dengan tujuan negara-negara tersebut mudah dieksploitasi oleh Amerika Serikat (Chomsky, 2017).

Amerika Serikat memperoleh keuntungan dari pemaksaan model ekonomi tersebut. Sebagai contoh, antara tahun 1982 dan 1987, sekitar US $150 miliar ditransfer dari

Amerika Latin ke Barat, bahkan New York Times memperkirakan bahwa transaksi tersembunyi (termasuk uang hasil perdagangan narkotika, keuntungan bisnis illegal, dan lain-lain) mencapai angka US $700 miliar (Chomsky, 2017).

Kapitalisme digunakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk memperkuat posisi mereka dalam relasi dengan negara-negara dunia ketiga atau sedang berkembang. Relasi tersebut diperkuat dengan segala cara oleh Amerika Serikat, seperti memberi bantuan keuangan kepada suatu negara, mendukung kepemimpinan Presiden di suatu negara, menggulingkan dan menghukum pemimpin pemerintahan yang tidak patuh kepada Amerika Serikat, dan bahkan membiayai kelompok oposisi atau radikal di suatu negara yang menguntungkan Amerika Serikat dan kroni-kroninya.

F. Penutup

Kapitalisme layak disebut sebagai ideologi paling kuat dan berjaya dalam beberapa abad terakhir. Ideologi kapitalisme masih berjaya hingga kini meskipun diterpa berbagai krisis. Kejayaan ideologi ini tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif berdasarkan jangkauannya pada wilayah dan berbagai bidang kehidupan, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan ketahanannya dalam kontestasi ideologi dunia. Contoh dari kelenturan kapitalisme adalah

adanya ekspansi geografis terhadap kapital atau komoditi yang di suatu tempat sudah mengelami kejenuhan dan agar dapat tumbuh berpindah ke tempat lain supaya efek *snowball* kapital berlangsung tanpa hambatan berarti.

Kelahiran kapitalisme tidak bisa dipisahkan dengan berkembangnya moral individualisme. Individualisme berpijak pada kepercayaan dasar bahwa manusia merupakan makhluk yang independen. Kepercayaan terhadap independensi manusia diikuti keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas menentukan berbagai pilihan. Pilihan politik, ekonomi, agama, dan bidang lain niscaya diserahkan kepada masing-masing individu. Individualisme sebagai gerakan moral berkembang menjadi gerakan sosial menimbulkan sejumlah dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang keagamaan, gerakan individualisme menimbulkan reformasi yang berorientasi terwujudnya kebebasan beragama. Dalam bidang penalaran, individualisme turut mendorong aneka eksperimen yang melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, individualisme menimbulkan ilmu-ilmu sosial. Adapun dalam bidang ekonomi, individualisme melahirkan sistem ekonomi baru yang disebut sebagai kapitalisme.

Kapitalisme memiliki sifat dasar yang mencirikan kapitalisme sejak awal perkembangannya, yaitu (1)

pemilikan perorangan, (2) perekonomian pasar, (3) persaingan, dan (4) keuntungan. Dalam implementasi dari sistem ekonomi suatu negara, dapat saja mekanisme pasar diserasikan dengan pasar sosial, seperti di Jerman dan persaingan dapat berkolaborasi dengan kerjasama, seperti terjadi dalam pasar bersama ASEAN atau UNI EROPA. Namun dalam perkembangannya, empat unsur kapitalisme tersebut tetap menjadi penciri dari praktik kapitalisme.

Kapitalisme telah menyebar ke berbagai belahan dunia sebagai sistem dalam mengatur tata perekonomian nasional negara-negara. Hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang didikte melalui sistem kapitalisme. Bagi negara-negara maju, kapitalisme memberikan hasil yang memuaskan dalam perekonomian mereka, meskipun beberapa kali mengalami krisis ekonomi; tetapi bagi negara-negara dunia ketiga, kapitalisme membawa malapetaka karena kemajuan tidak diperoleh justru krisis dan kemunduran ekonomi mereka alami, karena sumber kekayaan alam dan sumber daya lainnya disedot oleh negara-negara maju yang memperoleh surplus dari eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Di balik kejayaannya, kapitalisme memiliki kelemahan dan keburukan, yaitu timbulnya alienasi pada diri pekerja, tumbuhnya imperialisme dan kolonialisme, dan munculnya berbagai krisis. Namun demikian, kapitalisme mampu

memulihkan diri pasca mengalami krisis, karena memiliki *destructive-creative* yakni mekanisme pertahanan yang diinisiasi oleh negara untuk mengatasi krisis ekonomi (Schumpeter dalam Al-Jihad, 2018).

BAB III
NEOLIBERALISME

Sejak kemunculannya hingga perkembangan kini kapitalisme telah berkembang pesat bahkan menjadi ideologi dominan dalam kehidupan global. Kapitalisme berkembang pesat hingga bermutasi menghasilkan sistem nilai baru, seperti neoliberalisme dan developmentalisme.

Neoliberalisme menjadi varian penting dari kapitalisme yang memberikan resep ampuh dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Meskipun dalam realitasnya neoliberalisme tidak mesti berhasil diimplementasikan di negara-negara tersebut, tetapi arus global yang dikendalikan kekuatan besar di Amerika-Eropa telah mendikte negara-negara dunia ketiga meskipun masyarakat di negara-negara tersebut menolaknya.

A. Sejarah Neoliberalisme

Suatu varian dari kapitalisme yang banyak digunakan sebagai paradigma dalam pembangunan negara-negara dunia ketiga adalah *neoliberalisme*. Neoliberalisme muncul dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 1960-an yang

melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Neoliberalisme bukan merupakan teori besar, tetapi merupakan bagian dari serpihan teori kontemporer antiintervensi. Neoliberalisme merupakan revivalisme dari pemikiran ekonomi liberal (klasik) yang mengakomodasi pasar bebas, kebebasan individu, dan intervensi negara secara minimal dalam perekonomian yang mengkaitkan individu, negara, masyarakat, dan pasar dalam suatu perekenomian kapitalis.

Neoliberalisme merupakan penerapan nilai-nilai liberal dalam perekonomian dalam bentuknya yang baru. Kata neo dalam neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang mulanya dipelopori oleh ekonom Inggris Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations*.

Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial politik yang biasanya dialamatkan pada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik (Kuncoro, 2010). Neoliberalisme dianggap sebagai pendukung pasar bebas, ekspansi modal, dan globalisasi.

Neoliberalisme sebagai kebijakan publik memiliki formula DLP, yaitu deregulasi ekonomi, liberalisasi perdagangan dan industri, serta privatisasi perusahaan yang dimiliki negara (Steger and Roy, 2010). Termasuk dalam

kebijakan neoliberal adalah pemotongan pajak khususnya untuk bisnis berpendapatan tinggi, pengurangan pelayanan sosial dan program kesejahteraan, penempatan kembali kesejahteraan dengan biaya kerja, penggunaan kepentingan oleh bank sentral yang independen untuk menjaga inflasi, dan pengurangan ukuran pemerintah, serta penciptaan lembaga-lembaga politik baru, think tanks, dan praktik-praktik yang didesain untuk mereproduksi paradigma neoliberal.

Neoliberalisme atau neoklasik awalnya diinspirasi oleh John Maynard Keynes (1883-1946), lahir sebagai paradigma baru pembangunan ekonomi sebagai akibat depresi besar yang dialami Amerika Serikat dan negara-negara Eropa barat pada tahun 1930-an. Nilai-nilai pemikiran ekonomi klasik yang tidak menghendaki campur tangan negara atau pemerintah dipertanyakan, setelah negara-negara maju di Eropa dan AS mengalami krisis.

Dalam buku berjudul *The General Theory of Employment*, Keynes menulis bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah *full employment*. Tanpa harus mengadopsi sistem ekonomi sosialis-komunis, Keynes menawarkan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang akhirnya diterima oleh sejumlah negara Eropa saat itu (Bellamy, 2004:47). Pemerintah Inggris mulai menerapkan gagasan Keynes pada

akhir 1940-an, disusul pemerintah AS pada era Kennedy dan Johnson tahun 1960-an. Doktrin Keynes hanya mampu bertahan selama kurang lebih 30 tahun sebelum kemudian digantikan doktrin neoliberal. Selain Keynes, ada dua tokoh lain yang memengaruhi perkembangan paradigma neoliberal, yaitu Rostow dan Harrod-Domar.

Rostow mengajukan lima tahap pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi, yaitu (1) tahap masyarakat tradisional, (2) tahap prakondisi untuk tinggal landas, (3) tahap pertumbuhan yang berkesinambungan, (4) tahap tinggal landas, (5) tahap massa konsumsi tinggi (Suryono, 2010). Salah satu prinsip penting yang harus dijalankan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri guna menghasilkan investasi yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gagasan Rostow tentang investasi diperdalam oleh teori Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar menyatakan bahwa "agar tumbuh, suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi yang konstan serta tidak adanya campur tangan pemerintah (Jhingan, 2007).

Menurut Harrod-Domar, makin besar tabungan dan investasi, makin cepat perekonomian tumbuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka menekankan pentingnya transformasi struktural secara alamiah dalam pembangunan ekonomi, yang diawali dengan penciptaan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja ini harus berdampak positif bagi peningkatan pendapatan. Pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan tabungan. Tabungan bermanfaat untuk meningkatkan modal produksi, yang pada gilirannya akan menciptakan perubahan pola produksi dan meningkatkan taraf hidup pelaku ekonomi. Pada hakikatnya teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro ekonomi Keynes.

Analisis Keynes dianggap kurang lengkap, karena tidak mengungkapkan masalah-masalah ekonomi jangka panjang; sedangkan teori Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Pertumbuhan modal merupakan syarat yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1960-an banyak negara, terutama negara-negara berkembang menerapkan pendekatan *growth priority* yang berfokus pada akumulasi kapital nasional. Pembangunan industri secara massif ditempuh di mana pemerintah lebih berperan sebagai *entrepreneur* ketimbang sebagai *service provider*. Pada era 1980-an, dengan kemunculan noliberalisme, liberalisme klasik menemukan peranannya yang baru yang lebih radikal, di mana sistem tersebut tidak lagi memberikan kompensasi apapun kepada orang miskin dan paradigma *welfare state*

tertolak, karena hanya melahirkan kelambanan dan ketergantungan (Sumodiningrat, 2009).

Kelahiran aliran neoliberalisme menurut Sumodiningrat (2009) terkait dengan empat faktor. Pertama, munculnya perusahaan-perusahaan besar multinasional dengan aset lebih besar daripada kekayaan negara-negara kecil di dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut mampu menembus batas teritorial negara-negara sekaligus mampu memanfaatkan infrastruktur negara-negara tersebut. Kedua, munculnya rezim internasional sebagai *surveillance system* untuk menjamin negara-negara patuh dan tunduk pada hukum pasar bebas. Rezim-rezim tersebut adalah World bank, IMF, dan WTO. Ketiga, revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang dahsyat menyebabkan arus informasi, modal, dan manusia bergerak cepat melampaui batas-batas teritorial negara. Hal ini menyebabkan mekanisme *free fight liberalism* menemukan momentumnya. Mereka yang lemah makin mudah diinjak-injak oleh mereka yang kuat. Keempat, negara-negara maju menggunakan berbagai faktor terdahulu (MNC, rezim keuangan dan perdagangan, serta teknologi informasi dan komunikasi) sebagai alat untuk menaklukkan dan menguasai negara-negara miskin dan berkembang. Salah satu instrumen yang digunakan untuk

menaklukkan negara-negara miskin adalah utang luar negeri dan perdagangan bebas.

B. Peran Negara dalam Sistem Neoliberal

Neoliberalisme memiliki dua paham terkait kebijakan ekonomi, yaitu paham neoliberalisme murni dan paham neoliberalisme moderat (Kuncoro, 2010). Penganut paham neoliberalisme murni berpendapat bahwa semua pasar produk dan jasa atau pasar faktor produksi (modal, tenaga kerja) pada dasarnya bekerja sempurna. Itulah sebabnya, campur tangan pemerintah tidak diperlukan, karena akan menyebabkan kegagalan pemerintah yang berdampak buruk pada efisiensi ekonomi nasional. Penganut paham neoliberalisme moderat mengakui bahwa dalam praktik di negara sedang berkembang ada berbagai kegagalan pasar yang memerlukan campur tangan pemerintah. Campur tangan yang diizinkan adalah campur tangan fungsional atau netral dan campur tangan selektif, yang tujuannya adalah mendukung bekerjanya mekanisme pasar secara efisien. Paradigma neoliberal moderat membutuhkan campur tangan pemerintah dalam batas tertentu untuk menggerakkan perekonomian. Campur tangan pemerintah di sini bukan mengambil alih peran pasar, tetapi menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan pasar bekerja tanpa terjadi distorsi. Menurut teori, negara

neoliberal haruslah lebih mementingkan hak-hak milik pribadi individu, aturan hukum dan pranata-pranata pasar bebas serta perdagangan bebas (Harvey, 2009:107).

Lembong (2013) menyebutkan tiga prinsip dalam sistem perekonomian yang bersifat neoliberal. Pertama, tujuan utama ekonomi liberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna-pasar. Kedua, kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi diakui. Ketiga, pembentukan harga pasar tidak bersifat alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang.

Sebagai babak baru dari kapitalisme, sistem neoliberal menghendaki eksistensi negara, tetapi dalam hal (1) melindungi perdagangan kaum borjuis berdasarkan hukum sipil, (2) menjadi perisai bagi mekanisme pasar dari efek samping berupa penghancuran diri, seperti adanya undang-undang perlindungan tenaga kerja, (3) menyediakan prasyarat-prasyarat produksi dalam ekonomi secara menyeluruh, misalnya pendidikan di sekolah negeri, transportasi dan komunikasi publik, dan menyesuaikan sistem hukum sipil dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari proses akumulasi, seperti pajak, bank dan hukum bisnis (Habermas, 2004:132). Pemenuhan empat fungsi negara ini untuk menjamin agar proses produksi kapitalis dan neoliberal dapat berjalan dengan baik. Negara

dalam sistem neoliberal ini boleh melakukan intervensi ekonomi (dalam batas tertentu) melalui kebijakan yang diambil semata-mata untuk menjamin berlangsungnya mekanisme pasar.

Meskipun intervensi negara diperbolehkan dalam batas minimal, tetapi Friedman mengajukan gagasan bahwa campur tangan negara dalam bentuk memberikan subsidi, melakukan stabilitasi, dan menyuntikkan dana untuk investasi hanya akan membangkrutkan negara (Winarno, 2010). Hal ini diperkuat pandangan kelompok Kanan Baru bahwa program redistribusi pendapatan sebagai bentuk ketidakadilan. Penerima santunan kesejahteraan, mereka anggap sebagai pemalas, oportunis, dan parasit sosial, karena memperoleh uang dari anggaran pemerintah dan tidak menganggap kerja sebagai salah satu nilai tertinggi dalam masyarakat (Winarno, 2010).

Individualisme sebagai nilai penting dari liberalisme, merupakan ciri utama neoliberalisme. Neoliberalisme memahami individualisme sebagai tindakan mementingkan diri sendiri (*self-seeking*) dan tindakan memaksimalkan keuntungan dalam pasar. Dalam suatu refleksivitas dunia yang demikian tinggi, seorang individu harus mencapai suatu tingkat yang tinggi dalam otonomi dengan melakukan aksi tertentu agar dapat bertahan hidup. Inilah kunci neoliberalisme. Bagaimana peran pemerintah harus

dijalankan dalam negara neoliberal? Peran pemerintah dan Bank Sentral, seperti halnya di Amerika Serikat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja agar tidak terjadi pengganggguran dalam jumlah besar sebagaimana pernah dialami pada tahun 1930-an. Presiden AS, Roosevelt, mengambil gagasan tersebut dengan mengembangkan program New Deal yang berhasil menyelamatkan warga AS dari keterpurukan. Sejak itulah, peran pemerintah dalam perekonomian makin dapat diterima, itu pun dalam pengertian bukan mengambil alih peran pasar.

Paham neoliberalisme telah mengglobal, tidak hanya menjadi paradigma bagi pengembangan ekonomi di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia-Oseania, dan Afrika. Neoliberalisme ini awalnya dikembangkan melalui sebuah konsensus yang dipaksakan melalui penerapan kebijakan neoliberalisme. Tata ekonomi dunia berbasis neoliberalisme ini ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama "*The Neoliberal Washington Consensus*". Konsensus Washington merupakan kesepakatan dari para pembela ekonomi privat, yakni wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional, yang memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik secara global.

Aliran neoliberal memiliki pokok-pokok pendirian sebagai berikut. *Pertama*, biarkan pasar bekerja. Kepercayaan ini termasuk membebaskan perusahaan swasta dari negara atau pemerintah, apapun akibat sosialnya. Implementasi kepercayaan tersebut berupa pemberian ruang bebas dan terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi seperti AFTA dan NAFTA maupun dalam bentuk kawasan pertumbuhan yang lebih kecil, yang merupakan area bebas dari birokrasi negara. Termasuk dalam kepercayaan ini adalah menekan pengeluaran upah dengan melakukan pengontrolan ketat terhadap serikat buruh. Demikian pula, menghapuskan kontrol terhadap harga dan membiarkan pasar bekerja tanpa ada distorsi. *Kedua*, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Hal ini harus dilakukan, karena kaum neoliberal percaya bahwa selain subsidi bertentangan dengan prinsip neoliberalisme tentang ketiadaan campur tangan pemerintah, juga berlawanan dengan prinsip pasar bebas (Notonagoro, 2011). *Ketiga*, neoliberal menekankan perlunya deregulasi ekonomi. Keyakinan tersebut diterapkan dengan mengurangi segala bentuk regulasi negara atau pemerintah terhadap usaha kebebasan ekonomi, karena regulasi selalu

mengurangi keuntungan yang seharusnya dapat diraih para kapitalis. *Keempat*, adanya keyakinan terhadap privatisasi. Neoliberalisme menyarankan negara untuk menjual perusahaan negara yang sudah tidak efektif kepada investor swasta, termasuk asing. Privatisasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti perbankan, perusahaan listrik, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Privatisasi ini ditempuh dengan tujuan agar berlangsung persaingan bebas dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ketiga dan keempat dari doktrin neoliberalisme ini sesuai dengan formula D-L-P atau *deregulation of economy*, *liberalization of trade and industry*, dan *privatization of state-owned enterprises* dari Steger and Roy (2010:14). *Kelima*, memasukkan gagasan "barang publik", paham sosial atau komunitas seperti "gotong royong" dan berbagai keyakinan "solidaritas sosial" ke dalam peti es, untuk kemudian diganti dengan "tanggung jawab individual".

Isi ajaran neoliberal atau neoklasik ini merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik (*homo ekonomikus* dan *invisible hand* Adam Smith) serta ajaran *marginal utility* dan keseimbangan umum (Santoso, 2010:4). Ajaran neoliberal ini ditekankan pada mekanisme pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu, senantiasa menuju pada keseimbangan dan efisiensi optimal, yang baik bagi semua orang. Jika pasar dibiarkan

bebas, tidak diganggu oleh aturan pemerintah yang baik sekali pun, masyarakat secara keseluruhan akan dapat mencapai kesejahteraan bersama yang optimal.

Jauh sebelum keluarnya kesepakatan para pengusaha kaya di Washington, akar neoliberal sudah ditancapkan oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya "*Mont Pelerin Society*" (Harvey, 2009:32). Kelompok ini dibentuk pada tahun 1947, terdiri atas ekonom, sejarawan, dan filsuf, seperti Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedmann, dan Karl Popper. Berkaitan dengan kehancuran peradaban manusia, mereka memberi pernyataan sebagai berikut.

> Nilai-nilai utama dari peradaban tengah di ambang bahaya. Di berbagai wilayah di permukaan bumi ini, martabat dan kebebasan manusia yang asasi lenyap. Sementara di tempat lain, martabat dan kebebasan manusia terus menerus terancam oleh perkembangan dari tendensi kebijakan yang ada. Posisi individu dan kelompok yang dibangun atas dasar kesukarelaan semakin tergerus oleh semakin meluasnya kekuasaan yang berwatak sewenang-wenang. Dua hal yang paling berharga yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan berpikir dan kebebasan mengungkapkan pendapat terancam oleh semakin meluasnya ajaran-ajaran yang meskipun berada dalam posisi minoritas suka menyerukan toleransi, yang sesungguhnya hanya mengejar kekuasaan dengan tujuan agar dengan kekuasaan itu, mereka bisa menindas dan melenyapkan semua cara pandang lain selain cara pandang mereka sendiri. Kelompok kami beranggapan bahwa berkembangnya situasi semacam itu disebabkan oleh tumbuhnya suatu cara pandang sejarah yang menolak semua standar moral dan juga oleh tumbuhnya teori-teori yang menyangsikan betapa pentingnya penegakan hukum. Kelompok kami berpandangan bahwa

> terciptanya situasi-situasi yang ada juga dipicu oleh merosotnya rasa percaya terhadap hak milik pribadi dan persaingan pasar, padahal tanpa ada kekuasaan dan prakarsa dalam urusan hak milik pribadi dan persaingan pasar, sulit untuk membayangkan eksistensi dari suatu masyarakat yang di dalamnya kebebasan bisa berjalan secara efektif (Harvey, 2009:33).

Kelompok Mont Pelerin Society sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kelompok liberal (klasik), karena komitmen mereka kepada nilai-nilai ideal kebebasan pribadi. Label neoliberal dilekatkan pada mereka, didasarkan pada alasan keterikatan mereka pada prinsip-prinsip pasar bebas dari teori ekonomi neoklasik yang berkembang pada paruh abad kesembilanbelas. Mereka sesungguhnya juga setuju dengan teori Adam Smith tentang *invisible hand* sebagai alat terbaik untuk memobilisasi naluri dasar manusia, seperti kerakusan, keserakahan, serta hasrat akan kemakmuran dan kekuasaan, demi kemanfaatan semua orang. Doktrin neoliberal yang mereka kembangkan pada prinsipnya sangat menentang teori intervensi negara sebagaimana pernah digagas Keynes, sebab seperti yang dikemukakan oleh Hayek, bentuk intervensi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jalan bagi terbentuknya pemerintah yang despotis (Steger and Roy, 2010:14).

Di Amerika Serikat, kelompok berkuasa yang terdiri atas individu-individu kaya raya dan pimpinan korporasi

menolak kuat bentuk intervensi negara dan mengorganisasi perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai konsensus untuk membangun suatu ekonomi campuran. Pada tahun 1970-an pemikiran neoliberal mulai masuk ke pusat kekuasaan, terutama di AS dan Inggris. Cabang-cabang Mon Pelerin Society dibentuk, seperti *Institute of Economic Affairs* di London dan *Heritage Foundation* di Washington. Pengaruh pemikir neoliberal makin kuat di dunia akademik, terutama di University of Chicago, tempat di mana Milton Friedman menjadi tokoh utamanya. Teori neoliberal mendapat pengakuan terhormat di dunia akademik, dengan diberikannya penghargaan hadiah Nobel bidang ekonomi kepada Hayek pada tahun 1974 dan Friedman pada tahun 1976.

Teori neoliberal dengan bungkus monetarismenya mulai menggunakan pengaruh riilnya di berbagai medan kebijakan, misalnya sepanjang kepemimpinan Carter, deregulasi ekonomi menjadi salah satu jawaban terhadap stagflasi kronis yang dialami AS selama tahun 1970-an. Thatcher, perdana menteri Inggris mengadopsi pandangan bahwa Keynesianisme harus ditinggalkan dan solusi-solusi sisi penawaran monetaris merupakan sesuaytu yang fundamental untuk menyembuhkan stagflasi yang telah mencengkeram ekonomi Inggris sepanjang tahun 1970-an. Pilihan tersebut menurut Thatcher, sama artinya dengan

merevolusi kebijakan-kebijakan fiskal dan sosial. Institusi demokratik yang telah dibangun sejak tahun 1945, seperti serikat buruh harus ditaklukkan dan dihancurkan semua bentuk solidaritas sosial yang menghambat fleksibilitas kompetisi. Kata Thatcher, "tak ada masyarakat, yang ada hanyalah individu laki-laki dan perempuan" (Harvey, 2009:39).

Apa yang dikatakan Thatcher, menunjukkan bahwa ia telah terhipnotis oleh nilai-nilai neoliberal, seperti kebebasan individu dan bekerjanya pasar bebas. Pada tahun 1979, telah tercapai konsolidasi besar-besaran dari neoliberalisme, sehingga paradigma neoliberal menjadi suatu ortodoksi ekonomi yang baru, yang mengarahkan kebijakan publik pada level negara-negara kapitalis maju, seperti di Amerika Serikat dan Inggris (Harvey, 2009:37). Mengapa aliran neoliberal ini dominan digunakan di hampir semua negara di dunia? Dominasi aliran ekonomi neoliberal ini disebabkan keberhasilan negara-negara maju dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga berdampak pula pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Santoso, 2010). Praktik neoliberal tersebut bukannya tanpa kritik. Kritik tersebut muncul karena di negara maju sekali pun, dampak negatif tetap muncul, di antaranya adalah timbulnya ketimpangan dalam distribusi

pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kemerosotan berbagai aspek kehidupan sosial (Santoso, 2010:5).

Praktik neoliberal, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, lebih mengarah pada bagaimana Amerika Serikat sebagai negara kampiun ekonomi dunia ingin tetap memperlihatkan kekuatan dominasinya di dunia. Hubungan AS dengan negara-negara berkembang tidak lain adalah untuk memperkuat hubungan dominasi dan memperkokoh hegemoni AS. Banyak pemerintah negara-negara berkembang yang kekurangan dana dan bingung mencari pinjaman. AS bisa memberikan pinjaman dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi negara peminjam. Sebagaimana ditulis Harvey (2009:45), bank-bank investasi di New York mau memberi pinjaman, dengan harapan tradisi imperial AS tetap terjaga, dengan membuka secara paksa ruang-ruang investasi baru dan untuk melindungi operasi-operasi keuangan mereka di luar negeri. Hasilnya, pada abad keduapuluh, AS telah berkembang menjadi suatu kekuatan imperialisme dengan sistem yang lebih terbuka dan tanpa koloni.

Manifestasi mencolok dari pendekatan imperialis AS terlihat pada kebijakannya terhadap Nikaragua pada tahun 1920-an dan 1930-an. Ketika AS terlibat sengit dalam peperangan melawan gerilyawan kelompok Sandinista, AS menempuh strategi memilih orang kuat di Nikaragua, yaitu

Somoza dan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Somoza beserta keluarga dan sekutu-sekutunya agar mereka memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan represif dan dapat mengakumulasi kekayaan. Sebagai imbalannya, mereka harus selalu membuka diri bagi operasi kapital dan dukungan AS demi kemajuan kepentingan ekonomi dan politik AS. Politik kolusi AS juga diperlihatkan di Iran, ketika CIA merekayasa kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Mosaddeq yang terpilih secara demokratis pada tahun 1953. Shah Iran didudukkan sebagai penguasa Iran, dengan imbalan kontrak-kontrak minyak Iran akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan AS. Shah Iran juga dijadikan sebagai salah satu penjaga kunci bagi kepentingan AS di kawasan Timur Tengah yang kaya minyak. Apa yang dilakukan AS ini merupakan strategi ekspansi geografis terhadap kapital agar kapitalisme dapat bertahan hidup.

C. Kritik terhadap Neoliberalisme

Neoliberalisme yang digunakan sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, dalam tujuan awalnya tidak dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemertaan ekonomi suatu negara, melainkan terdapat agenda tersembunyi. Sebagaimana dikatakan Bello (dalam Hadiz, 2009), tujuan dari restrukturisasi neoliberal adalah untuk menggairahkan

proses akumulasi kapital dengan cara menghilangkan rintangan-rintangan yang disediakan negara terhadap modal dan kekayaan, termasuk cara menghimpun dan memanfaatkan modal dan kekayaan tersebut. Selain itu, restrukturisasi versi neoliberalisme juga berperan dalam mengalihkan pendapatan orang miskin dan menengah kepada orang-orang kaya.

Pengalaman menunjukkan bahwa neoliberalisme ternyata gagal, bahkan dalam pemahaman yang disusun oleh para penggagas neoliberalisme itu sendiri (Chang dan Grabel, 2008). Krisis yang dialami negara-negara di berbagai belahan dunia, merupakan bentuk kegagalan pemakaian dan penerapan ajaran neoklasik atau neoliberal (Santoso, 2010:5). Program penyesuaian struktural yang diterapkan oleh lembaga-lembaga Bretton Woods di negara-negara Afrika tidak menghasilkan kisah sukses, tetapi justru memperburuk kondisi hidup rakyat yang sudah miskin, menelurkan kemiskinan yang parah, memperlebar polarisasi sosial, serta meningkatkan pengangguran di seluruh benua Afrika (Abrahamsen, 2004). Kondisi buruk tersebut juga ditimpali oleh elit-elit negara dengan posisi ekonomi dan politik mereka yang superior yang kerap kali berada dalam posisi terbaik untuk mengambil keuntungan dari kebijakan penyesuaian struktural, seperti privatisasi (Abrahamsen, 2004). Naomi Klein (dalam Latif, 2009)

memberi pandangan yang serupa bahwa kebijakan neoliberal menyumbang tumbuhnya otoritarianisme, eksploitasi, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan.

Dany Rodrick (2002) sebagaimana dikutip Chang dan Grabel (2008) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 1990an tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sebagaimana digembar-gemborkan oleh para pendukung neoliberal. Di Amerika Latin, hanya 3 negara yaitu Argentina, Chili, dan Uruguay yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih cepat selama era neoliberal tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an Brazil menghadapi krisis luar biasa dalam bidang ketenagakerjaan, dimana 60 juta pekerjaan hilang selama krisis (Anonim, 2016). Karena krisis tersebut, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, rumah, dan pendapatan mereka. Negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menerapkan neoliberalisme cepat pertumbuhan ekonominya bukan karena keberhasilan sistem pasar, tetapi lebih banyak didorong oleh kebijakan proteksi oleh negara. Selain tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem neoloiberalisme yang menghendaki adanya biaya penyesuaian dalam jangka pendek berupa pemotongan pengeluaran biaya sosial justru menurunkan standar hidup, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan antarnegara. Kesenjangan antarnegara ini muncul karena konsentrasi arus modal swasta di negara-negara maju

(utara). UNDP (1999, 2001) sebagaimana dikutip Chang dan Grabel (2008) mencatat bahwa pada tahun 1960, negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan terkaya dari populasi dunia meraup pendapatan 30 kali lipat dibandingkan negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan termiskin dari populasi dunia dan pada tahun 1980, awal era neoliberal, rasio tersebut menjadi 45:1, pada tahun 1989 melebar menjadi menjadi 59:1, dan pada 1997 melebar lagi menjadi 70:1. Data yang dikemukakan oleh Winarno (2010) lebih parah lagi, yakni rasio pendapatan orang kaya dan miskin di dunia pada tahun 1960 adalah 30:1; meningkat menjadi 60:1 pada tahun 1990; meningkat lagi menjadi 74:1 pada tahun 1999 dan pada tahun 2015 meningkat tajam menjadi 100:1. Rasio pendapatan si kaya dan si miskin dapat dicermati lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.

Rasio Pendapatan Si Kaya dan Si Miskin di Dunia

Nomor	Tahun	Rasio Pendapatan Si Kaya dan Si Miskin
1.	1960	30:1
2.	1990	60:1
3.	1999	74:1
4.	2015	100:1

Data yang diperoleh Winarno (2010) menunjukkan pula bahwa selama tahun 1999-2000, sebanyak 2,8 miliar orang di dunia hidup dengan uang kurang dari dua dollar Amerika setiap hari, 840 juta orang hidup kekurangan gizi, dan 2,4 miliar orang tidak memiliki akses terhadap air bersih, serta 1 dari 6 anak (kebanyakan perempuan) tidak mengenyam pendidikan dasar.

Kebijakan neoliberal juga berdampak pada kemiskinan. Sebagaimana dilaporkan UNDP (2002) dalam (Chang dan Grabel, 2008) bahwa terdapat 2,8 miliar orang hidup kurang dari 2 dolar per hari, sementara 1,2 miliar lainnya hidup kurang dari 1 dolar per hari. Di sub-Sahara Afrika, setengah dari jumlah penduduknya lebih miskin dibanding pada tahun 1990 dan 46% penduduknya hidup kurang dari 1 dolar per hari. Di Asia Selatan, 40% penduduknya hidup di bawah 1 dolar per hari. Di Asia Timur, Amerika Latin, dan Pasifik penduduknya sebanyak 15% hidup di bawah 1 dolar per hari.

Indonesia yang kelihatannya berhasil dalam membangun ekonominya, terutama kinerja yang diperlihatkan oleh pemerintah Orde Baru, dalam realitasnya juga gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar daerah merupakan bukti nyata dari kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru yang jelas-

jelas berorientasi kepada paham kapitalisme dan neoliberalisme. Chaniago (2012) mencatat ada 7 ketimpangan menjelang akhir Orde Baru, yaitu (1) kesenjangan penyebaran aset di kalangan swasta, (2) kesenjangan ekonomi antarsektor, (3) kesenjangan antarwilayah, (4) kesenjangan antarsub-wilayah, (5) kesenjangan antargolongan sosial ekonomi, (6) kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia, dan (7) kesenjangan desa-kota. Pada tahun 1997 dan 1998 *bubble economy* Indonesia di masa Orde Baru mengalami kolaps.

Swasono (2010) mengungkapkan bahwa sistem ekonomi neoliberal dengan tangan tersembunyi akan dapat mengatur ekonomi merupakan paradigma yang keliru. Tangan tersembunyi tidak akan mampu mengatasi ketimpangan struktural, terutama kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan neoliberal justru lebih mengedepankan kepentingan kaum pemodal, rakyat direduksi dan ditempatkan pada posisi marginal-residual. Neoliberalisme yang menghendaki privatisasi sarana-sarana sosial dan perusahaan-perusahaan negara justru mengubah hubungan kepemilikan dan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang memperkuat posisi kelompok kaya, kalangan bisnis, dan pemupuk rente ekonomi dengan korban kelompok bawah (Swasono, 2010). Catatan serupa

juga dikemukakan oleh Sayuti Hasibuan (2008:11) dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia di hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008, bahwa kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia dikarenakan pemerintah menggunakan paradigma operasional ekonomi *neoklasik materialisme* dan *individualisme* dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional pembangunan sosial ekonomi Indonesia selama ini.

D. Penutup

Neoliberalisme merupakan penerapan nilai-nilai liberal dalam perekonomian dalam bentuknya yang baru. Kata neo dalam neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang mulanya dipelopori oleh ekonom Inggris Adam Smith. Neoliberalisme muncul dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 1960-an yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Neoliberalisme bukan merupakan teori besar tetapi merupakan bagian dari serpihan teori kontemporer anti intervensi. Neoliberalisme merupakan revivalisme dari pemikiran ekonomi liberal (klasik) yang mengakomodasi pasar bebas, kebebasan individu, dan intervensi negara secara minimal dalam

perekonomian yang mengkaitkan individu, negara, masyarakat, dan pasar dalam suatu perekonomian kapitalis.

Sistem neoliberal ini memiliki 5 karakteristik. *Pertama*, bekerjanya mekanisme pasar. *Kedua*, melakukan efisiensi dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial dan jaminan sosial. Semuanya itu dilakukan untuk mengurangi peran negara. *Ketiga*, neoliberal menekankan perlunya deregulasi ekonomi. Hal ini ditempuh karena regulasi selalu mengurangi keuntungan yang seharusnya dapat diraih para kapitalis. *Keempat*, adanya keyakinan terhadap privatisasi. Neoliberalisme menyarankan negara untuk menjual perusahaan negara yang sudah tidak efektif kepada investor swasta, termasuk asing. *Kelima*, memasukkan gagasan "barang publik", paham sosial atau komunitas seperti "gotong royong" dan berbagai keyakinan "solidaritas sosial" ke dalam peti es, untuk kemudian diganti dengan "tanggung jawab individual".

Paham neoliberalisme telah mengglobal, tidak hanya menjadi paradigma bagi pengembangan ekonomi di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia-Oseania, dan Afrika. Penerapan mekanisme pasar sebagai salah satu kunci neoliberalisme dengan mengurangi peran negara, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Gagasan

neoliberalisme mencapai kejayaannya pada tahun 1980-an pada masa kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margareth Thatcher di Inggris.

Kebijakan neoliberal akan mendatangkan kemakmuran di negara-negara dunia ketiga terbukti hanya harapan kosong, karena banyak negara-negara penganut ideologi tersebut yang gagal, tidak mampu menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Justru sistem neoliberal tersebut makin memperkokoh ketergantungan negara-negara dunia ketiga kepada negara-negara maju.

BAB IV
DEVELOPMENTALISME

Membangun adalah sebuah keniscayaan jika suatu masyarakat atau bangsa ingin survive dan mengembangkan diri. Pembangunan memiliki berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak hanya itu, pembangunan juga mengandung aspek fisik seperti bangunan gedung, sarana prasarana jalan, pelabuhan, bendungan, lapangan terbang, dan bentuk bangunan fisik lainnya.

Dari semua aspek tersebut, aspek yang paling dominan dalam menghasilkan kesiapan bangsa untuk bisa membangun aspek atau bidang lainnya adalah ekonomi. Dalam kaitan inilah muncul konsep pembangunanisme atau *developmentalisme*.

Dalam bagian berikut dipaparkan sejarah developmentalisme, teori-teori pembangunan, dan developmentalisme di Indonesia.

A. Sejarah Developmentalisme

Konsep berikut yang memiliki kaitan erat dengan teori kapitalisme dan neoliberalisme adalah "pembangunanisme" atau *developmentalisme*. Konsep pokok *developmentalisme* adalah pembangunan, yaitu penguatan basis material suatu negara, melalui industrialisasi, mengikuti pola yang sangat

mirip dari satu negara ke negara lain (Hettne, 2001). Proses meniru yang dilakukan suatu negara dengan melakukan industrialisasi mengakibatkan homogenisasi pembangunan dunia yang menciptakan struktur internasional pusat-pinggiran. Kinerja pembangunan dari suatu negara dapat mengubah struktur pusat-pinggiran tersebut.

Model "pembangunanisme" atau *developmentalisme* muncul sebagai model *governance* pasca tahun 1930-an, sebagai alternatif terhadap paham kapitalisme liberal yang pada saat itu tengah mengalami krisis, yang dikenal dengan zaman depresi (*great depression*). Cikal bakal gagasan model *developmentalisme* pada mulanya dibangun berdasarkan teori ekonomi John Maynard Keynes yang secara sukses diterapkan oleh Roosevelt dengan proyek "New Deal", yang dianggap berhasil membawa Amerika Serikat keluar dari depresi dan krisis ekonomi pada tahun 1930-an.

Developmentalisme merupakan ideologi yang diciptakan negara-negara maju atau negara utara terhadap negara-negara sedang berkembang atau negara selatan untuk mengubah pola pikir dan cara kerja negara selatan melalui proses modernisasi dan industrialisasi. Pemaksaan konsep *developmentalisme* ini dilakukan negara-negara utara agar dapat mendominasi dan mempertahankan ketergantungan negara-negara selatan kepada negara-negara utara.

Berbeda dengan sistem neoliberal yang menghendaki pengurangan intervensi negara, *developmentalisme* memandang bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan intervensi moderat dari negara (Bresser Perreira, 2017). Intervensi negara dibutuhkan agar kinerja ekonomi dapat menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Developmentalisme oleh Harry S. Truman digunakan sebagai strategi perang dingin untuk membendung semangat sosialisme yang bangkit bersamaan dengan runtuhnya kolonialisme di kawasan bangsa-bangsa Selatan. Paham *developmentalisme* atau *pembangunanisme* merupakan pilihan pendekatan pasca kolonialisme yang dibangun di atas landasan modernisasi. Secara historis, *pembangunanisme* merupakan bagian dari perjalanan dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang diperkirakan berusia lebih dari limaratus tahun dan memiliki akar sejarah pada periode perubahan sosial yang berkaitan dengan revolusi industri (Fakih, 2010). Proses itu dimulai dari zaman kolonialisme, yang merupakan bentuk perkembangan kapitalisme di Eropa, yang mengharuskan ekspansi secara fisik guna memastikan pasokan bahan baku mentah untuk menggerakkan aktivitas industri mereka. Pada fase kolonialisme inilah, proses dominasi manusia dengan segenap teori dan ideologi yang mendukungnya

berlangsung dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. Walaupun banyak negara Afrika baru merdeka pada tahun 1970-an, namun zaman berakhirnya kolonialisme secara formal adalah pada saat terjadinya Perang Dunia II.

Berakhirnya kolonialisme, bangsa-bangsa yang dijajah selanjutnya memasuki era post kolonialisme, dalam hal mana modus dominasi dan eksploitasi tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Era inilah yang dimaksud dengan era pembangunanisme. Era tersebut ditandai dengan terlepasnya bangsa-bangsa negara berkembang dari cengkeraman penjajah, tetapi dominasi dari negara penjajah atas bekas koloninya tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan kebijakan perubahan sosial. Teori pembangunanisme menjadi bagian dari alat dominasi, karena berbagai teori tersebut menjadi paradigma untuk melanggengkan dan melegitimasi ketergantungan negara-negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju. Kolonialisme ide atau paradigma tetap digunakan oleh negara-negara maju untuk mempertahankan bahkan memperkuat dominasi dan watak imperialismenya terhadap negara-negara dunia ketiga.

B. Teori-teori Pembangunan

Teori-teori pembangunan (barat) sesungguhnya berangkat dari paradigma ekonomi klasik yang dimotori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus, dan neoklasik yang dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Keynes, E. Domar dan R. Harrold Domar serta W.W. Rostow. Berkaitan dengan teori ekonomi klasik maupun neoklasik, model teori pembangunan secara diametral dapat digolongkan ke dalam dua model, yaitu model pembangunan yang berciri kapitalistik dan model pembangunan berciri sosialistik. Pembedaan ini menurut Berger didasarkan pada masalah kepemilikan aset produksi. Jika yang memiliki aset tersebut adalah individu, maka model pembangunan cenderung kapitalistik. Budiman (1995:x), membagi teori pembangunan ke dalam tiga kelompok, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan. Termasuk dalam teori modernisasi adalah teori Harrod Domar tentang tabungan dan investasi, Max Weber dengan etika Protestan, David Mc Clelland dengan dorongan berprestasi atau n-Ach, W.W. Rostow dengan lima tahap pembangunan (pertumbuhan), Bert Hoselitz dengan

faktor-faktor non-ekonomi, dan Alex Inkeles dan David H. Smith dengan teori manusia modern.

Teori modernisasi biasanya bersifat ahistoris, hukumnya sering dianggap berlaku secara universal (Budiman, 1995 : 39). Itulah sebabnya, teori ini dapat diberlakukan tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun faktor tempat. Teori modernisasi berkecenderungan memandang masyarakat bergerak secara garis lurus (unlinier) dari sesuatu yang irasional menjadi sesuatu yang rasional atau dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Konteks masyarakat dan perkembangan masyarakat yang memiliki dinamikanya sendiri sepanjang sejarah kurang mendapat perhatian. Inilah kelemahan teori modernisasi.

Teori ketergantungan termasuk dalam teori struktural. Teori struktural memandang bahwa kemiskinan yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang berorientasi pada produk pertanian, merupakan akibat dari struktur prekonomian dunia yang bersifat eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah (Budiman, 1995:41). Akibatnya, surplus dari negara-negara dunia ketiga beralih ke negara-negara industri maju. Teori ketergantungan lahir dari dua induk, yaitu dari pandangan Raul Prebisch dan Paul Baran. Raul Prebisch dengan teori industri substitusi impor, berpendapat bahwa teori pembagian kerja secara

internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif, menjadikan negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produknya. Negara-negara maju yang disebutnya negara pusat menghasilkan barang industri dan negara-negara dunia ketiga dinamakan negara pinggiran memproduksi hasil-hasil pertanian.

Sesuai dengan teori modernisasi, ketergangan, dan pascaketergantungan, negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga melakukan transaksi perdagangan dan diharapkan saling menguntungkan dan hasilnya sama-sama kaya. Namun dalam kenyataannya, negara-negara pinggiran makin bertambah miskin dan kekayaannya disedot oleh negara-negara industri maju. Mengapa hal ini terjadi? Prebisch menunjuk penyebabnya pada penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditi barang industri (Budiman, 1995:47). Dalam transaksi perdagangan internasional, barang-barang industri menjadi semakin mahal dibandingkan barang-barang hasil pertanian. Akibatnya terjadi defisit pada neraca perdagangan negara-negara pertanian bila mereka berdagang dengan negara-negara industri. Inilah yang menyebabkan negara-negara pinggiran menderita kemiskinan.

Paul Baran dengan teori sentuhan yang mematikan dan *kretinisme*, menyatakan bahwa sentuhan yang diberikan negara-negara maju tidak mendorong negara-negara dunia

ketiga bangkit dan berkembang seperti halnya negara-negara kapitalis AS dan Eropa. Sentuhan tersebut justru akan mengakibatkan negara-negara pra-kapitalis terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan (Budiman, 1995:57). Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalisme akan terjangkit penyakit *kretinisme*, dimana sentuhan kapitalisme justru membuat yang disentuh menjadi kerdil dan tidak berkembang (Arif, 2000:108). Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia barat ke negara-negara dunia ketiga membuat surplus yang ada di negara pinggiran tersebut diambil oleh pendatang melalui berbagai cara. Akumulasi modal yang seharusnya ada di negara pinggiran tidak tercipta, dan yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu penyusutan modal. Karena itulah, kapitalisme negara-negara pinggiran lebih tepat disebut sebagai kapitalisme ketergantungan kepada perkembangan kapitalisme di negara pusat. Ketergantungan yang dimaksudkan di sini, menurut Dos Santos adalah suatu keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini

hanya berperan sebagai penerima akibat saja (Budiman, 1995:63). Inilah yang disebut dengan saling ketergantungan yang tidak setara.

Andre Gunder Frank dengan teori pembangunan keterbelakangan sependapat dengan Paul Baran, bahwa kapitalisme baik global maupun nasional, merupakan faktor yang telah menghasilkan keterbelakangan di masa lalu dan yang terus mengembangkan keterbelakangan di masa sekarang (Budiman, 1995:65). Keterbelakangan bukan kondisi alamiah dari suatu masyarakat, tetapi merupakan sebuah proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran atau negara-negara satelit, adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat atau metropolis.

Teori pasca ketergantungan berkembang sebagai reaksi dari kelemahan teori ketergantungan. Salah satu kelemahan teori ketergantungan adalah pendefinisiannya sebagai konsep dikotomi, yang satu tergantung dan lainnya mempengaruhi. Padahal dalam realitasnya, tidak ada negara yang sepenuhnya tergantung dan sepenuhnya otonom. Dalam kaitannya dengan hal ini, otonomi yang semula dianggap baik, tidak selamanya demikian. Demikian pula ketergantungan tidak selamanya buruk. Belum lagi sulit dibedakan, apakah suatu negara itu mengalami

ketergantungan atau keterpengaruhan. Munculnya teori pasca ketergantungan, berawal dari adanya kenyataan empiris bahwa beberapa negara pinggiran mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Industrialisasi juga berjalan dengan cepat di sana, suatu fenomena yang oleh teori ketergantungan dianggap tidak mungkin. Berangkat dari kenyataan empirik ini, tumbuhlah teori liberal yang kritis terhadap teori ketergantungan. Definisi dari ketergantungan dipandang terlalu kabur, sehingga sulit dijadikan sebagai pisau analisis. Kubu teori liberal memandang bahwa teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika bahasa belaka.

Warren menolak pandangan bahwa negara-negara yang tergantung cenderung terbelakang secara ekonomi; justru sebaliknya, negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran hanyalah ilusi. Ramalan teori ketergantungan tidak benar. Berdasarkan data-data statistik yang dikumpulkan, Warren menyimpulkan bahwa negara-negara dunia ketiga tidak mengalami kemandegan secara relatif maupun absolut setelah perang dunia kedua, sebaliknya kemajuan yang berarti dalam hal kemakmuran material dan pembangunan kekuatan produksi telah dicapai, dengan

kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum perang (Budiman, 1995:103).

Kemunculan teori artikulasi sama dengan asumsi teori Warren, yakni ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan, karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Pertanyaan yang muncul, mengapa masih dijumpai negara-negara yang terbelakang padahal mereka telah mengaplikasikan kapitalisme. Teori artikulasi berpendapat bahwa tidak berkembangnya kapitalisme di negara-negara pinggiran, dikarenakan artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Kegagalan kapitalisme di negara pinggiran dikarenakan koeksistensi cara produksi kapitalis dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat (Budiman, 1995:106). Menurut teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Teori lain yang mengkritik teori ketergantungan adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia yang digagas Wallerstein, beranggapan bahwa dahulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya (Budiman, 1995:108). Dalam sistem dunia, tidak berarti bahwa dia menguasai

seluruh dunia, melainkan dirumuskan sebagai unit dengan satu pembagian kerja dengan macam sistem budaya. Sistem dunia sekarang adalah kapitalisme global. Bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan, dimana negara kebangsaan dalam sebuah dunia modern tidak lagi merupakan sistem yang tertutup dan karenanya tidak dapat dianalisis seakan-akan mereka berdiri sendiri. Seperti halnya permainan "*bandulan*", negara-negara bisa naik atau turun kelas dan naik turunnya kelas ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia.

Teori-teori dan konsep-konsep pembangunan telah banyak dibangun oleh para penulis. Ada yang optimis dengan *developmentalisme* yang dirancang dari barat dan ada pula yang pesimis dengan jargon *developmentalisme*. Teori-teori pembangunan cenderung normatif, meskipun ada juga teori yang didasarkan pada landasan empirik. Namun terlepas dari semua itu, Arif (2000) melihat adanya problema bawaan dalam teori *developmentalisme*. Problema tersebut mencakup lima hal.

Pertama, dependensia dan eksploitasi. Perspektif dependensia ini menjelaskan tentang bentuk ketergantungan negara dunia ketiga pada dunia pertama. Hal ini bisa dibuktikan dari derasnya arus barang dan jasa serta kapital dari negara-negara dunia pertama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Frank, bahwa dalam tiap ketergantungan terdapat dua faktor penting, yaitu: (1) modal asing yang menyerbu negara dunia ketiga, (2) kolaborasi pemerintah lokal dengan kaum borjuis (Arif, 2000:133). Penderitaan, keterbelakangan, suburnya ketidakadilan dan kediktatoran militer di negara-negara dunia ketiga, bukan karena adanya sisa-sisa feodalisme atau modernisasi yang salah tempat, melainkan karena tatanan ketergantungan pada kapitalisme. Penjajahan baru negara kaya atas negara miskin sudah bergeser dari model penjajahan fisik dan geografis menuju model yang lebih halus dan tidak kentara, yakni dengan menciptakan ketergantungan negara miskin kepada negara kaya.

Alih-alih adanya IMF dan Bank Dunia yang konon ingin menyembuhkan penyakit kemiskinan di negara-negara dunia ketiga, dalam kenyataannya justru makin melanggengkan ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara dunia pertama.

Kedua, transformasi ideologi, nilai, dan budaya. Pembangunan dan industrialisasi di negara-negara dunia ketiga bukan hanya dimaknai sebagai kehadiran barang, jasa, teknologi, dan informasi, melainkan juga transformasi nilai modernisasi. Modernisasi ini dipahami sebagai perubahan perilaku tradisional ke perilaku modern. Ini merupakan wujud dari hegemoni negara maju atas negara

dunia ketiga. Globalisasi gaya hidup, seperti hedonistik, *profit oriented* dan budaya konsumtif melanda kehidupan masyarakat dunia ketiga. Nilai-nilai modern yang rasionalistik, individualistik, dan positivistik merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dunia ketiga dan berperan meminggirkan nilai-nilai lokal yang kolektivistik, asketis, dan fatalistik. Citra manis produk negara maju telah melenakan masyarakat negara-negara dunia ketiga hingga mereka enggan menikmati budaya lokalnya.

Ketiga, hegemoni pengetahuan. Pengetahuan merupakan alat peredaran perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya yang memajukan kapitalisme (Arif, 2000:143). Pengetahuan pembangunan dan modernisasi tidak saja berposisi sebagai hasrat untuk mengetahui, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Diskursus pembangunan yang positivistik mengharamkan bentuk-bentuk cara mengetahui yang non-positivistik. Paradigma positivisme-rasional merupakan paradigma yang bertumpu pada keagungan otak manusia dan tentu bersifat individualis dan karenanya relasi sosial cenderung diabaikan karena bukan jalur dari paham positivisme. Dimensi pengagungan otak manusia atau rasionalitas sejalan dengan aliran positivisme dan praktik kapitalisme merupakan wujud konkritnya. Praktik kapitalisme dalam jargon pembangunan harus dikawal oleh

aparatur negara. Media massa atau instrumen lainnya dapat digunakan sebagai alat hegemoni untuk memaksakan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.

Keempat, distorsi gender. Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Arif, 2000:147). Misalnya, perempuan lemah lembut, emosional, dan keibuan; sedangkan laki-laki kuat, perkasa, dan rasional. Berbeda dengan gender, jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Arif, 2000:147). Misalnya, laki-laki memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma; sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, dan ovum. Ideologi gender yang mestinya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki (*gender equality*), tetapi dalam realitasnya, program-program pembangunan yang didiktekan dari luar, justru melahirkan subordinasi dan marginalisasi perempuan. Perempuan menjadi objek pembangunan, tidak bisa menikmati hasil pembangunan setara dengan laki-laki, dan kurangnya perlindungan hukum kepada mereka. Sosialisasi kultur patriarkat sejak dari keluarga hingga komunitas yang lebih besar, yaitu pada level negara, turut

mengekalkan penderitaan perempuan hampir dalam semua aspek kehidupan.

Kelima, dekomposisi ekologi. Pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara dunia ketiga cenderung membawa cacat bawaan, yaitu anti ekologi. Orientasi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Jika orientasi ekonomi ini berhadapan dengan kepentingan ekologi, biasanya yang jadi korban adalah ekologi atau lingkungan. Wajarlah bagi penganut developmentalisme, jika dalam praktik-praktik pembangunan yang tujuannya mengejar pertumbuhan ekonomi menjadikan lingkungan rusak.

C. Developmentalisme di Indonesia

Ideologi *developmentalisme* sebagai turunan nyata dari sistem kapitalisme memiliki dampak yang luar biasa terhadap Indonesia, yang secara riil mulai dibangun sejak periode Orde Baru. Indonesia adalah pengikut setia ideologi kapitalisme dan *developmentalisme.* Kegagalan ekonomi pemerintah sebelumnya sering digunakan sebagai alasan mengapa pemerintah Orde Baru memilih ekonomi sebagai pelumas dalam pembagunan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Orde Baru membangun demokrasi ekonomi dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi masuknya modal asing (Arif, 2000:221). Inilah salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan konsumen setia dari kapitalisme yang dikembangkan negara dunia pertama. Rencana

pembangunan ekonomi Indonesia dikukuhkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan diakselerasi dalam tahap-tahap pembangunan yang disebut dengan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek. Repelita merupakan dokumen politik yang disusun setiap lima tahun, yang berisikan program-program pembangunan yang mengakomodasi paradigma kapitalisme dan pembangunanisme sebagai dasar dan arah pembangunan nasional Indonesia.

Strategi besar pembangunan Orde Baru adalah trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan ekonomi. Dalam GBHN, pemerintah Orde Baru juga merinci lebih lanjut strategi pemerataan ekonomi ke dalam delapan jalur pemerataan. Stretegi pemerataan tersebut tidak salah, yang keliru adalah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Prioritas pertumbuhan ekonomi memperlihatkan hasil yang menggembirakan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, setidaknya jika dilihat dari aspek statistiknya. Tahun 1993 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 %; naik menjadi 7,5 % pada tahun 1994; naik lagi menjadi 8,1 % pada tahun 1995; dan turun sedikit menjadi 7,8 % pada tahun 1996 (Arif, 2000 : 223). Angka-angka pertumbuhan ekonomi ini demikian fantastik dan mampu melampaui angka

pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Orde Baru berasumsi bahwa dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan akan dapat diciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti negara-negara dunia ketiga lainnya, pemerintah Orde Baru melakukan industrialisasi sebagai konsekuensi logis pembangunan. Industrialisasi di Indonesia merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar demi percepatan transformasi sosial dan tercapainya tujuan pembangunan, terutama terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagaimana dikatakan Gunar Myrdal, bahwa industrialisasi yang diwujudkan dengan pendirian pabrik-pabrik besar dan modern, bagi politisi dan negrawan merupakan ungkapan kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Industrialisasi di Indonesia mengalami paradoks, ia hanya mengacu pada terjadinya transformasi peranan sektor pertanian terhadap sektor industri sekedar untuk memenuhi target pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain, banyak sumber daya yang digunakan untuk kepentingan industrialisasi tidak melibatkan kepentingan rakyat. Irionisnya, banyak kebijakan yang mendorong kemajuan industri yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan basis pertanian. Padahal karakter

Indonesia yang agraris, harusnya menjadi penciri bagi pengembangan industrialisasi di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan memasukkan pertanian dalam *blue-print* kebijakan pembangunan industri, maka sustainibilitas pembangunan dapat terjaga. Pemerintah dihadapkan pada pilihan, apakah memilih sektor industri manufaktur yang bisa memberikan akselerasi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi atau memilih sektor basis, yaitu pertanian yang lamban dalam memberikan kontribusi kepada pertumbuhan. Jawaban bisa ditebak, pemerintah memilih industri.

Konsentrasi struktur industri yang oligopolistik dan monopolisitik sangat merugikan kepentingan umum (*public interest*). Kartel-kartel yang berkembang lebih berorientasi kepada kartel itu sendiri, tidak kepada kepentingan rakyat banyak. Karakteristik politik Orde Baru yang paternalisitik dan kolutif menjadi mesin pendorong industrialisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi. Para kapitalis yang tumbuh subur pada masa Orde Baru tanpa hambatan mengeksploitasi kekayaan rakyat. Ujung-ujungnya terjadi kesenjangan ekonomi yang makin lebar antara industrialis kapitalis dan rakyat.

Apa yang dicita-citakan Soeharto dengan tim ekonominya, tidak mampu melahirkan kesejahteraan bangsa yang lebih luas sebagaimana Adam Smith menggagasnya dalam bukunya *The Wealth of Nation*.

Pemerataan hanya kata-kata manis yang tak terbukti, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh kapitalisme. Pengejaran pertumbuhan ekonomi, justru melahirkan polarisasi kepemilikan ekonomi antara mereka yang bermodal besar dan pihak yang berkapital kecil. Yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Pembangunan dengan paradigma pragmatismenya, melahirkan kompetisi yang tidak sehat, penindasan, dan eksploitasi terhadap kelompok marginal, seperti kaum buruh, petani, orang-orang miskin, dan juga perempuan. Kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana dijanjikan oleh kapitalisme dan developmentalisme hanyalah utopia. Pembangunan telah gagal menyejahterakan rakyat (Arif, 2000:230).

Proyek pembangunan kapitalis yang diterapkan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia mengalami kegagalan. Alih-alih ingin menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui program industrialisasi sebagaimana diinginkan oleh kapitalisme, namun yang terjadi kesenjangan ekonomi makin lebar antara yang kaya dengan yang miskin, kemelaratan meningkat, pengangguran bertambah, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan makin parahnya kerusakan lingkungan.

Hegemoni yang ditancapkan oleh kuku kapitalisme Barat terhadap negara-negara dunia ketiga termasuk

Indonesia makin kuat, demikian pula hegemoni yang dialami oleh rakyat Indonesia dari pemerintahnya. Perselingkuhan antara kapitalisme dengan negara, yang oleh Kunio disebut kapitalisme semu (*ersatz capitalism*), makin tak terelakkan dalam praktik-praktik pembangunan di Indonesia. Kemesraan hubungan antara birokrat dan kapitalis di Indonesia, menyulitkan para analis untuk membedakan mana yang birokrat dan mana yang kapitalis, sebab dalam praktiknya baik birokrat dan kapitalis acapkali bertukar peran.

Kapitalisme modern merupakan kapitalisme yang penuh dengan kelicikan. Arif (2000), penulis anti *developmentalisme* tidak menampik bahwa di masa depan, negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia tidak bisa mengelak dari arus global tersebut. Pembangunan yang kapitalistik dan modernisasi peradaban bukan tidak mungkin menjadi corak kehidupan manusia di masa mendatang (Arif, 2000:326). Dunia masa depan meskipun memiliki dua wajah yang kontras yaitu pesimistik dan optimistik menurut Arif (2000) merupakan dunia kapitalisme modern. Demikian pula, *developmentalisme* sebagai determinasi kapitalisme yang meletakkan pembangunan ekonomi (infrastruktur fisik) masih digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dari negara-negara dunia ketiga.

Pertumbuhan ekonomi dengan dampak negatifnya sebagai strategi Orde Baru yang ternyata pada tahun 1997 mengalami titik balik yang mengenaskan, perlu dikoreksi dan didekonstruksi dengan paradigma pemerataan. *Civilization willing* dan simbolisasi zaman harus tetap diletakkan bergandengan dengan kepentingan publik. Arif (2000) sebagai seorang penulis anti *developmentalisme* pada akhirnya menyerah pada kekuatan kapitalisme, sehingga ia berkesimpulan dan menyarankan agar Indonesia tetap dibiarkan memeluk kapitalisme, tetapi bukan kapitalisme yang eksploitatif. Hal ini menunjukkan kontradiksi dari pemikiran Arif. Di satu sisi, ia menggambarkan keburukan kapitalisme terutama dampaknya bagi pembangunan ekonomi Orde Baru, tetapi di sisi lain, ia menyerah pada keunggulan kapitalisme. Pemikiran Arif yang dikristalisasikan dalam disertasinya berjudul "Menolak Developmentalisme", dinodai oleh kalimat-kalimat terakhir dari karyanya, yang intinya menyerahkan masa depan Indonesia kepada kapitalisme modern atau global, meskipun di penghujung kalimat ia mengingatkan perlunya memeluk kapitalisme tetapi kapitalisme yang tidak eksploitatif. Mungkinkah ?

Kapitalisme dengan bentuk barunya neoliberalisme dan ditambah dengan menguatnya paradigma pembangunanisme (*developmentalisme*) di negara-negara

dunia ketiga dalam realitasnya tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia ketiga tetrsebut. Alih-alih ingin memperoleh kemajuan, terutama kesejahteraan yang berkelanjutan (*sustainability welfare*), tidak terjadi, justru yang muncul dan diderita masyarakat dunia ketiga atau sedang berkembang adalah ketimpangan, kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Industrialisasi yang dimaknai sebagai substitusi impor menghasilkan pembangunan yang asing bagi masyarakat dunia ketiga. Naipaul, mantan menteri negara Karibia, mengejek industrialisasi sebagai proses pengisian tabung-tabung dan kaleng-kaleng impor dengan berbagai bahan yang diimpor pula (Gilbert dan Josef Gugler, 1996:47).

Pada tahap awal industrialisasi, dapat disaksikan pembangunan perusahaan-perusahaan yang secara langsung berproduksi untuk pasar konsumsi. Perusahaan tekstil, pakaian, dan makanan, diikuti oleh perusahaan elektronik, plastik, dan mesin ringan menciptakan alat pembersih, almari es, dan beberapa produk konsumsi lainnya. Kebanyakan produk ini difokuskan pada masyarakat berpendapatan tinggi yang hidup di kota-kota besar. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berorientasi pasar cenderung berkonsentrasi di kota-kota besar.

Pembangunan gedung-gedung modern berdampak merugikan industri manufaktur dan kerajinan tangan yang telah ada. Perusahaan-perusahaan kecil menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, dan aktivitas kerajinan tangan lokal gagal berkompetisi dengan aktivitas gedung-gedung baru tersebut. Akibat dari perkembangan ini adalah terabaikannya dinamisme industri padat karya di kota-kota kecil (Gilbert dan Josef Gugler, 1996:48). Dampak yang lebih parah adalah surplus ekonomi pedesaan berpindah ke kota. Demikian pula, surplus ekonomi kota-kota kecil berpindah ke kota-kota besar.

Sedotan surplus ekonomi pedesaan oleh kota menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang kemudian bermigrasi ke kota. Mayoritas penduduk berpindah karena alasan ekonomi (Gilbert dan Josef Gugler, 1996:60). Pertimbangan bermigrasi ke kota karena kota memiliki prospek ekonomi yang lebih baik ketimbang desa. Cerita sukses (*succes story*) yang dibawa oleh para urban ke desa ketika mereka pulang, menyebabkan lebih banyak lagi penduduk desa yang berbondong-bondong mengikuti ayah, ibu, paman, saudara, tetangga, atau teman pergi ke kota, dengan tujuan utama memperbaiki nasib.

Kota-kota besar yang pada awalnya mampu menampung migrasi penduduk desa, lambat laun karena migrasi besar-besaran tak terkendali, seperti yang dialami

kota-kota besar di Indonesia, menyebabkan kota tidak mampu lagi menampung para urban. Kisah sukses seperti yang dibawa oleh para urban sukses, ternyata hanya mimpi, bagai oase di terik panas padang pasir. Pandangan yang menyedihkan dan tersebarnya kemiskinan di kota, dengan mudah membawa asumsi bahwa para migran tidak memahami apa yang akan diharapkan, sehingga ilusi tentang prospek ekonomi membawa mereka ke lingkungan perkotaan yang akhirnya menjerat mereka ke dalam kemiskinan (Gilbert dan Josef Gugler, 1996:64).

Tiadanya keterampilan dan pendidikan pas-pasan (bahkan banyak di antaranya yang *drop-out*), menyebabkan para migran harus mengais rezeki dari sektor informal, sebuah sektor yang memberi kemudahan kepada mereka untuk masuk di dalamnya karena tidak mewajibkan mereka harus berpendidikan minimal sarjana atau memiliki keterampilan tertentu yang dipersyaratkan. Sektor informal ini tampaknya memberikan obat manjur terhadap masalah pekerjaan di perkotaan dan pada saat yang sama menyediakan wadah untuk menumbuhkan bakat para pengusaha lokal (Gilbert dan Josef Gugler, 1996:97).

Ekonomi maju yang tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian menempatkan aktivitas sektor ekonomi informal sebagai pelengkap bahkan menjadi subtitusi sektor pertanian dalam perekonomian perkotaan di negara-negara

berkembang. Sebagaimana dikatakan Williams and Jan Windebank (1998:29) bahwa dalam ekonomi maju terdapat pertumbuhan aktivitas ekonomi informal. Sektor informal ini merupakan bentuk baru dari eksploitasi kapitalisme maju atau tanggapan terhadap *over-regulation* oleh pasar. Williams and Jan Windebank (1998) menegaskan pula bahwa ekonomi maju telah jatuh dalam krisis ekonomi dan proyek deregulasi dari ekonomi neo-liberal telah menghasilkan sektor ekonomi informal.

D. Kritik terhadap Pembangunanisme (Developmentalisme)

Neoliberalisme dan developmentalisme merupakan bentuk baru dari kapitalisme. Upaya ilmiah yang dilakukan negara-negara maju agar mereka dapat mengontrol dan mendominasi negara-negara sedang berkembang adalah dengan menerapkan konsep *developmentalisme*. Negara-negara sedang berkembang harus menerapkan konsep *developmentalisme* semata-mata untuk melanggengkan relasi ketergantungan negara-negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju.

Berdasarkan pada ideologi pembangunanisme (*developmentalisme*), pembangunan merupakan proses perubahan yang menjamin adanya konsolidasi sistem dan terbukanya peluang baru, sehingga pembangunan bisa menjadi jalan untuk mencapai masyarakat yang beradab

dan sejahtera (Santoso Kristeva, 2015). Pembangunan juga dipahami sebagai proses perubahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat manusia (Schrijvers, 2000). Pembangunan sebagai sebuah perubahan hanyalah omong kosong, sebab paradigma pembangunan yang dominan merupakan kelanjutan sejarah penjajahan selama 500 tahun yang berakar dalam keyakinan tentang keunggulan orang Barat, pengetahuan dan teknologi Barat, dan peradaban Barat secara keseluruhan (Schrijvers, 2000). Melalui penggunaan ancaman atau kekerasan, keunggulan tersebut dapat dicapai.

Pembangunan ekonomi yang salah satu sasarannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam realitasnya tidak menghasilkan pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan justru dinikmati oleh kapitalis dan elit politik yang berkuasa. Sementara itu, masyarakat kebanyakan hanya memperoleh sisanya berupa tetesan ke bawah yang tidak seberapa jumlahnya.

Paradigma *redistribution with growth*, yang rekomendasinya adalah negara-negara kaya mentransfer 2% dari GNP-nya kepada negara-negara miskin (Santoso Kristeva, 2015), tetapi kebijakan tersebut tidak gratis. Mereka tetap menghendaki adanya imbalan, bisa berupa bunga dari pinjaman yang diberikan, kemudahan dalam berinvestasi, atau fasilitas memperoleh tenaga kerja yang

murah, yang semuanya itu adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal atau dalam bahasa kapitalis adalah surplus laba.

Paradigma pembangunan yang dipaksakan oleh negara-negara maju dalam pandangan Paulo Freire akan menumbuhkan sistem politik opresif yang cenderung mendegradasikan hakikat manusia dan mendehumanisasikan manusia (Santoso Kristeva, 2015). Hal ini berdampak buruk pada (1) manusia menjadi penonton pasif, (2) manusia mengalami keterasingan kultural, (3) manusia menjadi objek masifikasi, (4) manusia mengalami assitensialisme yaitu selalu menggantungkan diri pada bantuan orang lain, (5) terjadinya budaya bisu (Santoso Kristeva, 2015).

Kritik terhadap paradigma *developmentalisme* juga dilancarkan oleh Schrijvers (2000) bahwa kerjasama pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang, dalam dua dasawarsa, bukannya menghasilkan perkembangan, tetapi menimbulkan polarisasi antara kaum miskin yang semakin banyak jumlahnya dengan lapisan atas (kaya) yang sedikit jumlahnya. Dalam pengamatan Johnson (2013), negara-negara dunia ketiga diredusir ke dalam status korban-korban tak berdaya di hadapan suatu diskursus pembangunan yang tidak terelakkan yang

terlembagakan dalam disposisi yang maha kuasa dari Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Pembangunan yang diartikan juga sebagai pertumbuhan ekonomi, karena kerakusan kapitalis dalam mengeksploitasi sumber daya alam, menyebabkan kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki dan marginalisasi terhadap golongan penduduk yang rentan. Penebangan hutan di Brazil dan juga di Indonesia meningkat berlipat-lipat ketika prioritas diberikan pada pertumbuhan industri, yang berdampak pada meningkatnya beban hutang. Padahal politik hutang tersebut menurut Susan George, merupakan upaya memperkuat relasi kuasa antara negara Utara (maju) dan negara Selatan (sedang berkembang).

Pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik yang menyediakan kemudahan bagi pembangunan ekonomi yang diharapkan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pembangunan yang berorientasi pada manusia. Seperti dikatakan Galtung bahwa pembangunan adalah membangun manusia, bukan benda. Pembangunan yang berorientasi pada manusia berarti membangun manusia itu sendiri supaya ia mampu mengembangkan potensi kreatifnya. Untuk dapat mengembangkan potensi tersebut, manusia harus hidup bahagia, sehat, aman, dan bebas dari rasa takut. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan sosial,

politik, dan budaya yang kondusif, sehat, dan dinamis (Santoso Kristeva, 2015).

E. Penutup

Developmentalisme atau pembangunanisme menjadi bagian dari alat dominasi, karena berbagai teori tersebut menjadi paradigma untuk melanggengkan dan melegitimasi ketergantungan Dunia Ketiga terhadap negara-negara maju. Kolonialisme ide atau paradigma tetap digunakan oleh negara-negara maju untuk mempertahankan bahkan memperkuat dominasi dan watak imperialismenya terhadap negara-negara dunia ketiga.

Kapitalisme melahirkan imperialisme dan kolonialisme. Berakhirnya kolonialisme, bangsa-bangsa yang dijajah selanjutnya memasuki era post kolonialisme, dalam hal mana modus dominasi dan eksploitasi tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Era inilah yang dimaksud dengan era pembangunanisme.

Beberapa teori pembangunan muncul sebagai alat analisis terhadap praktik kapitalisme, neoliberalisme, dan developmentalisme. Teori tersebut adalah teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan.

Beberapa teori tersebut menjelaskan bahwa paradigma pembangunan yang dipaksakan negara-negara

maju kepada negara-negara sedang berkembang merupakan strategi negara-negara maju agar ketergantungan negara-negara sedang berkembang kepada negara-negara maju tetap berlangsung dan negara-negara maju bisa mengontrol negara-negara sedang berkembang. Tesis yang menyatakan bahwa pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan di masyarakat yang sedang berkembang, ternyata dalam praktiknya lebih memberikan keuntungan kepada masyarakat negara-negara maju yang memaksakan paradigma pembangunan kepada masyarakat negara-negara sedang berkembang.

BAB V
SOSIALISME

Kelahiran sebuah ideologi seringkali merupakan jawaban bagi ideologi lain. Sudah menjadi kelaziman jika para ilmuwan saling berdebat mempertarungkan gagasan ideologisnya. Ideologi yang lebih tua dan mapan dipertanyakan dan diserang oleh ilmuwan dengan gagasan baru. Perdebatan dialektis itu menunjukkan proses tarik ulur panjang antara aliran pemikiran satu dengan pemikiran lain. Pertarungan gagasan terjadi terus-menerus sehingga salah satu dari ideologi yang bersengketa menjadi lebih dominan. Tetapi dalam beberapa kasus, tidak tampak betul di antara dua ideologi itu yang menang dibandingkan lainnya.

Kemunculan sosialisme sebagai ide baru dalam panggung ideologi dunia juga tidak dapat dipisahkan dengan dialektikanya dengan ideologi lain yang lebih tua, bahkan secara historis dapat dilihat bahwa sosialisme mendudukkan diri secara berhadap-hadapan dengan kapitalisme. Perbedaan orientasi ideologis membuat kedua ideologi ini menempuh perseteruan ideologis yang panjang. Filsuf-filsuf beraliran kiri berusaha menentang dan meruntuhkan kapitalisme yang pada saat itu menjadi arus utama dalam panggung ideologi dunia. Henslin (2007)

membedakan ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Perbedaan Kapitalisme dan Sosialisme

Kapitalisme	Sosialisme
1. Individu memiliki alat produksi	1. Publik memiliki alat produksi
2. Para pemilik menentukan produksi atas dasar persaingan	2. Komite Sentral merencanakan produksi, tidak ada persaingan
3. Pencarian keuntungan merupakan alasan bagi pendistribusian barang dan jasa	3. Tidak ada motif keuntungan dalam distribusi barang dan jasa

Kapitalisme telah mengubah secara radikal wajah sosial masyarakat Eropa dari wajah lamanya yang bersifat feodalistik. Dalam masyarakat kapitalis, masyarakat dibentuk dalam beberapa kelas berdasarkan penguasaannya atas alat produksi. Kondisi ini melahirkan ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat pemilik alat produksi (borjuis) dengan masyarakat pekerja (proletar). Bagi sebagian filsuf, realitas itu merupakan realitas yang buruk dan bertentangan dengan cita-cita sejati manusia. Oleh karena itu, kapitalisme harus diruntuhkan agar masyarakat

tidak adil itu bisa dibentuk lagi menjadi masyarakat tanpa kelas. Sosialisme menawarkan sebuah pendekatan sosiologis yang memungkinkan masyarakat tanpa kelas tercipta. Hal ini didasarkan pada gagasan inti dari sosialisme yang berasumsi bahwa sebuah masyarakat yang adil mensyaratkan adanya tindakan sosial yang bertujuan, atau dalam kalimat negatif, tindakan yang didasarkan pada kepentingan swasta akan menghalangi tercapainya sebuah masyarakat yang adil (Ethridge dan Handelman, 2016).

A. Sejarah Sosialisme

Sosialisme dan liberalisme memiliki akar yang sama di abad pencerahan dan berbagi keyakinan yang sama, seperti rasionalitas dan kemajuan, namun sosialisme muncul sebagai kritik terhadap masyarakat pasar bebas (Heywood, 2016).

Karakter sosialisme awal dipengaruhi oleh kondisi yang keras dan tidak manusiawi yang dialami kelas buruh industri. Upah rendah, hari kerja sering berlangsung hingga 12 jam serta ancaman kesehatan dan keselamatan pekerja sangat tinggi. Kelas pekerja juga mengalami disorientasi, karena mereka merupakan generasi pertama warga perkotaan yang tidak akrab dengan kondisi hidup dan kerja di dunia industri (Heywood, 2016). Akibatnya, para sosialis awal sering mencari alternatif radikal bahkan revolusioner untuk melawan kapitalisme industri.

Sebagai sebuah ideologi, sosialisme lahir sebagai respons ata ketimpangan sosial ekonomi yang dipicu oleh perkembangan industrialisasi di Eropa Barat, sebagai dampak dari revolusi industri pada abad 18 (Al-Jihad, 2018). Sosialisme pertama kali dikenal pada tahun 1827 untuk menyebut gagasan yang diperkenalkan Robert Owen, pemikir berkebangsaan Inggris. Owen merupakan sosialis utopis. Sebagai pemikir dan aktivis, Owen resah dengan kondisi masyarakat Inggris dan Eropa Barat pada umumnya yang tersegmentasi dengan demikian kuat dalam dua kelompok sosial, yaitu masyarakat majikan dan masyarakat buruh. Kapitalisme yang dipicu oleh Revolusi Inudstri membuat modal-modal terakumulasi di tangan para pemilik modal yang terus-menerus berusaha memperkaya diri dan kelompoknya dengan mempekerjakan buruh secara kurang adil. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat sebagai dampak kapitalisme di Inggris, Owen membentuk komunitas eksperimental yang berbasis kehidupan berbagi bersama dan bekerja sama.

Robert Owen dianggap sebagai bapak gerakan koperasi. Pemikirannya tentang sosialisme ia tuangkan dalam buku yang berjudul *A New View of Society, an Essay on the Formation of Human Character* (1813). Dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. Ia

berusaha mencari cara dengan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Dalam buku tersebut juga dipersoalkan tentang pendidikan, dimana kejahatan-kejahatan dalam masyarakat disebabkan keadaan, bukan oleh kejatuhan moral manusia sehingga pendidikan dalam suatu lingkungan yang baru akan dapat menghasilkan manusia-manusia rasional yang mempunyai kebiasaan teratur, sabar dan rajin.

Menurut Plekhanov (1957), seorang pemikir dan aktivis, Owen memiliki kedekatan dengan Dr. Charles Hall. Pada masa itu, Hall telah mengeluarkan hipotesis yang menyatakan bahwa masyarakat tidak adil tercipta karena peradaban yang salah. Pada satu sisi ada masyarakat yang terus menikmati pertambahan kekayaan namun pada sisi lain ada kelas masyarakat yang justru semakin miskin. Hipotesis Dr Hall ini menjadi sangat penting bagi pemikir sosialis berikutnya karena menawarkan kesadaran baru bahwa masyarakat kaya dan miskin selalu berbeda kepentingan sehingga selalu mengalami pertentangan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan Hall sebagai orang miskin adalah para pekerja yang menjual tenaga mereka. Yang dimaksud Hall dengan orang kaya adalah kelompok feodal dan industrial yang menumpuk kekayaan dengan mengeksploitasi orang miskin.

Dalam salah satu bab bukunya, Hall menjelaskan perbedaan kepentingan antara masyarakat kaya dan miskin

yang menempatkan mereka dalam pertentangan (Plekhanov, 1957). Orang kaya dipandangnya selalu ingin memperoleh sebanyak mungkin dari orang miskin dan berusaha memberikan sesedikit mungkin kepada mereka. Pergulatan itu berjalan terus-menerus. Namun di sisi lain, para pekerja adalah kelompok dengan sumber daya minimal. Akibatnya, ketika mengalami pertentangan dengan orang kaya, pekerja selalu dalam kondisi asor (lemah).

Gagasan itulah yang turut menginspirasi dan membentuk ideologi Robert Owen. Ia sebenarnya berasal dari keluarga pebisnis di Wales. Ayahnya memiliki bisnis kecil sebagai kuda tunggangan dan penjual besi. Ibu Owen datang dari salah satu keluarga petani makmur. Owen menerima hampir semua pendidikan sekolahnya yang berakhir pada usia sepuluh. Kontribusi utama Owen ke pikiran kaum sosialis adalah pandangan yang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia itu mempunyai kemauan bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang mereka inginkan. Owen berpendapat bahwa watak manusia itu dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, masyarakat sebuah negeri atau bahkan dunia dapat diberkati dengan watak tertentu dengan menciptakan lingkungan sosial tertentu.

Keyakinan ideologis itulah yang membuat Owen, ketika mewarisi bisnis ayahnya, segera melakukan berbagai perbaikan. Ia antara lain segera mengurangi jam kerja bagi para pekerjanya menjadi 10,5 jam saja. Ketika pabrik yang dikelolanya macet akibat kekurangan bahan baku, ia tidak memecat para pekerjanya sebagaimana dilakukan oleh pabrik lainnya pada masa itu. Meskipun pabrik yang dikelolanya tidak beroperasi, Owen tetap membayar para pekerjanya selama berbulan-bulan. Hal ini tidak akan terjadi dalam sistem kapitalisme.

Perbaikan yang dilakukan Owen, menurut Plekhanov (1959) telah membuat moral para pekerja bangkit karena merasa harkat kemanusiaannya dihargai. Kondisi moral pekerja itu membuat produktivitas mereka meningkat sehingga pabrik New Lanmark yang dimiliki Owen memiliki penghasilan yang meningkat. Plekhanov (1959) membuat analogi menarik untuk menunjukkan kondisi itu dengan menyebut, "serigala berusaha menjaga kawanan domba, namun para domba berusaha agar serigala yang menjaganya tidak sampai mati kelaparan." Praktik bisnis yang diperagakan Owen ini memberi jalan baru bahwa kepentingan pebisnis dan pekerja dapat disatukan dalam sebuah mekanisme kerja sama tertentu.

Eksperimen sosial Owen membuat namanya termasyhur sehingga mendapat pujian dari banyak orang,

termasuk orang-orang berpangkat tinggi di Inggris saat itu. Namun, meskipun pekerjanya tampak dalam kondisi lumayan, Owen menjelaskan bahwa hal itu belumlah cukup. Dalam mekanisme kerja yang dilakukannya pada saat itu, menurutnya, para pekerja tetaplah budak-budak dan dia sendiri sebagai pemilik pabrik adalah tuan. Perasaan tidak puas itulah yang mendorong Owen untuk melakukan eksperimen-eksperimen sosial lain yang lebih ekstrem. Serangkaian eksperimen ini, oleh Plekhanov, telah membuat orang-orang terhormat di Inggris merasa ngeri.

Pemikiran-pemikiran Owen yang dipengaruhi Goldwin dan Hall mendorongnya mendesak parlemen melakukan sebuah reformasi undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat kaum pekerja. Salah satu tuntutannya adalah agar parlemen membatasi jam kerja bagi para buruh maksimal 10,5 jam saja. Ia juga meminta agar regulasi melarang pabrik mempekerjakan anak berumur di bawah 10 tahun atau anak buta huruf walaupun telah berusia di atas 10 tahun.

Selain menuntut diberlakukannya undang-undang pabrik, Owen juga menuntut agar parlemen merevisi undang-undang kemiskinan. Salah satu tujuannya adalah memberikan masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan untuk dilibatkan dalam kegiatan agrikultur dan industri. Ia percaya bahwa masyarakat desa seperti itu akan mudah menjadi makmur dan lebih lanjut ia mengusulkan

agar desa-desa terhubung serta bekerja sama membentuk sebuah organisasi yang lebih kompleks. Meskipun usaha itu tidak mendapat respons memuaskan dari penguasa, Owen terus melanjutkan eksperimen sosialnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara bersama-sama.

Perjuangan Owen di Inggris mendapat respons dari teman-teman perjuangannya di Perancis dan Jerman. Di Perancis ada tokoh-tokoh seperti François-Noël Babeuf yang dikenal karena agitasi dan tulisannya yang membela masyarakat miskin Perancis. Surat kabarnya, *Le tribun du Peuple* (Tribun Rakyat) paling dikenal karena isinya yang membela kaum miskin dan menuntut pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Perancis. Dia adalah pembela utama demokrasi, penghapusan properti pribadi dan kesamaan hasil. Dia marah terhadap otoritas penguasa yang mengawasi dengan keras musuh-musuh radikalnya. Meskipun dengan usaha teman-teman Jacobinnya yang menolong Babeuf, dia dieksekusi atas perannya dalam Konspirasi Persamaan.

Di Perancis juga ada tokoh sosialis lain bernama Joseph Proudhon. Meskipun sama-sama beraliran sosialis, tetapi pemikiran Proudhon berbeda dengan sosialisme utopis yang dikembangkan Owen di Inggris. Proudhon lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat praktis. Proudhon berpendapat bahwa manusia dalam hakikatnya terlahir

sebagai individu yang bebas dan mempunyai hak-hak asasi tertentu. Dalam interaksinya dengan individu yang lain, individu-individu ini membentuk suatu masyarakat yang "alami" yang juga mempunyai hak-hak asasi dalam dirinya. Hak-hak inilah yang kemudian diperkosa oleh sistem ekonomi kapitalisme yang dikuasai oleh para pemilik modal.

Gambone (2004) mengatakan bahwa Proudhon adalah seorang pemikir yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar terhadap perkembangan anarkisme, seorang penulis yang betul-betul berbakat dan 'serba tahu' dan merupakan tokoh yang dapat dibanggakan oleh sosialisme modern. Proudhon sangat menekuni kehidupan intelektual dan sosial di zamannya, dan kritik-kritik sosialnya didasari oleh pengalaman hidupnya itu. Di antara pemikir-pemikir sosialis di zamannya, dialah yang paling mampu mengerti sebab-sebab penyakit sosial dan juga merupakan seseorang yang mempunyai visi yang sangat luas. Dia mempunyai keyakinan bahwa sebuah evolusi dalam kehidupan intelektual dan sosial menuju ke tingkat yang lebih tinggi harus tidak dibatasi dengan rumus-rumus abstrak.

Berikutnya adalah Louis-Auguste Blanqui, seorang revolusioner yang hendak mencapai sosialisme melalui pemberontakan buruh. Peranan historis Blanqui bukan pemikiran teoretisnya, tetapi pada upayanya menyadarkan gerakan sosialis bahwa revolusi hanya dapat berhasil

apabila ditunjang oleh sebuah organisasi revolusioner. Ia menyempurnakan teknik konspirasi. Dalam lingkungan Marxisme, Blanquisme dipahami sebagai kebijakan yang ingin memenangkan sosialisme melalui pemberontakan bersenjata kelompok-kelompok kecil sebelum mayoritas rakyat berkembang menjadi proletariat industri. Menurut Blanqui, kelompok-kelompok kecil ini dapat mencapai sosialisme dengan lebih Louis Blanc mengambil posisi terbalik dari Blanqui. Ia menolak jalan kekerasan dan mengharapkan pencapaian sosialisme perekonomian oleh negara.

Pekerjaan perlu diorganisasikan kembali agar nasib buruk buruh dalam kapitalisme purba dapat diatasi. Kelompok borjuasi harus bekerja sama dengan kelas buruh. Negara harus mengorganisasikan produksi dan lama kelamaan menghapus persaingan tanpa batas. Blanc mencoba menghubungkan sosialisme dengan ilmu ekonomi dan karena itu pantas disebut memperjuangkan sosialisme ilmiah. Sementara itu, Proudhon berpikir praktis dan menyadari bahwa reformasi masyarakat harus mendasarkan diri pada ilmu ekonomi. Ia menolak komunisme dan sosialisme negara. Ia menulis program masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis terdiri atas para pemilik kecil dan dibiayai melalui “bank-bank rakyat.”

Sementara itu, di Jerman lahir pula sejumlah pemikir sosialis seperti Ludwig Feurbach. Plekhanov (1959) menyebut bahwa pengaruh pemikiran Feurbach relatif lebih besar bagi perkembangan sosialisme di negara itu dibandingkan pengaruh yang diterima dari sosialisme Perancis. Feuerbach (1804-1872) dianggap sebagai jembatan penting yang menhubungkan antara Hegel dan Marx, terutama kritiknya terhadap Hegel mengenai penekanan Hegel pada kesadaran dan semangat masyarakat. Ia menegaskan perlu meninggalkan idealisme subjektif Hegel untuk kemudian memusatkan perhatian bukan pada gagasan, tapi pada realitas material kehidupan manusia. Menurut Feuerbach, Tuhan adalah esensi kehidupan dari manusia yang mereka proyeksikan menjadi sebuah kekuatan impersonal.

Tokoh Jerman lain yang mempunyai peran dalam membangun pemikiran sosialis di Jerman adalah Wilhelm Weitling. Sebagai aktivis dan pemikir, gagasan sosialisnya lebih menggedor karena Weitling menentang kerja teori dan propaganda yang sabar. Menurutnya, rakyat sudah cukup tertindas dan siap melawan. Yang dibutuhkan bukanlah teori dan propaganda mengenai hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan penderitaan rakyat, tetapi slogan-slogan agitasi yang sederhana, aksi-aksi langsung, dan keberanian tentunya.

Pandangan inilah yang kerap mempertemukan Weitling dan Marx dalam perdebatan yang seru dan tegang. Weitling berorientasi pada aksi. Adapun Marx berpendapat bahwa untuk bisa menumbangkan kapitalisme dibutuhkan sebuah batalion massa buruh yang diperlengkapi dengan senjata ideologi yang lengkap, yang tidak bisa tidak harus dibangun dengan kerja propaganda yang sabar. Marx berpendapat bahwa massa buruh harus dididik dan dilatih untuk memiliki cara pandang dunia yang luas, yang tidak hanya berurusan dengan isi perut mereka saja, tetapi menyentuh semua aspek kehidupan: seni, sastra, sains, kebudayaan, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya (Sprague, 2015).

Untuk memahami perkembangan sosialisme Jerman, tentu saja nama lain yang tidak dapat ditiinggalkan adalah dua pemikir sosialis yaitu Karl Marx dan Frederich Engel. Baik Marx, Engel, maupun Weitling berada pada satu lingkar intelektual. Meskipun sama-sama mengusung sosialisme, namun Marx dan Weitling cenderung berbeda pandangan. Itulah yang membuatnya kerap terlibat dalam perdebatan. Selain melalui panggung-panggung konferensi dan perdebatan, Marx mendudukkan diri sebagai aktivis dan pemikir yang berpengaruh melalui karya-karyanya seperti *Manifest der Kommunistischen Partei, Achtzehnte Brumaire, Das Kapital,* dan *Rozaan Kasyep.*

Menurut Marx, sistem kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang buruk dan tidak manusiawi (Adhidarma, 2010). Di dalamnya telah diberlakukan dan dilegalkan penindasan dan perbudakan yang sebesar-besarnya terhadap para buruh. Marx kemudian menyerukan persatuan kepada kaum buruh sedunia untuk melawan kapitalisme. Secara struktural, sistem ekonomi Marx berdasar pada kapital yang terdiri dari komoditi dan uang. Marx mengungkapkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik dan pertentangan kelas yakni kelas borjuis dan kelas proletar (Rejai, 1991). Kelas borjuis adalah pihak yang menguasai alat-alat produksi sementara kelas proletar adalah pihak yang dieksploitasi tenaganya dalam proses produksi. Argumen yang ditunjukkan Marx untuk menguatkan teorinya tentang konsep kelas ditunjukkan dengan kritik Marx terhadap konsep dan tujuan pasar. Bagi Marx, perekonomian pasar, yang merupakan corak utama sistem kapitalisme liberal, bukanlah mekanisme untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dari individu-individu di dalamnya, melainkan sebuah sarana untuk memfasilitasi para kapitalis untuk merampas (*appropiation*) nilai surplus dan mengakumulasi kapital (Rejai, 1991).

Penindasan kelas borjuis terhadap proletar, menurut Marx, hanya bisa diakhiri melalui revolusi total. Dalam revolusi jenis ini, buruh dan pekerja bersatu untuk merebut

sumber-sumber produksi dari tangan para borjuis. Buruh kemudian membuat semacam pemerintahan sementara yang mengatur distribusi sumber-sumber kekayaan kepada rakyat. Gagasan Marx dan Engel inilah yang berkembang dan kemudian melahirkan komunisme. Gagasan ini menjadi ideologi yang kuat terutama karena tidak lama setelah kelahirannya terjadi Revolusi Oktober di Rusia. Revolusi itu melahirkan sebuah rezim baru yang bertahan relatif cukup lama, yaitu Uni Soviet.

Tokoh lain yang sangat fenomenal dalam menterjemahkan pemikiran Marx adalah Lenin. Lenin menganggap marxisme sebagai suatu ilmu, namun ia juga menerima bahwa ideologi adalah kata yang tidak dapat dibatasi pada masyarakat kapitalis maupun prakapitalis. Lenin percaya bahwa ideologi sosialis bisa membangkitkan kesadaran kelas buruh melampaui *ekonomisme* (Eatwell, 2004). Lenin juga yakin bahwa ideologi sosialisme penting untuk mencegah kelas buruh jatuh dalam kesadaran serikat buruh. Serikat buruh ada dalam lingkaran sistem kapitalis. Upah dan kondisi buruh yang dituntut oleh serikat buruh dalam jangka pendek dapat dicapai dalam kapitalisme yang sehat.

Pada akhir abad 19, karakter sosialisme mulai berubah lantaran adanya perbaikan bertahap kondisi hidup kelas pekerja dan berkembangnya demokrasi politik (Heywood,

2016). Tumbuhnya serikat-serikat pekerja, partai politik kelas pekerja, olahraga, dan klub-klub sosial berfungsi untuk menyediakan keamana ekonomi yang lebih besar dan mengintegrasikan kelas pekerja ke masyarakat industri. Dengan semakin majunya masyarakat industri di Eropa Barat, menjadi semakin sulit untuk memposisikan kelas pekerja sebagai kekuatan revolusioner (Heywood, 2016).

Pada abad 20 merupakan awal penyebaran ide-ide sosialis ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Sosialisme di negera-negara di kawasan tersebut bercampur baur dengan perjuangan antikolonial untuk merdeka. Sosialisme tidak dibangun dari perjuangan kelas, tetapi dari perjuangan bangsa keluar dari cengkeraman kolonialis. Sosialisme melebur dalam nasionalisme. Bentuk-bentuk sosialisme pun tidak lagi murni seperti yang dibayangkan Marx sebagai bentuk perjuangan kelas. Di India, dipraktikkan sosialisme moderat. Di Arab dan beberapa negara Afrika dipraktikkan sosialisme yang memadukan nilai-nilai tradisional kesukuan dan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Di tempat lain, seperti di Kuba dan Nikaragua, perjuangan sosialis dilakukan dengan melakukan pemberontakan terhadap penguasa diktator.

Akhir abad 20 sosialisme mengalami banyak kemunduran, sehingga muncul istilah “matinya sosialisme”. Yang paling dramatis adalah runtuhnya komunisme di

negara-negara Eropa Timur pada tahun 1989-1991. Uni Soviet runtuh berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Yugoslavia porak poranda. Cekoslovakia terpecah menjadi dua. Itu bukti sosialisme dan komunisme tidak berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera, sebuah masyarakat komunis masyarakat tanpa kelas yang didambakan Marx.

B. Sosialisme sebagai Praktik Sosial-Ekonomi

Sosialisme ditafsir ulang oleh berbagai pemikir di berbagai negara. Tafsiran terhadapnya tidaklah tunggal. Ada berbagai definisi yang disodorkan ahli untuk mendudukkannya. Dalam ilmu sosial, hal ini lumrah terjadi, karena ideologi merupakan sesuatu yang cair dan bahkan kontekstual. Sebuah ideologi bisa jadi merupakan entitas yang "terus menjadi" karena mengikuti perkembangan masyarakat. Berikut beberapa tafsir terhadap sosialisme yang dapat digunakan untuk memahaminya dengan cara relatif lebih baik.

Sosialisme sebagai sebuah ideologi dibentuk oleh oposisinya terhadap kapitalisme dan upayanya untuk menyediakan alternatif yang lebih manusiawi yang secara sosial bernilai (Heywood, 2016). Sosialisme adalah sebuah sistem sosio-ekonomi dengan ciri kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi serta pengelolaan bersama atas bidang ekonomi (Al-Jihad, 2018). Sosialisme merupakan

sistem ekonomi dan politik yang menekankan pada keadilan sosial yang diselenggarakan oleh negara (Wilczynski, 1981). Sosialisme merupakan penghilangan setiap usaha pribadi, kepemilikan pribadi, atas sarana-sarana produksi dan penciptaan sistem ekonomi terencana yang di dalam pewiraswasta yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan digantikan oleh badan perencana pusat (Hayek, 2011). Dalam pengertian sempit, sosialisme dipahami sebagai *labourisme*, yaitu sebuah kendaraan untuk memajukan kepentingan para pekerja atau buruh terorganisasi (Heywood, 2016).

Sosialisme memiliki sejumlah prinsip pokok yang membedakan dengan ideologi lainnya. Karl Marx menyebutkan 3 prinsip pokok sosialisme, yaitu (1) kesamaan, (2) komunalisme, dan (3) kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan (Rejai, 1991).

Nilai utama dari sosialisme adalah kesamaan. Hal ini berbeda dengan nilai utama dari kapitalisme yaitu kebebasan. Kutub tersebut tidak absolut. Dalam realitasnya, sosialisme juga mengizinkan adanya kebebasan, seperti halnya kapitalisme mengakui pula prinsip kesamaan. Dalam kebijakan sosial, prinsip kesamaan ekonomi relatif bermakna bahwa setiap individu dalam masyarakat

seharusnya menikmati level minimal dari kesejahteraan dan harus ada jaminan bahwa orang muda atau pun tua, laki-laki maupun wanita tidak mati karena malnutrisi, kelaparan, kedinginan, dan penyakit.

Prinsip kedua dari sosialisme adalah komunalisme. Hal ini membawa implikasi bahwa sosialisme menekankan pada kesejahteraan komunitas sebagai keseluruhan dan kerjasama anggota-anggota individual dalam pencapaian tujuan komunal. Jika kapitalisme menekankan pada kepentingan individu melalui cara kompetisi, sedangkan sosialisme menekankan kepentingan komunal melalui cara kerjasama. Sosialisme memiliki cara pandang organik tentang komunitas di mana keseluruhan lebih besar daripada sekadar penjumlahan dari anggota-anggota individual; sedangkan kapitalisme mempunyai cara pandang mekanik di mana keseluruhan merupakan penjumlahan dari bagian-bagian individu. Apa yang baik bagi General Motor baik pula bagi negara, sebagaimana didengungkan kapitalis Amerika tidaklah benar, karena perusahaan otomotif tersebut berusaha menarik keuntungan dan surplus sebesar-besarnya dan menekan pekerja untuk memperoleh upah sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Kesejahteraan nasional tidak otomatis dinikmati seluruh warga negara. Hanya mereka yang memiliki modal besar

dan menang kompetisi saja yang menikmati kesejahteraan nasional.

Prinsip ketiga dari sosialisme adalah kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan. Kepentingan komunitas sebagai keseluruhan hanya dapat dijamin melalui kontrol komunitas terhadap kesejahteraan bersama. Namun dalam realitasnya, pemerintahan sosialis juga memodifikasi prinsip kepemilikan publik dan kontrol terhadap sumber kesejahteraan nasional. Pemerintahan sosialis dalam praktiknya telah bergerak dari ide kepemilikan publik ke kepemilikan privat. Hal ini sebagaimana diperlihatkan kebijakan pemerintah China dan Vietnam. Dua negara ini bersistem komunis, tetapi dalam kebijakan ekonomi memperbolehkan individu untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang menjadi modal bagi kepemilikan individual.

Logika dasar ideologi sosialisme dapat dinarasikan dalam enam tahap berikut. Pertama, sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip kepemilikan oleh kelas kapitalis yang menyebabkan penindasan terhadap kelas pekerja. Kedua, sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan menyebabkan antagonisme antara kelas kapitalis yang tidak bekerja tetapi

memiliki kendali penuh atas hasil produksi dengan buruh yang menghasilkan tetapi tidak memiliki hasil produksi sesuai dengan beban kerjanya. Ketiga, antagonisme antara kapitalis dengan kelas pekerja hanya bisa dihapuskan dengan konversi kepemilikan alat produksi menjadi milik bersama yang distribusinya dikontrol oleh seluruh masyarakat. Keempat, seperti dalam urutan evolusi sosial, kelas pekerja adalah kelas terakhir untuk mencapai kebebasannya, emansipasi kelas pekerja akan melibatkan emansipasi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras atau jenis kelamin. Kelima, emanispasi harus mewujudkan suatu masyarakat yang bekerja dan mempekerjakan diri sendiri. Keenam, pemerintahan, termasuk angkatan bersenjata bangsa, selama ini hanya ada untuk melestarikan monopoli kelas kapitalis kekayaan yang diambil dari pekerja sehingga kelas pekerja harus mengatur secara sadar dan politis untuk menaklukkan kekuasaan pemerintah, nasional dan lokal agar kekuasaan dapat dikonversi dari instrumen penindasan menjadi agen emansipasi dan penggulingan hak istimewa aristokratik dan plutokratik (Buick, 1973)

Berdasarkan enam prinsip dasar itu, sosialisme sebagai sebuah ideologi ekonomi dikonkretkan dalam enam ciri utama, yaitu adanya perencanaan, distribusi pendapatan, perusahaan negara, pembatasan persaingan, adanya insentif, dan disiplin politik.

Di Indonesia, sejumlah pejuang kemerdekaan juga mempelajari sosialisme dan menjadikannya sebagai ideologi perjuangan. Sutan Syahrir menyebut sosialisme sebagai suatu ajaran dan gerakan untuk mencari keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sukarno menyatakan bahwa sosialisme bukan saja merupakan suatu sistem masyarakat, sosialisme juga suatu tuntutan perjuangan, yakni kemakmuran bersama. Salah satu tokoh Syarikat Islam (SI) H.O.S. Tjokroaminoto juga dikenal sebagai salah satu pejuang yang gigih memperjuangkan sosialisme, terutama karena prinsip-prinsipnya relevan dengan pandangan Islam.

Sosialisme sebagai ideologi besar meyakini bahwa kemakmuran dapat dinikmati bersama-sama melalui pengaturan yang sesuai. Pengaturan mempersyaratkan perencanaan. Dalam sosialisme, perencanaan ekonomi ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian akibat persaingan bebas tidak terkendali. Sistem kompetitif yang tidak pasti dinilai dapat menimbulkan keborosan. Sebagai gantinya, sosialisme menganjurkan kerja sama, agar sumber daya dapat digunakan secara lebih bermanfaat. Persaingan atau kompetisi sebagai moral digantikan oleh moralitas baru berupa kerja sama (kooperasi).

Dalam perencanaan yang bersifat sosialis, kepentingan orang banyak (umum) mendapatkan prioritas tinggi dibandingkan kepentingan individu. Sebuah perencanaan

yang terpusat diperlukan agar sumber daya yang ada dapat diatur dan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan umum merupakan kata kunci yang sangat penting karena sosialisme merupakan ideologi antitesis atas kapitalisme yang mengesahkan dominasi kelas borjuis yang jumlahnya kecil namun berkuasa secara dominan.

Karakteristik masyarakat sosialis-komunis yang menonjol adalah rasa kebersamaan dalam hal mana harta dan alat-alat produksi menjadi milik semua orang, yang bisa didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini sesuai dengan motto mereka: *from each according to his abilities, to each according to his needs*. Dengan cara ini, diharapkan keburukan dari sifat-sifat harta kekayaan dapat dihilangkan dan manfaat peradaban dapat dipertahankan untuk kemajuan bersama. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sehingga hak milik perseorangan tidak diakui, yang ada hanya kekayaan sosial atau kekayaan bersama. Dalam sistem sosialis-komunisme yang dipentingkan adalah unsur kooperatif, bukan motif laba atau kepentingan pribadi.

Dalam sistem ekonomi sosialisme, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dimiliki oleh negara. Sisanya menjadi milik

individu dan diusahakan secara perseorangan melalui badan-badan usaha yang ada. Insentif bersifat sangat terbatas dan tidak bebas seperti di negara-negara kapitalisme. Aktivitas produksi bermotifkan faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Sementara, mekanisme berlakunya harga komoditi banyak dipengaruhi oleh aturan pemerintah dan sedikit sekali pengaruh berlakunya hukum permintaan dan penawaran.

Sistem sosialis-komunis mempunyai kebaikan-kebaikan, di samping juga memiliki berbagai kelemahan. Kelebihan yang paling menonjol dari sistem sosialis-komunis adalah perhatiannya yang intens terhadap nasib kaum lemah. Untuk mewujudkan kepentingingan umum, sosialisme memandang diperlukan distribusi pendapatan. Kepemilikan alat-alat produksi membuat negara dapat mendistribusikan kekayaan yang dimilikinya secara lebih merata kepada semua orang. Di sini hubungan antara nilai kerja dan pendapatan bukanlah hubungan yang hakiki. Bunga, laba, dan hasil sewa diberikan kepada negara untuk dikelola dan distribusikan kembali kepada rakyat.

Kapitalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi-bahkan, walaupun hak individu ini dalam keadaan bertentangan dengan hak sosial sekalipun. Dalam kapitalisme individu berada di atas masyarakat. Sebaliknya,

dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak kepemilikan individu. Dalam sosialisme sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas individu (Pangiuk, 2011).

Negara mendirikan perusahaan negara yang secara sah dalam mengelola kekayaan bersama. Kehadiran perusahaan negara diperlukan agar negara memiliki instrumen yang memungkinkan rakyat dapat mengelola dan mengambil manfaat atas sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan negara berkedudukan sebagai alat yang digunakan bukan untuk mencari keuntungan dengan berdagang dengan rakyat, tetapi menjamin distribusi kekayaan negara dapat dilakukan dengan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktik sosialisme dalam mendistribusikan kekayaan rakyat.

C. Kritik terhadap Sosialisme

Pasca ambruknya negara-negara sosialis komunis di Eropa Timur, sosialisme melakukan penyesuaian dengan kondisi, tuntutan, dan perubahan masyarakat; tetapi

sebelum itu, dalam sosialisme awal yang dalam aktivitas politik dan ekonomi dikoordinasi oleh partai komunis, sosialime tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat. Dalam praktiknya, penggunaan otoritas negara dalam sosialisme seringkali juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan non ekonomi, seperti politik oleh pemerintah yang berkuasa (Pangiuk, 2011). Pengutamaan hak-hak sosial dengan mengabaikan hak-hak individu memang berpotensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan dan cenderung mengabaikan efisiensi ekonomi.

Walter Lippman sebagaimana dikutip Hayek (2011) mengemukakan bahwa sosialis yang berjanji mewujudkan kehidupan yang lebih berlimpah, tetapi nyatanya terjadi pengarahan secara terorganisasi, keanekaragman tujuan diganti keseragaman.

Menurut analisis Hoppe (1989), sosialisme tidak pernah kolaps, tetapi diakui bahwa sosialisme menimbulkan pemiskinan, bukan kesejahteraan. Hal ini karena sosialisme tidak mengakui kepemilikan swasta apalagi individu. Padahal terdapat keyakinan umum apabila individu diakui hak miliknya dan mereka diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha, pada gilirannya masyarakat akan sejahtera.

Sosialisme pada awalnya sangat otoritarian. Tidak dapat diragukan bahwa ide-ide sosialisme hanya dapat

dipraktikkan hanya oleh pemerintahan diktator yang kuat (Hayek, 2011). Sosialisme merupakan usaha mengakhiri suatu revolusi melalui reorganisasi yang terencana atas masyarakat berdasarkan kebijakan-kebijakan hierarkis dan pemaksaan dengan kekuatan spiritual yang menindas. Eastman, sahabat Lenin, mengkritik pemerintahan Stalin penerus Lenin di Uni Soviet, bahwa zaman Stalin, kondisi bukannya bertambah baik, tetapi lebih buruk daripada fasisme, bahkan lebih kejam, lebih bar-bar, lebih tidak adil, antidemokrasi, dan lebih tidak bermoral (Hayek, 2011). Chamberlin, seorang wartawan Amerika menyatakan bahwa sosialisme jelas telah membuktikan sedikitnya pada awalnya dirinya bukan jalan menuju kebebasan, tetapi menuju kediktatoran dan kontra-kediktatoran dan menuju perang saudara yang paling sengit (Hayek, 2011).

Sosialisme memiliki banyak kelemahan. Secara rinci terdapat beberapa kelemahan sosialisme. Pertama, kurangnya kebebasan ekonomi. Dalam ideologi ekonomi sosialisme, semua sumber daya ekonomi dikuasai dan dikendalikan oleh negara, sedangkan rakyat tidak diizinkan untuk memiliki aset produksi apa pun. Pekerja pun diberi tugas khusus dan tidak diperbolehkan untuk mengubah tugasnya tanpa ada persetujuan dari negara. Kedua, konsumen menderita. Dalam ideologi sosialisme konsumen menjadi pihak yang kalah. Kedaulatan konsumen menjadi

tidak berlaku di dalam ideologi ekonomi sosialisme, karena konsumen tidak dapat menikmati hak-haknya seperti yang terdapat dalam ideologi kapitalisme. Ketiga, hak milik perorangan dibatasi dan rakyat tidak memiliki pilihan kecuali yang telah ditentukan oleh negara. Keempat, tidak ada kebebasan politik. Dalam ideologi sosialisme, kebebasan untuk berbisnis, memilih pekerjaan dan banyak kebebasan penting yang lainnya untuk ekonomi yang makmur tidak ada. Akibatnya, semangat dari demokrasi menjadi mati. Kebutuhan dasar dari rakyat dengan ideologi sosialisme memang terpenuhi, namun pemenuhannya sendiri tidak terlepas dari tergadaikannya kebebasan berpolitik dan berekonomi. Kelima, potensi dan kreativitas individu tidak berkembang karena semua hal diatur oleh negara. Akibatnya, individu warga negara menjadi pasif tidak mau mengambil inisiatif. Keenam, tidak terjadi kompetensi ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi sepenuhnya dijalankan oleh negara. Akibatnya, tingkat kreativitas produsen menjadi rendah dan daya cipta inovasi produk juga ikut menurun, sehingga, produk cenderung monoton dan tidak berkembang dengan baik.

D. Penutup

Sosialisme adalah paham yang beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam

pengertian sempit, sosialisme dipahami sebagai *labourisme*, yaitu sebuah kendaraan untuk memajukan kepentingan para pekerja atau buruh terorganisasi. Sosialisme memiliki sejumlah prinsip pokok yang membedakan dengan ideologi lainnya. Karl Marx menyebutkan 3 prinsip pokok sosialisme, yaitu (1) kesamaan, (2) komunalisme, dan (3) kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan.

Sosialisme yang mendorong terciptanya masyarakat sosialis-komunis diharapkan dapat terwujud rasa kebersamaan sehingga harta dan alat-alat produksi dapat menjadi milik semua orang yang bisa didistribusikan untuk kepentingan bersama, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, tujuan sosialisme tersebut di negara komunis tidak terwujud.

Demikian pula, perencanaan terpusat yang dilakukan oleh sistem sosialisme dengan harapan untuk mengatur ketertiban masyarakat, sehingga akan diperoleh kemakmuran bersama ternyata tidak terbukti. Sistem sosialisme dengan perencanaan terpusat, dalam arti negara dominan mengambil alih seluruh aspek kehidupan masyarakat justru berdampak pada terjadinya keseragaman tujuan, tidak berkembangnya potensi kreativitas dan inovasi individu, tidak adanya kebebasan politik dan ekonomi,

kinerja ekonomi buruk, demokrasi tidak dapat berlangsung, dan kemakmuran masyarakat tidak tercapai.

BAB VI
MARXISME

Marxisme merupakan ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Ideologi ini muncul sebagai respons terhadap dampak dari kapitalisme muda abad 18. Marxisme merupakan ideologi yang kompleks dan rinci, sebagai cara pandang yang mencakup filsafat politik, ekonomi, dan sosial yang didasarkan pada interpretasi materialistik terhadap sejarah, kritik terhadap kapitalisme sebagai lawan yang teridentifikasi, teori perubahan sosial, pandangan yang ateistik mengenai pembebasan manusia, rencana masa depan, dan konsepsi tentang sebuah masyarakat yang adil (Kusumohamidjojo, 2015; Ethridge dan Handelman, 2016).

Berbeda dengan Hegel yang mengedepankan peran mental atau spiritual, Marx lebih memusatkan perhatian pada realitas duniawi atau material. Berangkat dari konsep tersebut, Marx yakin bahwa faktor ekonomi atau perjuangan manusia untuk menguasai alam dan memenuhi kebutuhan materi yang terus bertambah lebih nyata daripada kegiatan mental manusia (Eatwell, 2004).

Bagi Marx, semua sejarah merupakan sejarah perjuangan kelas, tetapi sejarah juga menunjukkan jatuh bangunnya sistem-sistem ekonomi di dunia. Marx lalu mengajukan model perkembangan sejarah melalui lima

tahap, yaitu metode produksi Asia, kuno, feodal, borjuis (kapitalis), dan komunis. Tahap-tahap tersebut merupakan perkembangan yang berurutan, namun Marx juga memahami bahwa negara-negara tertentu bisa saja tertinggal di belakang dan lainnya dapat melompat melampaui tahap berikutnya.

A. Sejarah Marxisme

Marxisme merupakan varian dari sosialisme, demikian pula komunisme. Ajaran marxisme berasal dari pemikiran Karl Marx. Filsafat Marx adalah filsafat materialisme yaitu filsafat yang sudah disempurnakan, yang telah mempersenjatai umat manusia, terutama kelas buruh dengan alat-alat pengetahuan yang perkasa (Lenin, 1961).

Sumber terdekat dari dialektika materialisme Marxian ditemukan dalam filsafat idealis Hegel (1770-1831). Hegel memperkaya teori dengan istilah penting yaitu alienasi yang menjelaskan interrelasi logika terhadap sejarah. Alienasi dalam skema ini bersifat dialektis, yakni ketidaklayakan salah satu bentuk kesadaran berubah menjadi kesadaran lain, lagi, dan lagi, sampai suatu sains yang layak dicapai (Sim dan Borin van Loon, 2008).

Dialektika Hegel bersifat idealis. Bagi Marx, unsur-unsur kritis dalam idealisme Hegel tidak menyentuh kenyataan konkret masyarakat (Ramin, 2017). Kesadaran kritis itu harus diarahkan kepada masyarakat yang terindas

dan terasing. Marx mengkoreksi ide Hegel dengan memberinya fondasi materialis, yakni ia mengalihkan alienasi dari akal yang merenungi dirinya sendiri ke perjuangan kelas sebagai sejarah riil kesadaran dalam gerak majunya. Filsafat harus keluar menuju dunia. Ketidaksesuaian eksistensinya dengan esensi, menyebabkan filsafat harus diuji kepraktisannya dan memalingkan hasratnya terhadap dunia yang tampak (Ramin, 2017). Realisasi filsafat materialisme bagi Marx adalah mengalahkan kapitalisme borjuis melalui perjuangan kelas buruh industri. Ide final dari Marx adalah pembentukan masyarakat komunis yang akhirnya menghapuskan kontradiksi laten dari si pemeras dan yang diperas.

Marx mengkritik sekaligus berkeinginan menghapus sistem kapitalisme yang menindas. Ideologi kapitalisme seolah memberi mimpi kepada masyarakat tentang kesejahteraan yang adil dan merata, tetapi kenyataannya tidak. Ideologi tersebut telah menyembunyikan watak aslinya, yakni keserakahan kapitalis.

Menurut Marx, keserakahan kapitalis dalam sistem kapitalisme dapat bekerja karena dua mekanisme. Pertama adalah konsumerisme. Konsumerisme diawali dari produksi yang dikerjakan oleh buruh. Buruh bekerja untuk memperoleh upah. Buruh diiming-imingi dengan tawaran produk kapitalis, seperti pangan, pakaian, rumah, dan lain-

lain. Mekanisme konsumerisme inilah yang menyebabkan buruh tetap bekerja demi kelangsungan hidupnya meskipun upah yang diterima rendah. Mekanisme kedua adalah nilai lebih. Melalui nilai lebih ini, produksi kapitalis berhasil memeras lebih banyak waktu kerja yang seharusnya dibayarnya. Kapitalisme telah mengakhiri ketidakadilan dan irasionalitas feodal, namun kapitalisme telah menggantinya dengan ketidakadilan dan irasionalitasnya sendiri (Fink, 2010). Ketidakadilan tersebut tercipta melalui hubungan industri yang asimetris yang sengaja diciptakan untuk memperkuat ketergantungan pekerja kepada majikan.

B. Pilar Marxisme

Marxisme didasarkan pada tiga pilar, yaitu interpretasi dialektika dan materialistik terhadap sejarah, kritik terhadap kapitalisme, dan revolusi proletar (Kusumohamidjojo, 2015).

Sejarah kehidupan manusia menurut Marx merupakan sejarah pertentangan antarkelas sosial. Kehidupan masyarakat bertumpu pada kapasitas produksi. Kapasitas produksi tumbuh dan memengaruhi hubungan antarmanusia dan antarkelas yang menjelma sebagai pertentangan antarkelas yang secara historis mengikuti tahap komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme.

Semua tatanan ideologi, politik, dan hukum merupakan akibat dari pola hubungan produksi yang memengaruhi kesadaran manusia yang membentuk masyarakat. Pola hubungan produksi menentukan siapa yang memiliki kesadaran kapitalis yang memiliki *power* untuk menguasai dan siapa yang berkesadaran buruh yang cenderung dikuasai oleh kapitalis.

Pilar kedua yaitu kritik terhadap kapitalisme. Kritik ini didasarkan pada realitas dominannya kekuasaan kaum borjuis atau kapitalis terhadap kaum pekerja atau proletar. Dominasi tersebut berlangsung karena eksploitasi kapitalis, dimana kapitalis menghisap bagian hasil dari kerja yang tidak dibayar dari pekerja padahal kerja yang dihasilkan pekerja merupakan nilai tambah namun surplusnya diambil oleh kapitalis. Kondisi inilah yang menyebabkan kepemilikan alat produksi dan nilai hasil lebih berada di tangan kapitalis. Tanpa dihapusnya kepemilikan pribadi atas alat produksi, kaum pekerja akan tetap menderita dan kemajuan masyarakat tidak akan tercapai.

Berkaitan dengan pilar kesatu dan kedua, maka Marx memberi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara kaum borjuis dan kaum proletar dengan cara kaum proletar merebut kekuasaan politik di seluruh dunia melalui revolusi sosial (Kusumohamidjojo, 2015). Kekuasaan politik kaum borjuis dapat direbut jika semua alat produksi diambil

dari tangan kaum borjuis dan diletakkan di bawah kepemilikan kolektif. Dengan cara ini, pertentangan antarkelas dapat dihilangkan dan segala dasar material bagi ketidaksetaraan di antara umat manusia dapat diakhiri (Kusumohamidjojo, 2015).

C. Instrumen Analisis terhadap Masyarakat

Instrumen konseptual yang digunakan dalam analisis marxisme mencakupi lima hal, yaitu:

1. Eksploitasi. Eksploitasi terjadi manakala terdapat selisih nilai kerja yang merupakan akibat dari adanya kerja yang lebih banyak yang dihasilkan oleh kaum buruh daripada yang seharusnya diterima sebagai imbalan (Kusumohamidjojo, 2015). Buruh dieksploitasi jika dia menghasilkan kerja lebih dari yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kapitalisme, buruh dibayar karena ia bekerja, tetapi ia tidak menerima nilai lebih dari kerjanya. Melalui proses kerja ini, surplus *value* mengalir ke kapitalis (Fakih, 2009). Selisih nilai antara nilai produksi dengan nilai yang diterima pekerja sama dengan kerja lebih dan selisih itulah yang disebut surplus yang diambil oleh kapitalis. Pada zaman feodal atau prakapitalis, eksloitasi terjadi secara paksa; sedangkan dalam era kapitalis, buruh secara sukarela memasuki

hubungan kerja dengan pemilik modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Alienasi. Pengasingan atau alienasi manusia dari hakikat kemanusiaannya terjadi sebagai akibat sistematis dari kapitalisme (Kusumohamidjojo, 2015). Alienasi menurut Karl Marx terdiri atas 4 unsur, yaitu (a) para pekerja dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari pekerjaan mereka, (b) pekerja teralienasi dari sesama pekerja, (c) dalam kapitalisme para pekerja teralienasi dari masyarakat dimana mereka hidup, (d) kehidupan manusia teralienasi dari alam (Rejai, 1991). Alienasi Marx ini merupakan koreksi terhadap konsep alienasi Hegel yang terbatas pada proses kesadaran diri, tetapi oleh Marx, keterasingan atau alienasi diri seseorang ditentukan oleh kondisi kelasnya bukan karena kesadaran diri. Alienasi ini terjadi karena adanya pemisahan antara alam subjektif dan alam objektif (Ramin, 2017). Alienasi ini dapat diatasi jika ada sarana atau perantara yang menjembatani antara manusia dan alam. Perantara itu adalah kerja. Dengan mengubah alam objektif dan menyesuaikannya dengan alam subjektifnya, manusia menjadikan alam bagian dari dirinya. Alam menjadi berguna bagi manusia dan

keganjilannya digenapi dengan mengubah alam (Ramin, 2017). Hanya dengan kerja, alam itu dimanusiawikan dan dengan kerja itulah manusia tidak akan terasing dari alamnya.

3. Materialisme Historis. Materialisme historis disebut juga sebagai "*Dialectical Materialism*." Dialektika berarti konflik. Materialisme merujuk pada kekuatan atau kelas ekonomi. Materialisme Dialektika bermakna konflik kelas. Dalam sistem kapitalis, konflik kelas terjadi antara kelas borjuis sang pemilik alat-alat produksi dan kelas proletar yaitu kelas pekerja atau buruh yang tidak menguasai alat-alat produksi (Blanc, 2006). Konflik kelas dalam pemikiran Marx penting, karena sebuah kelas benar-benar eksis hanya ketika menyadari kalau kelas tersebut sedang berkonflik dengan kelas-kelas lainnya (Ritzer dan Goodman, 2011). Ketika kelas buruh menyadari konflik, maka mereka menjadi suastu kelas yang sebenarnya yaitu kelas untuk dirinya, bukan kelas dalam dirinya. Marx memandang bahwa ketidakadilan akan berlangsung terus selama sistem kapitalis tidak diganti. Marx menyarankan perlunya kelas proletar memiliki kesadaran kelas untuk bersatu melawan kelas borjuis dan

mengalahkannya sehingga dapat dicapai masyarakat tanpa kelas.

4. Substruktur dan Superastruktur. Masyarakat terdiri atas dua dimensi, yaitu substruktur dan superstruktur (Rejai 1991). Substruktur atau fondasi yang merupakan dimensi sangat penting berupa struktur ekonomi dalam masyarakat yang ditegaskan dalam istilah *ownership of private property*. Sesuai dengan kategori ini, di setiap masyarakat terdapat kelas pemilik yang jumlahnya sedikit dan kelas bukan pemiliki yang terdiri atas sejumlah besar orang. Kelas pemilik juga menjadi kelas penguasa, kelas penindas, dan kelas pengeksploitasi. Superstruktur terdiri atas segala hal yang ada dalam masyarakat, seperti budaya masyarakat, seni, agama, institusi sosial dan politik, dan praktik-praktik dalam masyarakat yang ditentukan keberadaannya oleh substruktur dalam masyarakat yang dikendalikan oleh kelas dominan atau kelas penguasa di masyarakat. Kelas penguasa menggunakan seni, budaya, politik, dan ideologi agar supaya mereka dapat memelihara kelas bawah pada tempatnya, dapat menjaga posisi dirinya, dan mengabadikan aturannya.

5. Kelas Sosial. Dalam sistem kapitalis terdapat dua kelas yang dipengaruhi oleh hubungan produksi, yaitu keas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas yang menguasai alat-alat produksi yang memiliki kemampuan membeli tenaga kerja sekaligus memiliki power untuk melakukan eksloitasi terhadap kelas pekerja. Orang-orang yang memiliki tanah meskipun tidak luas dapat dikategorikan sebagai borjuis kecil dan ketika harga tanah melambung tinggi, maka kelas borjuis kecil tersebut dapat menjadi borjuis besar. Kelas proletar adalah mereka yang menjual tenaganya karena tidak memiliki alat-alat produksi. Kusumohamidjojo (2015) menambahkan kelas proletar gembel, seperti para kriminal jalanan, petualang, gelandangan, dan pengemis yang dalam kegiatan ekonomi menjual tenaganya agar dapat memperoleh uang.
6. Ideologi. Menurut Marx, ideologi bukan saja kesadaran yang keliru, tetapi juga digunakan oleh penguasa untuk menyembunyikan kepentingan tertentu. Kaum pemikir yang ada disubordinasi oleh kaum penguasa untuk memproduksi pengetahuan yang menjamin terpeliharanya posisi kelas penguasa. Ideologi berlangsung melalui

proses hegemoni. Gramsci percaya bahwa hegemoni akan berhasil ketika kelas penguasa berhasil menyingkirkan kekuatan oposisi dan memenangkan persetujuan baik secara aktif maupun pasif dari para sekutunya (Laclau dan Chantal Mouffe, 2008). Hegemoni adalah tentang bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi tuntutan mereka menjadi universal. Dominasi negara atau kelas penguasa terhadap masyarakat berlangsung melalui aparatus ideologis negara yang mengkonstruksi kesadaran palsu dalam masyarakat serta membentengi masyarakat dari pembentukan pengetahuan akan adanya eksploitasi dan penindasan. Kesadaran palsu mengarahkan masyarakat menyetujui tindakan-tindakan yang diambil oleh negara kendatipun tidak berkesesuaian dengan kepentingan mereka. Menurut Gramsci, proses hegemoni bekerja dalam dua arah, yaitu *top-down* pada saat rezim opresif melakukan hegemonisasi dan *bottom-up* pada saat terjadi resistensi masyarakat terhadap penindasan atau tekanan rezim (Laclau dan Chantal Mouffe, 2008). Melalui proses hegemoni inilah, kelas yang menguasai negara dapat bertahan lama.

D. Varian Marxisme

Marxisme dalam perkembangannya melahirkan tiga varian penting, yaitu marxisme-leninisme, maoisme, dan komunisme (Kusumohamidjojo, 2015).

Marxisme-leninisme yang dikenal sebagai Leninisme atau Bolshevisme digunakan oleh partai komunisme Uni Sovyet untuk menandai ajaran yang dikembangkan Lenin berdasarkan marxisme. Awal abad 20 Lenin melihat adanya gejala bangkitnya imperialisme, sehingga marxisme abad 19 harus disesuaikan. Konsekuensinya, Lenin memandang perlu bahwa kaum buruh di negara industri bersekutu dengan buruh di negara-negara tertindas untuk menggulingkan kapitalisme. Slogan Lenin yang terkenal, yaitu "*Workers and Oppressed Peoples of the World, Unite*," menjadi terkenal di kalangan negara-negara komunis.

Lenin tidak percaya pada partai sosial demokrat pada zaman itu untuk menggulingkan kekuasaan rezim Tsar Rusia. Lenin menyadari bahwa untuk menggulingkan kekuatan Tsar, proletariat Rusia harus bersekutu dengan kelas tertindas lainnya di Rusia yaitu kaum tani dan borjuis kecil di kota yang hidupnya pas-pasan. Dia menganjurkan organisasi yang lebih keras yang mengandalkan kader-kader yang didisiplinkan oleh suatu model Sentralisme Demokratis. Doktrin Lenin ini berhasil memandu kekuatan yang dibangun Lenin untuk mengganti tahta Tsar melalui

Revolusi Bolshevik pada Oktober 1917 (Kusumohamidjojo, 2015).

Pasca keberhasilan revolusi Oktober 1917, Lenin mempropagandakan program politik partai Bolshevik guna memperoleh dukungan dari kaum tani dan borjuis kecil perkotaan. Program tersebut terkenal dengan semboyan "*chleb and tnir*" atau roti dan perdamaian. Dari program tersebut, Lenin menegaskan tiga tuntutan, yaitu (1) akhirilah perang dunia pertama sekarang juga, (2) negarakan perusahaan-perusahaan industri, dan (3) bagikan tanah para tuan tanah kepada para petani (Suseno, 2017).

Ketidakpercayaan Lenin pada partai-partai sosial demokrat, karena gerakan yang dilakukan oleh partai-partai tersebut terlalu lemah untuk menundukkan sistem kapitalisme yang bertumpu pada organisasi yang kuat dan dana yang besar.

Ideologi Lenin ini menjadi modal untuk menggulingkan kapitalisme melalui revolusi komunis yang dikomando oleh kediktatoriatan proletar sebagai tahapan pertama menuju komunisme. Partai yang memimpin revolusi tersebut adalah partai tunggal. Partai tunggal sebagai wadah kaum proletar harus mampu mendidik kaum proletar dan kaum borjuis kecil untuk menghapus kesadaran mereka yang selalu membebek pada kaum kapitalis. Manakala kaum proletar telah terdidik dan

mempunyai kesadaran kelas, maka partai dapat menggerakkan kaum proletar untuk menggulingkan pemerintah guna merebut kekuasaan politik dan ekonomi (Kusumohamidjojo, 2015).

Kaum proletar mendirikan kediktatoriatan proletariat setelah berhasil menggulingkan pemerintah kapitalis yang menindas sebagai tahap pendahuluan komunisme. Kediktatoriatan proletariat merupakan kekuasaan mutlak dari kaum pekerja yang diselenggarakan melalui dewan-dewan pekerja atau soviets (Kusumohamidjojo, 2015).

Setelah kaum pekerja atau proletariat berhasil dinaikkan kesadarannya ke tingkat kesadaran revolusioner, maka partai tersebut dapat dibubarkan. Selanjutnya rezim itu dipimpin oleh sistem demokrasi proletar atau demokrasi rakyat di mana para pekerja memegang kekuasaan politik melalui *Soviets.*

Kekuasaan negara yang dipimpin kaum kapitalis telah direbut oleh kaum proletar melalui kediktatoriatan proletariat. Pertanyaannya adalah setelah kekuasaan direbut, masih perlukah negara? Kaum anarkis beranggapan bahwa setelah kemenangan revolusi sosialis, negara harus dihapus. Lenin menolak pandangan tersebut, meskipun dia tidak pernah menjelaskan negara seperti apa yang menggantikan kekuasaan kaum borjuis. Menurut Lenin, negara akan layu, hilang, dan tidak dibutuhkan lagi

manakala sosialisme sudah mantap seluruhnya. Mengapa negara masih dibutuhkan? Ada tiga alasan yang diajukan Lenin. Pertama, pembangunan sosialisme masih terancam oleh kekuatan-kekuatan kapitalis. Kedua, sesudah revolusi, di samping proletariat masih terdapat berbagai kelas sosial yang dapat saja mengancam kemenangan kaum proletar. Ketiga, kemenangan revolusi kaum proletar tidak berarti bahwa sosialisme langsung terwujud secara total.

Lenin berpandangan bahwa untuk menciptakan sosialisme secara menyeluruh, negara borjuis tidak saja harus dikuasai tetapi juga harus dihancurkan. Menurut Lenin, revolusi proletariat tidak mungkin tanpa penghancuran paksa aparat negara borjuis dan tanpa penggantiannya oleh aparat negara baru, yang menurut kata-kata Engel "sudah bukan negara dalam arti yang sebenarnya" (Suseno, 2017).

Negara pasca revolusi proletariat tidak bubar atau hilang sama sekali, tetapi negara borjuis yang telah dihancurkan diisi oleh aparat pemerintah baru yang dikuasai kaum proletar. Kaum proletar ini membentuk negara penindas baru yang disebut sebagai kediktatoriatan proletariat. Kediktatoriatan ini digunakan untuk menindas segala usaha kaum kapitalis untuk berkuasa kembali. Begitu ancaman sisa kapitalisme tidak ada lagi, kediktatoriatan proletariat dengan sendirinya berakhir, karena tidak ada

lagi yang perlu ditindas melalui cara diktator (Suseno, 2017).

Maoisme adalah varian lain dari marxisme, berasal dari nama pendiri China/Tiongkok yaitu Mao Zedong. Partai komunis Tiongkok tidak pernah menyebut istilah maoisme, demikian pula kelompok Maois di luar Tiongkok. Benar, Mao tidak memiliki konsep sendiri tentang komunisme, tetapi mengembangkan marxisme-leninisme yang tepat untuk Tiongkok.

Awalnya Mao memandang Leninisme sebagai suatu revisi terhadap marxisme dan sepakat pada Stalin bahwa tidak saja perjuangan kelas harus berlanjut di bawah kediktatoriatan proletariat, namun harus dilanjutkan selama masih ada keuntungan yang dapat diambil dari kaum borjouis. Di Tiongkok, Mao membangun strategi revolusi yang ia sebut sebagai Perang Rakyat Berkelanjutan di negara-negara dunia ketiga. Mao juga menggunakan konsep kontradiksi dialektika untuk menjelaskan teori-teorinya mengenai epistemologi dan dialektika.

Revolusi Rusia (Uni Soviet) di bawah kediktatoriatan proletariat berbasis pada kaum buruh, sehingga kaum buruh yang dididik dan ditingkatkan kesadaran kelasnya. Di Tiongkok, Mao mengajukan tiga perubahan terhadap marxisme-leninisme (Femia, 2004). Pertama, kaum proletar yang dominan bukan buruh, tetapi kaum tani. Karenanya,

Mao mengandalkan kaum tani sebagai andalan kediktatoriatan proletariat untuk melakukan revolusi. Jika di Uni Soviet, Lenin mengutamakan pembangunan industri yang mampu menampung kekuatan kaum buruh, tidak demikian halnya di Tiongkok. Mao mengutamakan pembangunan pedesaan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Tiongkok saat itu. Kedua, menempatkan kesadaran atau kehendak politik di atas kondisi material atau objektif. Ketiga, perluasan Mao atas konsep kelas dengan memasukkan konsep bangsa. Cina merupakan bangsa proletar yang miskin yang ditindas, sehingga perlu melepaskan diri dari belenggu bangsa borjuis yang menindas. Karenanya, perjuangan kelas digeser menuju kancah internasional dengan bangsa sebagai basisnya.

Selain itu, Mao dalam ideologi politiknya menggunakan strategi militer untuk mewujudkan cita-citanya. Semboyan Mao yang terkenal, yaitu "*political power grows from the barrel of the gun*," atau kekuasaan politik tumbuh dari laras senapan, digunakan Mao untuk memobilisasi massa petani untuk melakukan perang rakyat dalam sistem perang gerilya (Kusumohamidjojo, 2015). Rezim Mao bertahan di Tiongkok selama 27 tahun dengan cara absolut. Sepeninggal Mao, Tiongkok dipimpin oleh Deng Xiaoping yang reformis

dengan menerapkan sosialisme ala Tiongkok. Sejak berkuasanya Deng Xiaoping, nilai-nilai Maoisme pudar.

Varian lain dari marxisme yang hingga kini masih bertahan adalah komunisme. Dalam bahasa latin, komunisme berasal dari kata "communis", artinya berbagi atau milik bersama. Dalam wacana politik, negara komunis adalah negara yang diperintah oleh suatu partai tunggal (Kusumohamidjojo, 2015). Namun demikian, umumnya partai-partai komunis lebih senang menyebut dirinya sebagai partai sosialis dan mencadangkan "komunis" sebagai suatu negara tanpa kelas yang masih harus diwujudkan.

Marx mencita-citakan masyarakat komunis yaitu masyarakat tanpa kelas, sedangkan Lenin adalah orang yang merealisasikan negara komunis. Lenin merupakan pemikir sekaligus kepala negara yang menjadi inisiator gerakan sosialisme totalitarian atau komunisme. Untuk mewujudkan komunisme, Lenin menyarankan (1) adanya kelas-kelas dan konflik kelas yang didasarkan pada kepentingan material dan ekonomi, (2) konflik kelas dapat dipecahkan melalui revolusi kekerasan, dan (3) revolusi dapat dilaksanakan dengan organisasi dan kepemimpinan di bawah partai komunis (Rejai, 1991). Sama dengan pemikiran Marx, Lenin sependapat bahwa buruh harus membentuk organisasi buruh dan perjuangan harus dipimpin oleh partai komunis

(Ebenstein dan Fogelman, 1990). Partai komunis merupakan inovasi Lenin terhadap konsep marxis. Rejai (1991) menyusun formula bahwa marxisme plus leninisme adalah komunisme.

Marx berkeyakinan bahwa kapitalisme dapat digulingkan oleh revolusi proletariat, yakni revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh yang teroganisasi melawan kaum borjuis (Heywood, 2016). Kaum buruh yang memiliki kesadaran kelas yang akan mampu menggulingkan kaum borjuis dan menggantikan kapitalisme menjadi komunisme. Namun revolusi sosial yang dilakukan kaum buruh tidak cukup menurut Lenin. Sebagai inisiator komunisme, Lenin tidak percaya kaum buruh (proletar) mampu mengembangkan kesadaran kelas, karena sudah terlalu lama mereka menelan ide-ide dan keyakinan borjuis (Heywood, 2016). Emansipasi universal yang digagas Marx tidak mencukupi, sehingga Lenin mengusulkan diktatur proletariat yang dipimpin oleh partai komunis. Jalan sosial dan ekonomi tidak cukup bagi Lenin, tetapi harus melalui jalan politik, agar cita-cita komunisme dapat dicapai. Lenin adalah "Marx yang bertindak" (Femia, 2004).

Cita-cita melebarkan sayap komunisme ke seluruh negara di dunia termasuk negara kapitalis tidak seluruhnya berhasil. Revolusi yang dilakukan partai komunis berhasil gemilang di Rusia dengan pengambilalihan kekuasaan oleh

Lenin terhadap monarki Tsar Rusia melalui kudeta pada bulan Oktober 1917. Sejak itu partai-partai komunis didirikan di mana-mana di bawah kepemimpinan Moskow dalam wadah komunisme internasional yang didirikan tahun 1919. Rezim komunis di Eropa Timur berdiri setelah tahun 1945, Cina pada tahun 1049, Kuba pada tahun 1959, dan lainnya mendirikan rezim komunis dengan kiblat utama Uni Soviet. Semua revolusi komunis terjadi di negara-negara yang tidak memiliki tradisi toleransi, partisipasi, dan kebebasan politik (Femia, 2004).

E. Neo-Marxisme

Neo-marxisme sebagai aliran marxisme modern berusaha merevisi atau menyempurnakan ide-ide klasik Marx sembari tetap setia pada sejumlah prinsip marxis atau aspek metodologi marxis (Heywood, 2016). Terdapat dua faktor utama yang membentuk karakter neo-marxisme. Pertama, ketika prediksi Marx tentang kepastian runtuhnya kapitalisme gagal terwujud, kaum neo-marxis terpaksa menguji ulang analisis kelas yang konvensional. Perlawanan kelas tidak lagi diperlakukan sebagai awal dan akhir analisis sosial. Kedua, kaum neo-marxix biasanya dianggap sebagai penyimpangan dari model Bolshevik bagi komunisme ortodok dan ditolak keras.

George Lukacs, seorang marxis Hungaria merupakan salah satu tokoh neo-marxis yang menyajikan marxisme

sebagai filsafat humanistik yang menekankan pada reifikasi yang melaluinya kapitalisme mendehumanisasi pekerja dengan mereduksi mereka hanya menjadi objek pasif atau komoditas yang dapat dipasarkan. Lukacs tidak menolak karya Marx tentang reifikasi, tetapi ia memperluas gagasan tersebut dengan mengungkapkan konsep fetisisme komoditas, yaitu proses ketika komoditas dan pasar diyakini memiliki eksistensi objektif oleh para aktor dalam masyarakat kapitalis (Ritzer dan Goodman, 2011). Struktur sosial memiliki kehidupannya sendiri dan akibatnya struktur memiliki karakter objektif. Dalam hal ini Lukacs memaparkan:

> "Manusia dalam masyarakat kapitalis berhadapan dengan realitas yang diciptakannya sendiri (sebagai kelas) yang baginya tampak sebagai fenomena alamiah yang asing bagi dirinya sendiri, ia sepenuhnya tunduk pada hukum-hukumnya, aktivitasnya terbatas pada eksploitasi hukum individu untuk memenuhi kepentingan ego sendiri yang tiada habisnya. Namun kendati bertindak, dalam hal ini, ia tetap menjadi objek dan bukan subjek peristiwa" (Ritzer dan Goodman, 2011).

Lukacs tidak percaya bahwa kaum proletar memiliki kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah sistem kepercayaan yang dimiliki bersama oleh mereka yang menempati kelas yang sama dalam masyarakat. Dalam masyarakat kapitalisme, kesadaran kelas didahului oleh kesadaran palsu. Kepalsuan kesadaran kelas berasal dari posisi kelas dalam struktur ekonomi masyarakat, tetapi

dalam sistem kapitalis, kaum proletar tidak sepenuhnya menyadari sifat dan sejauhmana eksploitasi terjadi dalam kapitalisme. Kebanyakan kelas sosial dalam sejarah tidak mampu mengatasi kesadaran palsu dan dengan demikian tidak memperoleh kesadaran kelas (Ritzer dan Goodman, 2011). Borjuasi kecil dan petani, menurut Lukacs tidak dapat mengembangkan kesadaran kelas karena ambiguitas posisi struktural mereka dalam kapitalisme. Namun demikian, Lukacs yakin bahwa kaum proletar memiliki kapasitas mengembangkan kesadaran kelas sepanjang mereka mampu mengubah entitas yang diciptakan secara struktural menjadi kelas untuk dirinya sendiri. Dalam hal perjuangan kelas, Lukacs menyarankan bahwa perjuangan harus dilakukan dari level keniscayaan ekonomi pada level tujuan sadar dan kesadaran kelas efektif.

Gramsci menaruh perhatian pada taraf yang padanya sistem kelas dipegang bukan hanya oleh kekuatan ekonomi dan politik yang tidak setara, namun oleh hegemoni kaum borjuis yang memiliki supremasi spiritual dan kultural kelas berkuasa. Nilai-nilai dan keyakinan borjuis disebarkan melalui masyarakat sipil, media, gereja, gerakan pemuda, serikat dagang, dan lain-lain. Menurut Gramsci, massa perlu mengembangkan ideologi revolusioner, namun mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan bantuan elit sosial. Elit sosial yang menyebarkan gagasan

kolektif kepada massa dan begitu massa dipengaruhi oleh gagasan-gagasan tersebut, barulah mereka melakukan aksi yang mengarah pada revolusi sosial. Elit sosial ini harus memiliki hegemoni, yaitu kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas berkuasa (Ritzer dan Goodman, 2011). Gramsci menganalisis mengapa kaum kapitalis dipatuhi oleh massa, karena mereka memiliki kepemimpinan budaya. Konsep hegemoni tidak hanya membantu analis untuk memahami dominasi dalam kapitalisme, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan revolusi sosial. Untuk mengendalikan ekonomi dan aparatus negara cukup digunakan revolusi dan kepemimpinan budaya terhadap seluruh masyarakat. di sinilah peran kunci kaum intelektual komunitas dan partai komunis untuk menggerakkan massa.

F. Kritik terhadap Marxisme

Meskipun hingga kini pemikiran dan ideologi marxisme masih digunakan setidaknya sebagai pisau analisis dalam membaca suatu realitas ekonomi dan politik, tetapi sebagai ideologi yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas tampaknya tidak terwujud. Ritzer dan Goodman (2011) menuturkan 4 problem terkait dengan ideologi marxisme. Pertama adalah problem yang secara aktual terdapat dalam komunisme. Kegagalan masyarakat komunis dan perubahannya menjadi ekonomi yang lebih berorientasi kapitalis memunculkan pertanyaan apakah makna semua

hal tersebut terhadap peran teori marxian dalam sosiologi. Ide-ide Marx telah diuji dan ternyata gagal. Suatu waktu hampir sepertiga populasi dunia hidup di bawah negara-negara yang terinspirasi ide-ide Marx, tetapi belakangan banyak negara marxis yang beralih menjadi kapitalis. Problem-problem birokrasi negara di bawah negara komunis berpengaruh terhadap keruntuhan komunisme. Rezim komunis yang masih berlanjut, seperti Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan beberapa di tempat lain telah memadukan politik stalinisme dengan reformasi ekonomi berorientasi pasar (Heywood, 2016). Problem kedua adalah tidak adanya subjek emansipatoris. Ide bahwa menempatkan kaum proletariat di jantung perubahan sosial yang akan menggiring pada komunisme, namun realitasnya kaum proletar jarang memperoleh posisi tersebut, bahkan seringkali mereka tergabung dalam kelompok penentang komunisme. Masalah ketiga adalah hilangnya dimensi gender. Ide Marx bahwa kerja merupakan sebuah komoditas di bawah kapitalisme, sementara fakta historis menunjukkan bahwa hal ini sedikit terjadi pada wanita daripada laki-laki. Bahwa kapitalisme sangat tergantung pada kontribusi tenaga kerja untuk memperoleh surplus dan surplus tersebut banyak diperoleh dari tenaga kerja wanita. Patriarkat yang menjadi dasar esensial bagi kemunculan kapitalisme diabaikan begitu saja oleh Marx.

Masalah keempat terkait dengan ide Marx yang melihat ekonomi sebagai sesuatu yang dikendarai oleh produksi dan mengabaikan aturan konsumsi. Marx fokus pada produksi yang menggiringnya untuk memprediksikan bahwa masalah efisiensi dan pemotongan upah akan mendorong terjadinya proletarianisasi, peningkatan alienasi, dan semakin terbukanya konflik kelas. Namun yang dilupakan Marx bahwa aturan konsumsi dalam ekonomi modern mendorong terjadinya kreativitas dan usaha. Hal ini menunjukkan adanya jenis pekerjaan yang bergantung pada gaji yang tidak menyebabkan alienasi. Sebagai contoh, orang-orang yang membuat video game, menyutradai film-film, dan membuat pertunjukan musik populer kurang teralienasi dari kerjanya meskipun mereka berada di bawah kendali sistem kapitalis. Demikian juga, pedagang kaki lima (PKL) yang menjual peralatan pertanian, dapur, dan pertukangan menggunakan mobil roda empat atau motor roda tiga juga tidak teralienasi meskipun mereka menjadi agen kapitalisme. Kelima, sebagian menganggap Marx tidak kritis terhadap kemajuan Barat sebagai sebuah problem. Marx yakin bahwa mesin sejarah adalah manusia yang selalu meningkatkan eksploitasi terhadap alam demi memenuhi kebutuhan materialnya. Selain itu, Marx percaya juga bahwa manusia memiliki kemampuan mengolah alam demi mencapai tujuannya. Asumsi tersebut yang barangkali

menjadi penyebab banyaknya krisis lingkungan saat ini dan di masa depan yang tidak diperkirakan oleh Marx.

G. Penutup

Marxisme merupakan ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Ideologi ini muncul sebagai respons terhadap dampak dari kapitalisme muda abad 18. Marxisme merupakan ideologi yang kompleks, sebagai cara pandang yang mencakup filsafat politik, ekonomi, dan sosial yang didasarkan pada interpretasi materialistik terhadap sejarah, kritik terhadap kapitalisme, dan teori perubahan sosial, serta pandangan yang ateistik mengenai pembebasan manusia.

Marxisme memiliki 3 pilar, yaitu interpretasi dialektika dan materialistik terhadap sejarah, kritik terhadap kapitalisme, dan revolusi proletar. Dalam perkembangannya, marxisme melahirkan tiga varian penting, yaitu marxisme-leninisme, maoisme, dan komunisme.

Marxisme dan komunisme dalam realitas ekonomi politik gagal dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, sehingga banyak negara-negara komunis yang ambruk dan beberapa lainnya berubah atau beradaptasi ke dalam sistem kapitalisme. Kaum proletar yang diharapkan menjadi jantung perubahan sosial untuk mencapai komunisme,

realitasnya tidak memperoleh posisi yang memungkinkan berjuang mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Kekakuan akan dogma marxisme dan kegagalan marxisme dalam realitas politik memunculkan kritik dan melahirkan neo-marxisme yang digagas oleh Lukacs dan Gramsci.

BAB VII
PANCASILA BERTAHAN DI TENGAH KEPUNGAN IDEOLOGI DOMINAN

Menjelang akhir abad ke-20, kecenderungan, proses, dan arus globalisasi telah menjadi suatu kenyataan hidup dan semakin kuat. Globalisasi tidak saja menyangkut bidang ekonomi, terutama moneter dan perdagangan, tetapi juga telah meluas ke bidang-bidang kehidupan yang lain. Proses globalisasi itu didukung dan dipacu lebih lanjut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi.

Isu-isu global yang menjadi perhatian utama dunia adalah ekonomi. Ekonomi merupakan piranti sekaligus tujuan yang dikejar oleh semua bangsa demi kelangsungan hidupnya. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar mengingat aspek kehidupan manusia tidak hanya ekonomi dan keberhasilan ekonomi juga bukan merupakan penentu satu-satunya kebahagiaan manusia.

Dalam pergaulan global, terutama sejak ekonomi menjadi instrumen survival umat manusia, negara bangsa tidak lagi menjadi satu-satunya aktor. Negara tidak lagi mampu mengatasi sendiri persoalan-persoalan global, seperti krisis lingkungan hidup, ancaman dan bahaya

penggunaan senjata nuklir, kelangkaan sumber daya alam, dan yang lain. Di dalam negeri pun, negara tidak dapat mengatasi secara memuaskan persoalan-persoalan, seperti pengangguran, konflik etnis, tuntutan demokrasi dan yang lain. Aktor-aktor di luar negara yang turut memainkan peran dalam pergaulan internasional adalah aktor teritorial non-negara (PLO misalnya); aktor non-teritorial transnasional, seperti perusahaan-perusahaan multi-nasional (MNC); organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti PBB, ASEAN, NATO dan lain-lain; dan lembaga-lembaga sosial masyarakat atau NGO.

Kenichi Ohmae dalam bukunya "*The End of the Nation State*" (1995) menyimpulkan bahwa melalui empat "**I**" yaitu investasi, industri, teknologi informasi, dan konsumen-konsumen individual, eksistensi negara bangsa telah berakhir. Jika gerakan empat "**I**" tersebut tidak terkendalikan, maka peran negara bangsa menjadi usang. Kualifikasi tertentu diperlukan untuk duduk pada meja global dan masuk ke dalam pemecahan-pemecahan global dan dalam konteks ini batas-batas politik (buatan) negara-negara dipandang tidak ekonomi, yang lebih sesuai adalah unit-unit geografi (Ohmae 1995:5). Ohmae menamakan unit-unit tersebut sebagai "*region states*".

Toffler dalam buku yang berjudul "*War and Anti War*" (1993) berpendapat bahwa untuk tiga abad yang lalu, unit

utama dari sistem dunia adalah negara bangsa, tetapi pembangunan blok dari sistem global sudah berubah. Selanjutnya Toffler mengatakan:

> *Many of today's are going to splinter or transform, and the resultant units may not be integrated nations of all, in the modern sense, but a variety of other entities from tribal federations to third-wave city-states. The United Nations may find itself, in part, a club of ex-nations or faux nations – other kinds of political units merely dressed in the troppings of the nation* (Toffler and Heidi Toffler, 1993: 242).

Menurut Toffler and Heidi Toffler (1993:243), *the most dynamic sectors of the new economy are not national: they are either sub, supra, or transnational. The old hard edges of the nation-state are eroding.* Pelaku Ekonomi Baru sekarang, menurut Toffler, bukan negara bangsa, melainkan sub negara (daerah), supra, atau antar-bangsa. Negara bangsa telah tererosi perannya, kata Toffler.

Globalisasi dunia yang ditandai oleh bergesernya peran negara bangsa, didominasi oleh dunia Barat dengan peradaban individualistiknya. Kesuksesan peradaban individualistik telah mendorongnya melalui kekuasaan otoriternya untuk secara agresif memaksakan pemberlakuan serba konsepnya secara seragam pada semua bangsa yang sedang berkembang. Kondisi global ini merupakan peluang bagi berkembangnya ideologi kapitalisme (liberalisme) melalui hukum ekonomi pasar untuk menguasai dunia. Bagaimana eksistensi Indonesia di

tengah pergaulan global? Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman etnik, bahasa, adat, budaya dan hukum, dapatkah Indonesia eksis di tengah merosotnya peran negara bangsa dalam pergaulan global ini? Mampukah Indonesia dengan ideologi Pancasila berperan dalam arus perjagadan (globalisasi) kehidupan umat manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengusik kita mengingat masih dominannya pengaruh ideologi liberalisme (individualisme) dalam pergaulan masyarakat internasional dewasa ini, terlebih lagi ideologi komunisme sebagai *counter* ideologi liberalisme telah mengalami pengikisan dari dalam.

Dalam bab ini dipaparkan tentang eksistensi dan prospek ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi kehidupan manusia, yang salah satu kecenderungannya adalah berakhirnya peran negara bangsa. Selain itu juga dikemukakan posisi dan prospek ideologi Pancasila di tengah menguatnya arus bawah Islam yang menghendaki dipraktikkannya syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. Sejarah Ideologi Pancasila

Proses lahirnya ideologi Pancasila berjalan sangat panjang. Tumbuhnya ide tentang Pancasila bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Proses tersebut ditandai oleh kemunculan organisasi politik dan kebangsaan, seperti Boedi Oetomo,

Sarikat Dagang Islam, Sarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia dan lain-lain.

Ide tentang landasan atau fundamen dalam kehidupan bernegara Indonesia diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang menginspirasi para *founding fathers* dalam mencita-citakan kemerdekaan dan mencari pandangan hidup bernegara yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang sangat plural dan multikultural.

Sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila telah lama ada (meskipun belum diberi nama nilai Pancasila) dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia baik di masyarakat kesukuan, masyarakat adat, maupun masyarakat kekerabatan. Dari aspek praktik sudah lama ada, tetapi dari aspek konseptual atau pemikiran baru berlangsung pada abad ke-20. Usaha mengkristalkan pemikiran ke arah dasar negara bagi suatu negara kebangsaan yang merdeka, dapat dicermati dalam sidang-sidang BPUPKI dan sidang PPKI.

Sidang BPUPKI secara resmi diselenggarakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan UUD yang dipimpin oleh ketua BPUPKI. Sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas bentuk

negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.

Sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI diselenggarakan dalam masa reses antara masa sidang BPUPKI yang pertama dan kedua untuk membahas rancangan Pembukaan UUD. Sidang tidak resmi tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno.

PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 baru bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berakhir pada tanggal 22 Agustus 1945.

Pada sidang pertama BPUPKI, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta para anggota sidang BPUPKI untuk mengemukakan (negara) Indonesia merdeka. Permintaan tersebut menimbulkan rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang hal yang mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan dalam lumpur sejarah (Latif, 2011).

Prinsip-prinsip dasar bernegara Indonesia tidak diambil dengan cara mencontek ide negara lain yang telah merdeka, tetapi digali dari bumi sejarah bangsa Indonesia yang tingkat penggaliannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh ke belakang hingga ke zaman kejayaan nusantara. Dalam usaha

penggalian tersebut, para pendiri negara memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsa Indonesia selama masa penjajahan, mengingat apa yang pernah diperjuangkan dan diimpikan sebagai sumber pembebasan dan kebahagiaan (Latif, 2011).

Dalam sidang BPUPKI terutama dalam membahas dasar negara, beberapa tokoh pendiri negara memberi gagasannya tentang dasar negara. Tokoh tersebut di antaranya Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muh. Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu (1) peri kebangsaan, (2) peri kemanusiaan, (3) peri ke-Tuhanan, (4) peri kerakyatan, dan (5) kesejahteraan sosial (Bahar (ed)., 1995).

Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tidak menjelaskan prinsip atau dasar negara seperti yang diusulkan Yamin, tetapi ia mengemukakan pentingnya bangsa Indonesia memilih aliran pikiran yang cocok untuk menata kehidupan bernegara Indonesia. Menurut Soepomo, aliran pikiran yang menyatakan bahwa negara merupakan institusi yang didirikan atas dasar teori perseorangan atau individualisme sebagaimana diajarkan Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ. Rousseau tidak cocok untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Demikian pula, aliran pikiran yang berdasarkan pada teori golongan atau teori kelas seperti yang diajarkan

Marx, Engels, dan Lenin tidak tepat bagi negara, karena negara akan menjadi alat tertentu dari suatu kelas atau golongan yang kuat yang kecenderungannya akan menindas golongan terbesar masyarakat. Bagi Soepomo, aliran yang tepat dan cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia adalah aliran atau teori integralistik sebagaimana diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini, negara diadakan tidak untuk melayani kepentingan seseorang atau golongan, melainkan menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai persatuan (Bahar (ed)., 1995).

Negara menurut Soepomo adalah suatu susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, bagian, atau anggota berhubungan erat satu dengan lainnya sebagai persatuan masyarakat yang organis. Orientasi dari teori integralistik adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Konsekuensinya, negara tidak boleh berpihak kepada golongan yang paling kuat atau paling besar dan juga tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Sejalan dengan alam pikiran integralistik, Soepomo mengemukakan bahwa prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat serta prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan alam pikiran ketimuran (Bahar (ed)., 1995). Dasar persatuan dan kekeluargaan sangat sesuai dengan corak dan struktur masyarakat Indonesia.

Tokoh nasional ketiga yang memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato terkenal yang kemudian dibukukan berjudul Lahirnya Pancasila. Menurut Soekarno mendirikan negara merdeka harus ada landasan atau fundamen yang kokoh. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan:

> Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal "merdeka", maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Kita melihat dalam dunia ini banyak negeri yang merdeka dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas national-sozialistische welstanchauung. Lenin mendirikan Soviet di atas satu welstanchauung, yaitu marxistische, historisch materialistische weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon di atas Tennoo Koodoo Seishin. Ibnu Saud mendirikan negara Saudi Arabia di atas welstanchauung, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia apakah welstanchauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas weltanschauung apa? Nasional-Sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah atau Weltanschauung apakah? (Bahar (ed)., 1995).

Prinsip-prinsip atau dasar Indonesia merdeka yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila meliputi (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan, (3) Mufakad atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Prinsip pertama dari Indonesia merdeka , yaitu Kebangsaan Indonesia sama dengan prinsip yang dikemukakan Muh. Yamin. Mengapa Soekarno menempatkan Kebangsaan Indonesia sebagai prinsip pertama dari nilai dasar yang ia usulkan dalam sidang BPUPKI? Dasar pertama dari Indonesia merdeka adalah kebangsaan, bukan kebangsaan dalam arti sempit, tetapi sebuah nationale staat. Di atas suatu kebangsaan Indonesia, kita dasarkan negara Indonesia, kata Soekarno. Kebangsaan dimaknai sebagai persatuan antara orang dan tempat. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tempat tanah tumpah darah yang menjadi tempat berpijak rakyat Indonesia adalah seluruh kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT, yang diapit oleh dua benua dan dua samudera. Bangsa yang menempati wilayah tanah air Indonesia yang dimaksud Soekarno adalah satu nationale staat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Nationale staat adalah Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit yang kini pula harus didirikan bersama-sama (Bahar (ed)., 1995). Supaya nasionalisme Indonesia tidak menjadi *chauvinisme* atau berpaham "Indonesia uber alles", Soekarno menginginkan cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, dan mempunyai bahasa satu, yaitu Indonesia sebagai bagian kecil saja dari dunia. Seperti dikatakan Gandhi,"saya seorang nasionalis,

tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan" (Bahar (ed)., 1995).

Prinsip kedua adalah internasionalisme, tetapi bukan kosmopolitisme yang tidak berakar pada kebangsaan. Kata Sekarno,"internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam bumi nasionalisme." Nasionalisme juga tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme (Bahar (ed)., 1995).

Prinsip ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia dididirikan oleh semua untuk semua, sehingga syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan dan perwakilan. Pemeluk agama Islam di Indonesia menempati proporsi terbesar. Untuk itu Soekarno memberi saran kepada umat Islam agar bekerja sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya agar supaya sebagian besar kursi badan perwakilan rakyat diduduki oleh utusan-utusan Islam. Dengan cara itu, keselamatan agama Islam terjaga serta aspirasi dan kepentingan umat Islam terpenuhi. Demikian pula, peraturan yang dibuat badan perwakilan merupakan cerminan dari hukum Islam. Soekarno mengingatkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi dalam sidang BPUPKI yang memberikan suaranya kepada Islam tidak banyak. Bagi Soekarno, hal itu membuktikan bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya

di kalangan rakyat. Itulah sebabnya, Soekarno meminta peserta sidang baik yang Islam maupun nonIslam untuk menyetujui prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

Prinsip keempat adalah kesejahteraan. Dalam prinsip kesejahteraan ini, Soekarno meyakinkan bahwa tidak akan ada kemiskinan di negara Indonesia merdeka. Dalam prinsip kesejahteraan ini, Soekarno mengkritik demokrasi yang dipraktikkan negara-negara kapitalis. Kata Soekarno;

> "di Amerika ada badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat. Tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan sekadar menurut resepnya Fransche Revolutie. Tak lain dan tak bukan, demokrasi yang dipraktikkan adalah *politieke democratie*, tidak ada *sociale rechtvaardigheid*-tidak ada keadilan sosial" (Bahar (ed)., 1995).

Soekarno mengingatkan kepada peserta sidang BPUPKI, bahwa jikalau ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, pilihlah *politieke economische democratie*. Prinsip *sociale rechtvaardigheid* bukan dipahami sebagai persamaan politik saja, tetapi juga persamaan akan diperolehnya kesejahteraan bersama. Dalam sistem permusyawaratan yang akan melahirkan kesejahteraan sosial, Soekarno tidak setuju jika kepala negara bersifat turun temurun seperti dalam sistem monarki, tetapi harus dipilih dalam suatu sistem demokrasi.

Prinsip kelima adalah Ketuhanan. Soekarno mengingatkan bahwa karena penduduk sudah berTuhan, maka negara Indonesia merdeka yang didirikan adalah negara berTuhan. Akan tetapi karena masing-masing penduduk memiliki Tuhannya sendiri, maka Soekarno mengusulkan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Yang dimaksudkan dengan prinsip tersebut adalah bagaimana penduduk yang bergama memiliki budi pekerti luhur, saling menghormati satu dengan lainnya. Dengan prinsip tersebut, seluruh agama yang ada di Indonesia mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Lima prinsip yang diusulkan Soekarno, atas saran ahli bahasa, dinamakan Pancasila. Kata Soekarno,"sila artinya azas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita dirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi."

Sidang BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai Soekarno. Panitia tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan awal naskah yang nantinya setelah diadakan perubahan menjadi Pembukaan UUD 1945. Pada alinea keempat dinyatakan bahwa susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bahar (ed)., 1995).

Dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI, naskah Piagam Jakarta, terutama pada bagian alinea keempat, yaitu kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menimbulkan perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis religius.

Atas dasar kesepakatan semua pihak baik yang beragama Islam maupun nonIslam, baik yang beretnis Jawa mupun nonJawa, pada akhirnya menyetujui perubahan sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelompok nasionalis religius (Islam) lebih mengutamakan pendekatan substansialis daripada skriptualis, artinya nilai-nilai keislaman lebih diutamakan dariapa sekadar bentuk luarnya (Ikhsan Mahar dan Lee, 2018). Keputusan kelompok Islam menerima perubahan isi piagam Jakarta dilakukan berdasarkan pikiran rasional untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah perubahan tersebut, Mukadimah UUD 1945 yang sudah diubah substansinya dan namanya disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lima sila yang oleh Soekarno dinamakan Pancasila

sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 sah menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia.

B. Pancasila Ideologi Berwatak Integralistik

Pancasila dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang secara mufakat bulat diterima bersama diterimanya keseluruhan rancangan UUD 1945 oleh rapat besar BPUPKI pada tanggal 6 Juli 1945 maupun dalam rumusan Pembukaan UUD yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, seperti yang terumus dalam alinea IV: "…, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila".

Pemberian kualifikasi sebagai dasar negara kepada Pancasila sejak awal diniatkan oleh para pendiri negara, dengan tujuan agar dalam menyelenggarakan negara Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai intrinsik, metode pencapaian, beserta ukuran kebenarannya, secara moral mengikat sekaligus membimbing segenap subjek dari kehidupan negara yang di dalamnya secara berjenjang tercakup segenap subjek kehidupan masyarakat dan perorangan warga negara maupun penduduk.

Pengkualifikasian Pancasila sebagai dasar negara tersebut menunjukkan bahwa pengertian dasar negara identik dengan pengertian ideologi dalam lingkungan ilmu

politik. Berdasarkan refleksi terhadap Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, ideologi diartikan sebagai seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya, dijadikan sebagai dasar menata masyarakat dalam menegara.

Tiap ideologi bersumber pada filsafat tertentu. Ideologi liberalisme bersumber pada filsafat individualisme. Ideologi komunisme bersumber pada filsafat materialisme. Pancasila sebagai ideologi bersumber pada filsafat Pancasila yang di dalamnya terkandung watak integralistik. Teori atau alam pikiran integralistik memaknai negara sebagai suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, dan semua anggotanya berhubungan erat satu sama lain sebagai persatuan masyarakat organis (Simanjuntak, 1994). Dalam negara integralistik, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Suatu ideologi akan mampu bertahan dan diamalkan oleh pendukungnya kalau ideologi tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bersifat alami, bukan sekadar hasil rekayasa nalar manusia. Untuk mengetahui apakah ideologi Pancasila bersifat alami atau tidak, perlu dilakukan refleksi filsafati.

Tiap sila dari Pancasila adalah abstraksi dari serba konsep yang secara logik terkandung di dalamnya, tersusun

secara berjenjang dari konsep yang bersifat universal, berturut-turut secara deduktif logik ke konsep yang makin bersifat partikular.

Konsep universal yang terkandung di dalam sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah alam semesta itu ciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensinya dikerangkai oleh suatu mantikan yang juga ciptaan Tuhan yang dinamai Mantikan Eksistensi Alam Semesta (MEAS). MEAS itu ada secara riil, tergelar meliputi: seluruh alam semesta; manusia sekadar membacanya dengan nalar sebagai pirantinya. Inilah hasil bacaan termaksud.

> "Dalam alam semesta itu, segenap fenomen yang saling bertautan merakit diri secara organik, rakitannya berjenjang, jenjangnya berhierarki, membentuk totalitas integralistik. Totalitas itu sendiri terkenai hukum hierarki, sehingga ia berjenjang ke atas tak terhingga, dan berjenjang ke bawah tak terhingga" (Besar, 1994: 7).

Mantikan Eksistensi Alam Semesta, mengandung tiga buah tesis ontologik, yaitu:

(1) Dalam alam semesta, tidak ada sebuah fenomenpun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain. Tiap fenomen niscaya merupakan totalitas yang terbentuk oleh interaksi antar sejumlah fenomen yang saling bertautan, yang berkedudukan pada jenjang satu tingkat di bawahnya; pada gilirannya, ia merupakan salah satu dari sejumlah fenomen yang sejenjang dan saling bertautan, berinteraksi saling

memberi, membentuk totalitas pada jenjang di atasnya.

(2) Ada itu memberi. Antara dua fenomen atau lebih yang saling tergantung (interdependen), bisa ada dan bisa lestari ada, hanya melalui interaksi saling memberi. Jadi, ada itu memberi.

(3) Suatu pendapat atau keyakinan adalah benar, bila ia berkesesuaian dengan suatu totalitas relasi yang berkaitan dengannya, dan nirbenar apabila kesesuaian itu tidak ada.

Pendapat atau keyakinan adalah suatu totalitas yang tersusun oleh: nalar dan sejumlah fenomen lain. Fenomen lain itu adalah referensi yang telah dimiliki oleh orang yang bersangkutan sebelum ia berpendapat atau berkeyakinan mengenai sesuatu, dan berbagai fenomen partikular. Salah satu dari fenomen partikular harus mengandung relasi (biasanya berwujud kata kerja) yang mengkaitkan segenap fenomen, termasuk nalar itu sendiri, menjadi suatu totalitas.

Tiga buah tesis ontologik yang berturut-turut mengatakan: (1) tidak ada satu hal pun yang mandiri berdiri sendiri terlepas dari hal lain yang bertautan, yang menyangkut adanya relasi saling tergantung antar manusia dan antara manusia dan lingkungan; (2) ada itu memberi, yang mengungkapkan kepedulian pada orang lain; (3) kebenaran adalah suatu totalitas, yang mengungkapkan

bahwa idea mengenai kebenaran itu bersifat integral; menunjukkan sendiri bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berwatak integralistik.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah abstraksi dari kondisi kongkrit manusia yang secara riil terus menerus dalam keadaan kebersamaan dengan manusia lain. Berpanggahan dengan tesis ontologik dari sila pertama, manusia itu sebagai salah satu fenomena dalam alam semesta, tidak mungkin mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain yang bertautan. Sila kedua dari Pancasila menunjukkan hal itu.

Adil menunjuk pada kemakhlukan individu yang ada di dalam diri manusia; sedangkan "beradab" menunjuk pada kemakhlukan sosialnya. Dengan demikian dapat diungkap bahwa konsep universal sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah: manusia adalah makhluk individu sekalipun makhluk sosial. Dalam paham ini terkandung pengakuan ontologik bahwa: antar manusia terjalin relasi saling tergantung. Ini artinya bahwa tugas hidup manusia adalah apriori memberi kepada lingkungan, termasuk kepada manusia lain. Untuk memelihara kelangsungan hidupnya, manusia dari dalam dirinya sendiri merasa wajib memberi kepada lingkungan. Tujuan dari memberi adalah demi terpeliharanya eksistensi yang diberi; dalam pengertian aktif: demi terpeliharanya kemampuan memberi

dari objek yang diberi, agar ia pada gilirannya, selaku subjek mampu memberi kepada objek yang lain lagi. Saling memberi antar banyak subjek menghasilkan suatu totalitas yang nilainya lebih besar daripada penjumlahan tiap berian dari tiap subjek. Dengan demikian, memberi sesuatu itu tidak kehilangan sesuatu, karena tiap subjek berkat perbuatannya memberi, dengan sendirinya mendapat berian kembali dari totalitas, yang nilainya lebih besar dari apa yang mereka berikan. Dua fenomen atau lebih yang saling tergantung, terpelihara eksistensinya oleh totalitas yang dibangun sendiri oleh individu–subjek melalui interaksi saling memberi.

Relasi saling tergantung, interaksi saling – memberi, sikap hidup apriori memberi, memikirkan kepentingan orang lain, yang terkandung di dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah ciri-ciri kehidupan yang berwatak integralistik.

Sila Persatuan (Indonesia) adalah abstraksi dari ketautan manusia dengan fenomen lain yang dengan sendirinya mesti berada di luar dirinya sehingga ketautan tersebut dapat dinyatakan sebagai ketautan manusia dengan lingkungan(nya). Karena ketautan manusia dengan lingkungan melalui interaksi saling–memberi dari kepentingan yang diberi, ketautan itu mendapat kualifikasi sebagai loyalitas manusia pada lingkungan. Dalam konteks

ini, loyalitas diartikan sebagai rasa keterikatan diri manusia pada lingkungannya yang tergerakkan oleh hasrat melaksanakan kewajiban memberi. Loyalitas manusia pada lingkungannya sebagai fenomen dengan sendirinya berpadanan dengan struktur jenjang yang menkerangkai eksitensi alam semesta, yakni: (1) loyalitas manusia kepada Tuhan; (2) loyal kepada keluarga; (3) loyal kepada suku bangsa; (4) loyal kepada bangsa; (5) loyal kepada umat manusia; dan (6) berpuncak di loyalitas pada Tuhan Yang Maha Esa (Handoyo, dkk., 2010).

Loyalitas pada tiap jenjang adalah kondisi integrasi dari semua berian dari para fenomen yang saling bertautan. Kondisi integrasi ini dalam ideologi Pancasila dinamai Persatuan.

Loyalitas manusia pada jenjang bangsa, bersifat khusus, karena berupa loyalitas antar manusia, antar semua manusia dan lingkungannya, yang beracu pada sejarah, etnik budaya, pengalaman, kesamaan nasib, wilayah; berlangsung secara intensif dengan frekuensi yang tinggi, dalam kurun waktu yang lama, sehingga persatuannya tersusun oleh multidimensi yang telah terintegrasi secara mapan; dan pada gilirannya membentuk pandangan hidup, menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang tersusun oleh loyalitas pada Tuhan dan berarah pada loyalitas pada Tuhan.

Persatuan sebagai suatu totalitas yang sumber genetiknya adalah keterikatan diri manusia terhadap lingkungannya yang tergerakkan oleh hasrat melaksanakan kewajiban memberi, menunjukkan sendiri bahwa konsep dari ideologi Pancasila adalah berwatak integralistik.

Konsep universal yang terkandung di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengenai masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh kata jadian Kerakyatan. Berpanggahan dengan konsep tentang manusia, paham Pancasila mengenai masyarakat adalah kebersamaan hidup antar sejumlah orang yang terselenggara melalui interaksi saling memberi.

Masyarakat sebagai suatu entitas adalah padanan dari novum, yaitu produk dari interaksi saling memberi antar warganya. Sesuai dengan ciri bawaannya yang terkandung di dalam novum, maka masyarakat itu baik kelahiran maupun eksistensi selanjutnya tergantung pada berlangsungnya interaksi saling memberi yang dilakukan oleh para warganya. Sebaliknya, begitu masyarakat menjadi ada, ia secara alami terembani Relasi Kendali asimetrik terhadap para warganya. Melalui relasi ini, masyarakat menata dan mengatur secara normatif segala sesuatunya dengan satu tujuan agar interaksi saling memberi antar warga terjamin terselenggaranya. Dengan kata lain,

terlaksananya interaksi antar warga tergantung pada keberhasilan penataan dan pengaturan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, antara masyarakat dan para warganya terjalin relasi saling tergantung. Dalam antar posisi ini, individu warga tidak memandang masyarakat sebagai suatu lembaga yang berada di atas dirinya, melainkan sebagai dirinya sendiri yang secara fitrah selalu dalam keadaan saling terkait dengan warga lainnya. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tidak memandang warganya sebagai makhluk yang berada di luar dirinya, melainkan sebagai sumber genetik dari dirinya sendiri.

Saling tergantung yang melibatkan eksistensi para subjek melahirkan niscayaan: saling memelihara eksistensi pihak yang lain. Wibawa atau kekuasaan yang diemban oleh masyarakat digunakan demi terpeliharanya eksitensi kebersamaan hidup para warganya, sedang interaksi saling memberi yang dilakukan oleh para warganya adalah demi terpeliharanya eksitensi masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam konkretisasinya, masyarakat membutuhkan informasi yang mencerminkan kehendak para warganya, dan hal itu diperolehnya melalui interaksi saling memberi informasi antara masyarakat dan para warganya. Interaksi antar informasi inilah yang dalam pengertian Pancasila disebut Musyawarah untukMufakat. Keorganisasian masyarakat yang pola kerjanya berkerangkakan

musyawarah untuk mufakat ini, dalam ideologi Pancasila membutir menjadi ajaran tentang "Kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (dari) seluruh warga".

Setelah dalam pengertian logik, bukan dalam pengertian historik, masyarakat memenuhi syarat-syarat konstitusional untuk menjadi bangsa, ia mengorganisasi diri dalam bentuk negara. Dalam paham negara modern, yang menentukan kebijaksanaan negara tidak lagi harfiah seluruh rakyat, melainkan lembaga perwakilannya atau lembaga penjelmaannya; lembaga pemegangkedaulatan rakyat. Ajaran tentang keorganisasian masyarakat secara mutatis muntandis tertransformasi menjadi ajaran tentang keorganisasian bangsa yang berbentuk negara, dengan rumusan yang disesuaikan dengan struktur negara bentuk sebagai organisasi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Mengingat isi muatannya, ajaran ini sekaligus mengungkapkan paham demokrasi yang didasarkan pada substansinya, yakni kebersamaan yang terkandung di dalam ungkapan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebersamaan sebagai substansi demokrasi, menunjukkan bahwa paham demokrasi yang bersangkutan merupakan ungkapan watak integralistik.

Selain sebagai paham demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu juga sebagai ajaran tentang prosedur menemukan pendapat yang benar di antara sejumlah pendapat yang berbeda mengenai objek yang sama. Bila "prosedur" tersebut kita perlakukan sebagai pertanyaan dengan membubuhkankata tanya "Bagaimana" di depan kosakata "prosedur" maka MEAS-lah yang dapat memberi jawaban yang tepat dan benar, yakni:

(1) Dalam alam semesta, tidak terdapat satu fenomenpun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain.

(2) Manusia adalah fenomen yang khas, karena terbekali dengan nalar yang memungkinkan ia berpendapat berbeda mengenai hal yang sama.

(3) Sebagai fenomen yang sejenjang, pendapat manusia yang satu bertautan dengan pendapat manusia yang lain, yang ada kalanya berbeda mengenai hal yang sama.

Dengan menggunakan tiga buah premis sebagai pangkal tolak MEAS menunjukkan prosedur termaksud:

(1) Hal yang sama yang menjadi objek dari pendapat yang berbeda, menciptakan kondisi kemiripan antar pendapat yang berbeda;

(2) Perbedaan pendapat adalah ungkapan dari kondisi ketaksamaan antar pendapat yang ada;

(3) Jadi, dua pendapat atau lebih yang berbeda mengenai hal yang sama, justru saling bertautan dan saling membutuhkan, sehingga memungkinkan berlangsungnya interaksi saling memberi antar pendapat.

(4) Dengan terjadinya interaksi saling memberi antar pendapat yang berbeda, muncullah novum yang berupa pendapat yang terbenar di antara segenap pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama (Handoyo, dkk., 2010).

Proses penemuan pendapat yang benar, yang sepenuhnya mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam MEAS itu, mempunyai padanan yang serasi dalam kehidupan kenegaraan nyata seperti berikut.

(1) Berlangsungnya interaksi saling memberi antar fenomen yang sejenjang adalah identik dengan permusyawaratan.

(2) Fenomen-fenomen yang sejenjang selaku subjek yang mewakili kehidupan kenegaraan adalah mereka yang mewakili rakyat, karenanya diberi sebutan perwakilan.

(3) Integrasi dari pasangan berian yang berupa pendapat yang berbeda dari pasangan fenomen subjek berkualifikasi sebagai kebijaksanaan.

(4) Integrasi dari segenap kebijaksanaan berkualifikasi sebagai hikmat.

(5) Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan interaksi saling memberi, yang dengan sendirinya berfungsi sebagai pembimbing proses pencapaian tujuan itu, dipersepsi sebagai fenomen yang memimpin proses dan karena itu dinyatakan dengan ungkapan dipimpin oleh.

(6) Pencapaian kebenaran demi kepentingan seluruh fenomen yang sejenjang dan saling bertautan, dalam kehidupan kenegaraan berpedoman dengan pencapaian kebenaran demi kepentingan seluruh rakyat, dan karenanya diungkapkan dengan kerakyatan (Handoyo, dkk., 2010).

Enam buah padanan yang terdapat dalam kehidupan kenegaraan nyata dengan enam buah kondisi yang terdapat di dalam MEAS, oleh para filsuf dan *founding fathers* Indonesia disusun menjadi suatu ajaran untuk menemukan pendapat yang benar, dengan ungkapan yang tersusun oleh pedoman tersebut yang ditempatkan dengan urutan terbalik dari belakang ke muka: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ajaran ini yang kemudian yang diangkat menjadi sila keempat dari Pancasila merupakan paham demokrasi Indonesia sekaligus sebagai prosedur demokratik untuk

mengidentifikasi kehendak seluruh rakyat. Sila keempat ini berwatak integralistik, baik sebagai paham demokrasi maupun sebagai prosedur demokratik.

Konsep universal yang terkandung di dalam sila Keadilan Sosial ialah keadilan adalah produk dari relasi antar subjek, bukan barang jadi yang diaku sebagai hak bawaan dari individu manusia. Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Berpanggahan dengan tesis ontologik sebelumnya bahwa antara manusia terjalin relasi saling tergantung, subjek dari keseimbangan kewajiban dan hak adalah jamak; bukan tunggal seperti yang selama ini diajarkan oleh filsafat individualisme.

Manusia mengemban kewajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian kewajiban memberi manusia yang lain, dipersepsi, dirasakan, dianggap sebagai hak oleh manusia yang lain itu. Pada tiap interaksi antarpasangan subjek, tertunailah kewajiban memberi dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Serentak dengan itu, terjadilah transformasi hasil penenuaian bagi manusia yang lain yang bertautan.

Di sinilah terungkap ajaran filsafat Pancasila mengenai kewajiban dan hak manusia. Dalam kebersamaan hidup antarmanusia, perangkat hidup yang orisinil adalah kewajiban yakni kewajiban memberi kepada lingkungan.

Melalui interaksi saling memberi tersebut terungkaplah pengertian hak, yakni hak seseorang adalah hasil terlaksananya kewajiban orang lain yang bertautan. Dengan kata lain, hak adalah derivat dari kewajiban. Keadaan alami itu menunjukkan bahwa hakikat dari hak adalah relasi. Hak itu menjadi ada secara *a-posteriori*, yaitu setelah berlangsungnya relasi dengan orang lain yang bertautan.

Tiap hal yang ada dalam lingkungan dapat menjadi objek dari kewajiban memberi manusia. Serentak dengan terjadinya interaksi antara manusia dan suatu objek dalam lingkungan, objek tersebut juga bertingkah laku sebagai subjek yang memberi kepada manusia atau objek lain lagi. Dengan demikian, dalam tiap interaksi terwujudlah keseimbangan kewajiban dan hak antara segenap pasangan subjek-objek, yang secara menyeluruh membentuk totalitas keseimbangan. Berarti, dalam tiap interaksi antara manusia dan lingkungannya, terwujudlah keadilan sebagai totalitas, yang identik dengan keadilan sosial.

Ajaran filsafat Pancasila memiliki kekhasan dalam paham keadilan, yaitu: (1) subjeknya jamak yang bertingkah laku serentak; (2) bahan baku dari keadilan adalah hasil terlaksananya kewajiban memberi dari para subjek; (3) keadilannya bersifat fungsional, karena orang yang tak pernah melaksanakan kewajiban memberi, tak akan mendapat hak, mengingat hak adalah hasil transformasian

dari kewajiban ke hak antar pasangan subjek; (4) dengan terjadinya transformasi kewajiban ke hak antar subjek yang jamak, keadilan sosial terjamin terwujudnya (Handoyo, dkk., 2010).

Keadilan sosial yang berciri empat tersebut, menunjukkan sendiri bahwa ia merupakan ungkapan dari watak integralistik.

Analisis terhadap sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa tiap sila dari ideologi Pancasila mengandung nilai integrasi sekaligus mengungkapkan konsep integralistik mengenai alam semesta, manusia, paham kebangsaan, cara merumuskan kehendak rakyat, dan keadilan. Hal ini juga menunjukkan antaraksi integralistik antarsila dari ideologi Pancasila. Keadilan, kehendak rakyat, dan kebangsaan, berantaraksi secara holistik, mengintegrasi menjadi kemanusian yang adil dan beradab, sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan refleksi langsung dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah, Pancasila sebagai ideologi integralistik (Handoyo, dkk., 2010).

C. Surutnya Peradaban Individualistik dan Komunisme

Di dunia ini terdapat dua ideologi besar yang mendominasi hampir semua kehidupan umat manusia, yaitu ideologi sosialisme-marxisme-komunisme dan ideologi liberalisme-kapitalisme. Ideologi komunisme berkutub di

Uni Sovyet (dulu), sekarang di Rusia dan ideologi liberalisme berkutub di Amerika Serikat.

Uni Sovyet sebagai pusat komunisme bersaing ketat dengan Amerika Serikat sebagai pelopor liberalisme dalam memperebutkan pengaruh sekaligus berebut menguasai dunia. Persaingan itu berlangsung terus selama beberapa dasawarsa dan berakhir dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat setelah Uni Sovyet ambruk, luluh lantak, dan bercerai berai. Ambruknya Uni Sovyet ini merupakan pertanda bangkrutnya ideologi komunisme.

Krisis ideologi komunisme tersebut digambarkan oleh Zbigniew Brzenzinski (1990) sebagai berikut:

> Komunisme pada tahap perkembangan sekarang adalah Imperalisme Sovyet pada periode kemunduran dan kehancurannya. Proses pembusukan yang tidak dapat dihindarkan ini telah melanda komunisme dari puncak hingga dasarnya, termasuk struktur ekonomi dan struktur negaranya, dan kebijakan serta ideologinya …

Krisis umum komunisme menemukan pengungkapannya seperti berikut: terus menerus membelotnya negeri baru dari model yang dipengaruhi oleh Sovyet; melemahnya posisi negeri-negeri komunis dalam persaingan ekonomi dengan demokrasi usaha bebas yang telah maju; disintegrasi blok Sovyet; menjengkelkannya kontradiksi-kontradiksi komunisme dengan berkembangnya sosialisme; semakin parahnya ketakstabilan di dalam negeri dan membusuknya

perwujudan ekonomi dalam semakin tidak mampunya komunisme untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan-kekuatan produksi yang rendah, krisis periodik, kegagalan konstan dalam memanfaatkan kapasitas-kapasitas produksi, dan pengangguran yang kronis; intensifikasi reaksi politis di semua front yang belum pernah terjadi sebelumnya; berdirinya tirani-tirani pribadi di sejumlah negeri komunis, dan krisis yang parah dalam kebijakan dan ideologi komunis (Brzenzinski, 1990: 2).

Kenyataan itu menunjukkan bahwa ideologi komunis telah gagal memenuhi janjinya, yaitu terbangunnya masyarakat dunia tanpa negara, tanpa hukum, dan tiap warganya bermoral tinggi, dengan pola distribusi, tiap orang mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, ideologi komunisme tidak mempunyai prospek untuk mempertahankan eksitensinya di masa depan.

Dengan bubarnya beberapa negara komunis beserta ideologinya, apakah secara otomatis ideologi liberalisme berjaya. Amerika Serikat sebagai kiblat liberalisme, diakui dapat mendikte dunia melalui kekuasaan lunak (*soft power*). Seperti dikatakan Joseph S. Nye, Jr. : Kapasitas yang disebut sebagai kekuatan lunak (*soft power*), yakni kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat dunia melalui gaya hidup

(*way of life*) dan kebudayaan pop (*pop culture*) (Nye, Jr., 1992: xii).

Meskipun kehidupan modern didominasi oleh dunia barat yang nota bene adalah lahan suburnya liberalisme–individualisme, bukan berarti bahwa ideologi tersebut dapat dipertahankan terus sampai beberapa abad mendatang. Ada beberapa fenomena yang menunjukkan surutnya peradaban individualistik.

Lahirnya peradaban modern dengan warga individualistik dipicu oleh filsafat individualisme John Locke, metode berpikir analitis kausal ciptaan Rene Descartes, dan paradigma teknologi dari Francis Bacon. Peradaban individualistik dimulai pada abad 17, yaitu sejak pada tahun 1690 John Locke menerbitkan karyanya yang sangat masyur "Two Treatises of Government". Dalam buku tersebut Locke mengajarkan bahwa manusia itu berada dalam "keadaan bebas sempurna" (*a state of perfect freedom*) untuk bertindak dan menggunakan hak miliknya, tanpa perlu meminta izin dari orang lain atau tergantung pada kehendak orang lain. Manusia juga berada dalam keadaan sama sempurna (*a state of perfect equality*), yang satu tidak melebihi yang lain, oleh karena itu semua orang berhak memanfaatkan alam tanpa perlu menundukkan diri kepada atau dikuasai oleh siapapun, kecuali Tuhan dengan

pernyataan (petunjuk)–Nya yang jelas menghendaki manusia yang satu memimpin yang lain.

Filsafat individualisme tersebut kemudian dikembangkan oleh Jeremi Bentham dan John Stuart Mill dengan ajaran etika normatif yang mereka namai "Utilitarianisme", yang intinya mengajarkan bahwa baik buruknya suatu tindakan, diukur oleh kenikmatan (*pleasure*) atau kesengsaraan (*pain*) yang dihasilkannya.

Ajaran Locke diambil oleh revolusi Amerika, yang dalam melepaskan diri dari Inggris pada tahun 1776 mencanangkan "Declaration of Independence" yang di dalamnya memuat filsafat Locke sebagai dasar revolusinya, yaitu manusia dilahirkan bebas, dan oleh Penciptanya dibekali dengan hak asasi yang tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali dengan persetujuannya, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak mengejar kebahagiaan (Besar, 1984:2).

Revolusi Perancis juga memperoleh pengaruh dari ajaran Locke. Dasar filsafat dari revolusi ini ialah *Declaration des droit de I'homme et du citoyen*". Dalam preambulnya, deklarasi ini mengakui adanya hak asasi manusia yang sakral, alami, dan tak dapat dicabut oleh siapapun. Pasal 1 dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas, sedangkan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa yang diartikan dengan hak asasi manusia adalah

kebebasan, hak milik, keamanan, dan hak memberontak terhadap penindasan.

Setelah itu, menjalarlah filsafat individualisme ke seluruh dunia, menjadi suatu peradaban baru, yaitu peradaban individualistik, yang meliputi politik yang menandakan bahwa pemerintah diadakan semata-mata untuk melindungi dan berjalannya hak asasi manusia; ekonomi yang berupa sistem kapitalisme dengan bentuk industrialisme, dan budaya yang berintikan paham bahwa manusia itu pemilik dirinya sendiri dan tak pernah berhutang budi pada masyarakat, hingga berwatak tak acuh pada orang lain.

Metode berpikir analisis–kausal Rene Descartes dan paradigma teknologi Francis Bacon yang memicu lahirnya peradaban modern, dalam pertumbuhannya berhasil menyusun suatu konsep yang kemudian dijadikan dasar pertumbuhan selanjutnya, yaitu: kebebasan individu, rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas (Besar, 1994:24). Keempat buah nilai ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdaya mengindividualisasi semua hal dalam kehidupan manusia. Dampak pertama yang dihasilkan adalah manusia mempersepsi dirinya sebagai pemilik dirinya sendiri dan tak pernah berhutang budi pada masyarakat. Proses individualisme ini diperdahsyat lagi dengan lahirnya lembaga pemilikan perorangan dan

tumbuhnya perdagangan internasional. Masyarakat Barat akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh "*Money Economy*".

Zaman industrial yang dilahirkan oleh revolusi industri tumbuh dari kuasa genetik-nya yaitu dipisahkannya secara radikal dan final dua aspek kehidupan umat manusia yakni produksi dan konsumsi, yang sebelumnya selama beribu tahun dalam peradaban agraris selalu manunggal. Pemisahan produksi dari konsumsi ini, melahirkan masyarakat produsen dan masyarakat konsumen, yang kemudian tumbuh menjadi dua komponen fundamental dari masyarakat industrial yang saling berpengaruh dalam posisi berhadapan.

Industri, terdorong oleh watak intrinsiknya: mengejar untung sebanyak-banyaknya, memproduksi secara massal semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen. Industri, terdorong oleh nafsu anatomiknya ingin terjamin perolehan keuntungannya, mengeksploitasi nafsu individual dari tiap individu konsumen, menciptakan mentalitas konsumerisme melalui iklan besar-besaran di kalangan masyarakat konsumen.

Industri digerakkan oleh rasio logik perlunya dibuat jembatan yang menghubungkan produksi dan konsumsi, mengubah fungsi pasar dari tempat bertukar bahan kebutuhan hidup tanpa motivasi keuntungan, menjadi tempat berdagang untuk memenuhi tujuan masyarakat

industrial, mengejar keuntungan. Masyarakat tenggelam dalam sistem uang. Nilai komersial menjadi pusat perhatian kehidupan, dan pertumbuhan ekonomi yang diukur menurut kuatnya pasar, menjadi tujuan utama dari semua pemerintahan.

Pasar menjadi lembaga yang mampu menguatkan diri sendiri dan menjadi berwatak ekspansif. Pasar mempertajam pembagian kerja dalam masyarakat, mendorong peningkatan percepatan produktivitas yang merupakan kebutuhan konstitusional dari kehidupan industri. Diferensiasi kehidupan masyarakat makin tajam, diikuti spesialisasi yang makin terinci dan terisolasi. Kultur masyarakat pun dipengaruhi atau lebih tepat dibentuk oleh terpisahnya produksi dan konsumsi. Pemisahan ini melahirkan masyarakat yang keranjingan uang, dikuasai oleh nafsu pemilikan, berwatak komersial dan serba dihitung. Hubungan antar manusia yang masih tinggal hanyalah hubungan kepentingan diri. Kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang individualistik. Kultur yang demikian, berpengaruh kuat pada pembentukan kepribadian manusia Barat, seperti yang diungkapkan oleh paham "*possessive individualism*", yang kemudian ternyata menjadi fondasi dari kepribadian manusia modern, yang selanjutnya melalui penemuan-penemuan ilmiahnya beserta

teknologi yang dilahirkan, membentuk peradaban modern dunia.

Di satu sisi, peradaban individualistik telah mendatangkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, budaya, dan lain-lain; sementara di lain pihak, ia juga melahirkan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia (Handoyo, dkk., 2010). Hancurnya "keluarga nuklir" di masyarakat, lahirnya gerakan Hippy, krisis energi dunia, bahaya kekurangan pangan, bahaya pencemaran lingkungan global, bahaya urbanisasi di bagian besar dunia, bahaya habisnya sumber alam, timbulnya gerakan terorisme internasional, lahirnya gerakan separatis sebagai akibat disparitas ekonomi di berbagai negara, dan sederetan permasalahan lainnya merupakan contoh-contoh efek samping dari berkembangnya peradaban individualistik.

Henderson berpendapat bahwa ideologi yang perlu dikaji kembali kebenarannya adalah ideologi individualisme, yaitu warisan John Locke yang demikian vitalnya bagi sekelompok kecil nenek moyang kita dalam menguasai rimba raya dan membentuk bangsa (Amerika). Kini Amerika yang sesak penduduk dan interdependen, individualisme sebagai ideologi menciptakan banyak konflik yang tidak perlu dan meningkatkan kesepian dan keterasingan diri (Besar, 1995: 34).

Selanjutnya Henderson menilai kultur individualistik yang membuat manusia resah karena menjadi asing terhadap dirinya sendiri dan dirundung rasa kesepian adalah hasil ciptaan Descartes berdasarkan konsep *non integrated binary worlyview*" nya. Pendapat Henderson ini didukung oleh psikolog Robert Ornstein dengan pernyataan bahwa proses mengetahui secara linier, sekuensial, kuantitatif dan reduktif adalah fungsi dari otak bagian kiri; sedagkan otak bagian kanan ialah memproses informasi dalam pola spesial dan simultan, serta merupakan sumber dari intuisi dan imajinasi. Kedua fungsi dari otak itu sama pentingnya. Metode berpikir analisis kausal ciptaan Descartes membuat manusia hanya menggunakan otak bagian kiri saja. Pada akhirnya Henderson mendalilkan bahwa paradigma Descartes tidak hanya bangkrut, tetapi telah mengakibatkan kolapsnya budaya Barat.

Hak asasi manusia yang menjadi dasar peradaban modern individualistik yang selama ini diagung-agungkan di Barat ternyata tidak pernah ada. Seperti disimpulkan oleh Mabbot bahwa konsep hak asasi manusia yang merupakan dasar filasafat dari peradaban modern individualistik ternyata salah, yaitu tidak pernah ada. Melalui penalaran "*the dialectic of desire*," "*the dialectic of the object*," dan "*the dialectic of the other self*," Mabbot membuktikan bahwa hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak dilahirkan

tidak pernah ada, melainkan hanya merupakan teori spekulatif (Mabbot, 1970: 34-37).

Dasar peradaban modern individualistik, yaitu hak asasi manusia, oleh para penganutnya sendiri setelah melakukan kaji ulang, terbongkar kebenarannya, dan sejumlah konsep individualistik yang selama hampir 300 tahun dianggap sebagai kebenaran juga terbukti tidak pernah dapat diwujudkan.

Vic George bersama Paul Wilding (1976) setelah melakukan penelitian yang seksama, menyimpulkan bahwa konsep *sosial welfare state* tidak pernah dapat diwujudkan, karena konsep tersebut didasarkan pada *the very liberal value*, yaitu: *self–help freedom, individualism, competition and achievement*. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai individualistik memang dipersyaratkan bagi suksesnya penyelenggaraan ekonomi kapitalis, tetapi jelas merupakan oposisi terhadap nilai-nilai yang diperlukan bagi suksesnya kesejahteraan sosial.

Kenneth Boulding, seorang ekonom yang mendasarkan teori ekonominya pada konsep manusia seutuhnya, menunjukkan kesalahan teori ekonomi liberal (individualistik). Kesalahan itu, menurutnya, karena ekonomi liberal memusatkan semata-mata hanya pada pertukaran (*exchange*) yang ditentukan oleh kebutuhan yang mendorong kegiatan tersebut, sepenuhnya berada di

luar pasar dan di luar jangkauan kekuatan pasar. Hanya mempersoalkan pertukaran berarti menginterpretasikan salah mengenai hakikat kehidupan ekonomik masyarakat.

Menurut Boulding, pengorganisasian masyarakat (*the organizers of society*) tidak hanya pertukaran saja, melainkan tiga yaitu; cinta, takutan, dan pertukaran (Handoyo, dkk., 2010). Kegiatan ekonomi yang hanya didasarkan pada aspek pertukaran, oleh Boulding disebut sebagai *ekonomi–koboi*. Dalam sistem ekonomi ini, keberhasilan ekonomi diukur dengan *throughput* dari semua faktor produksi yang sebagian diambil dari reservoir bahan mentah dan non-ekonomik, serta sebagian lain merupakan keluaran (*output*) yang ditimbun oleh reservoir polusi. Ekonomi seperti ini jelas bermaksud menguras sumber alam padahal persediaan sumber alam sangatlah terbatas, sehingga ekonomi koboi ini tak dapat dipertahankan lagi. Untuk menyelamatkan masa depan umat manusia, Boulding mengajukan konsep *the spaceman economy* yang bersifat integralistik.

Di bidang politik internasional, John F. Kennedy, seorang pemimpin besar dari masyarakat berbudaya individualistik, pada tahun 1963 telah mencanangkan keharusan perubahan sikap dari rakyat Amerika dan rakyat di negara sekutunya ke arah perdamaian teknologi. Senjata nuklir sebagai puncak kemajuan teknologi yang sekaligus

merupakan wujud keberhasilan peradaban individualistik pada ujungnya bukannya menciptakan ketertiban dan perdamaian, melainkan makin menambah rasa cemas, tidak aman baik bagi negara pengembang senjata nuklir maupun bagi mereka yang tidak mampu memproduksi atau memilikinya sama sekali.

Dari berbagai hasil penelitian dan penilaian dari para filsuf, pemikir maupun pemimpin dari lingkungan ideologi individualistik tersebut di atas, dalam hal mana peradaban individualistik telah menunjukkan kesalahan, tidak mampu mewujudkan tujuan yang telah dijanjikan, maka dapat disimpulkan bahwa peradaban "individualistik telah surut".

D. Tumbuhnya Peradaban Integralistik

Peradaban modern yang tumbuh sejak abad 17 dengan semangat individualisme sebagai rohnya, ilmu dan teknologi sebagai energinya, telah mencapai puncak kerjanya dalam wujud terglobalisasinya dunia. Di balik kemajuan yang dicapai, terdapat sisi gelap yang menggelisahkan manusia. Semangat individualisme yang melalui ilmu dan teknologi berhasil ditransformasi menjadi metode, prosedur, piranti, sistem, dan teknik, telah merambah ke segenap aspek kehidupan manusia. Produk totalnya, di satu sisi berwujud kehidupan yang efisien, tetapi di sisi lain terinjak-injak nilai dan martabat kemanusiaan. Manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri; bahkan merasa bukan dirinya lagi. Dahulu,

manusia mencipta teknologi demi kenyamanan hidup, namun dalam perkembangannya teknologi berkembang demi efisiensinya sendiri, dan manusia hanyut terseret di dalamnya. Manusia di negara pasca industrial hidup makmur, tetapi merasa kesepian.

Sisi buruk dari peradaban individualistik tersebut membuat para pemikir, filsuf, negarawan, dan pemimpin melakukan *rethinking* terhadap peradaban individualistik tersebut. Muncullah kesadaran manusia "kembali ke alam" *(back to nature)*. *Rethinking* itu menghasilkan temuan yang membongkar kebenaran dari berbagai konsep ciptaan peradaban modern.

Pada tahun 1966, Dr. Feitse Boerwinkel dalam bukunya yang berjudul "Inklussief Denken", menyimpulkan setelah selesainya Perang Dunia Kedua, fenomena perkembangan dunia telah menunjukkan adanya enam buah percepatan yaitu: percepatan gerak, percepatan kemampuan berpikir, percepatan daya rusak, rekor pencapaian ketinggian, percepatan pertumbuhan penduduk, dan percepatan perkembangan komunikasi (Handoyo, dkk., 2010). Enam buah percepatan tersebut menurut Boerwinkel menunjukkan bahwa umat manusia sedang mengalami mutasi kemanusiaan, dan sebagai konsekuensinya mutasi kemanusiaannya menuntut mutasi cara berpikir, bila ingin mempertahankan eksistensinya. Mutasi berpikir tersebut

adalah berpikir ekslusif (analisis-kausal) ke berpikir inklusif (integralistik).

Erich Fromm seorang psikoanalis, setelah membuktikan bahwa "*having mode of existence*" yang merupakan penyebab mengapa "janji besar" dari ideologi individualisme gagal diwujudkan, menganjurkan agar umat manusia mengganti *having mode* dengan *being mode of existence* (Handoyo, dkk., 2010). Fromm membantah kebenaran konsep individualistik yang mengatakan bahwa *the having mode of existence* itu berakar pada sifat hakikat manusia dan karenanya tidak dapat diubah. Dogma ini, menurut Fromm melahirkan anak dogma "manusia pada dasarnya tidak ingin bekerja atau berbuat suatu apapun, kecuali mereka didorong oleh insentif keuntungan materiil" yang menurut Fromm juga tidak benar. Menurut Fromm, manusia secara alami mempunyai hasrat *to be*, yaitu hasrat mewujudkan kemampuan potensialnya, hasrat untuk aktif, hasrat untuk berelasi dengan orang lain, dan hasrat untuk lepas dari kungkungan kepentingan diri. Oleh karena itu, dalam *being mode*, manusia memiliki hasrat memberi, hasrat berbagi dan hasrat berkorban. Tiga buah hasrat yang terkandung dalam being mode ini bertautan dengan paham integralistik. Pendapat Fromm ini mewakili pemikiran ke arah tumbuhnya peradaban integralistik.

Laporan ke-3 dari Club of Rome, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ahli dari berbagai bangsa, menyimpulkan bahwa *planetary interdependence* mau tak mau harus diakui, ada (Handoyo, dkk., 2010). Laporan tersebut juga mengatakan: usaha mencapai cita-cita umat manusia, yaitu kehidupan yang bermartabat dan kesejahteraan umat bagi segenap penduduk dunia, harus diselenggarakan melalui kerjasama antar bangsa secara multilateral maupun global. Dengan adanya planetary interdependence, jelas bahwa tidak ada satu bangsa pun yang dapat hidup dalam isolasi dari bangsa lain. Bangsa yang paling maju dan kuat pun tak dapat lagi berekslusif diri dari hubungannya dengan bangsa lain; juga tidak ada satu bangsa pun yang dapat menghindarkan diri dari dampak tingkah laku bangsa lain.

Berdasarkan penilaian keadaan tersebut, Club of Rome berpendirian bahwa ketertiban internasional baru bisa diwujudkan hanya bila didasarkan pada enam prinsip berikut ini: (1) keadilan, (2) kemerdekaan, (3) demokrasi dan partisipasi, (4) kesetiakawanan, (5) kebinnekaan budaya, dan (6) integritas lingkungan (Handoyo, dkk., 2010).

Kesimpulan Club of Rome tentang faktualnya *planetary interdependency* merupakan petunjuk mengenai surutnya peradaban modern individualistik, sedangkan ketertiban

dunia baru yang didasarkan pada enam prinsip di atas yang disarankan untuk dibangun adalah konsep integralistik, yang identik dengan konsep ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan (prinsip ke-2), perdamaian abadi (prinsip ke-3, 4, 5, dan 6) dan keadilan sosial (prinsip ke-1) yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsep ketertiban dunia baru ini secara fundamental memadukan kembali sekurang-kurangnya menyempitkan belahan antara fungsi produksi dan fungsi konsumsi dari masyarakat yang telah dipisahkan selama 300 tahun. Pemaduan ini merupakan titik balik, meskipun baru dalam pemikiran, dari peradaban modern individualistik ke peradaban integralistik.

Vic George dan Paul Wilding berdasarkan penelitiannya, menyimpulkan bahwa bila suatu sistem ekonomi dikehendaki untuk subur dan lestari, maka sistem itu membutuhkan sejumlah nilai intrinsik sebagai dasarnya (Handoyo, dkk., 2010). Bila konsep negara kesejahteraan sosial ingin dihidupkan, maka nilai-nilai liberal yang mendasari ekonomi kapitalis yaitu: *self-help*, *freedom*, *individualism*, *competition*, dan *achievement* harus diganti dengan *the need to help others*, *togetherness*, *concern of the community* atas *large*, *co-operation,* dan *social and communal rather than in individual terms*.

Nilai-nilai yang diidentifikasi oleh George dan Wilding yang kemudian mereka kualifikasikan sebagai prasyarat bagi terwujudnya negara kesejahteraan sosial adalah nilai-nilai integralistik.

Kenneth E. Boulding (dalam Handoyo, dkk., 2010) memberi penalaran bahwa liberalisme ekonomi tidak mampu melihat ke luar batas dari batas pertukaran, dan karenanya tidak memperhitungkan begitu banyak kegiatan ekonomi yang berpredikat kecintaan yang merupakan sistem integratif dan yang berpredikat takutan (*fear*) yang merupakan sistem ancaman. Sistem pertukaran, sistem integratif, dan sistem ancaman merupakan tiga komponen dari sistem ekonomi.

Sistem integratif menurut Boulding adalah sistem beri (gerak sistem) yang tidak melibatkan pertukaran. "*Grants Economics*" berpangkal tolak dari pandangan hidup bahwa: "transfer satu arah itu, bukanlah hal baru atau istimewa dalam kehidupan sosial, melainkan merupakan bagian integral dan esensial dari suatu sistem". Tanpa bagian itu, tidak ada organisasi sosial, bahkan masyarakat, tidak mungkin bisa ada (Silk, 1976:210). Motif dasar yang terkandung dalam "ekonomi beri" ialah kecintaan pada sesama manusia, sesama bangsa, yang pada ujungnya membangkitkan hasrat memberi kepada orang atau bangsa

lain yang bersangkutan, tanpa pamrih mendapatkan keuntungan kembali.

Kecintaan kepada keseluruhan, dalam hal ini keseluruhan umat manusia, hasrat memberi kepada orang atau bangsa lain, sebagai suatu apriori, adalah salah satu ciri dari pandangan integralistik.

Di bidang politik nasional, Alfin Toffler (dalam Handoyo, dkk., 2010) mengidentifikasi suatu sistem pemerintahan demokratik untuk masa depan yang disebut dengan *anticipatory democracy*. Teridentifikasinya demokrasi antisipatif tersebut adalah berkat sejumlah kesimpulan Toffler tentang makin memacunya perkembangan teknologi. Kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan premis dalam menemukan konsep demokrasi antisipatif, adalah akselerasi itu menghasilkan percepatan peningkatan tujuan, dan perubahan sasaran. Karena itu sistem perumusan tujuan yang didasarkan pada asas elitis, tidak efisien lagi. Dalam usahanya untuk menguasai kekuatan pengubah (*forces of change*), sistem elitis ini justru menjadi kontra produktif. Sehubungan dengan itu, dalam zaman super-industri ini, demokrasi tidak merupakan kemewahan politik, melainkan keharusan primer.

Dalam demokrasi politik, bila jumlah anggota yang ikut serta merumuskan dan memantapkan tujuan makin banyak, memungkinkan adanya balikan (*feedback*) yang memadai.

Justru balikan ini merupakan unsur esensial untuk pengendalian. Untuk mengendalikan perubahan yang akseleratif, kita membutuhkan mekanisme balikan yang makin maju dan makin demokratis (Toffler, 1973: 430).

Dalam rangka menciptakan lembaga perumusan tujuan yang demikian itu perlu diperhatikan adanya kecenderungan alami seperti dengan meningkatnya jumlah komponen sosial yang terlibat, dan perubahan menggejolak mendestabilisasi keseluruhan sistem, maka kekuasaan dari sub-grup untuk merusak keseluruhan menjadi ganda. Keadaan yang demikian itu, menunjukkan bahwa bila interdependensi makin tumbuh, maka kelompok kepentingan yang kecil mendapatkan kekuatan yang makin besar untuk mengonarkan seluruh sistem. Makin cepat gerak perubahan, waktu yang dapat ditoleransi untuk mengabaikan tuntutan mereka makin susut mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa para kelompok fungsional perlu ditampung dan diikutkan dalam menentukan tujuan bangsa yang hendak dicapai untuk kurun waktu yang bersangkutan. Suatu tujuan yang ditetapkan tanpa ikut sertanya mereka yang terkena dampaknya, sulit dilaksanakan.

Lembaga politik masa depan yang mampu merumuskan tujuan tersebut adalah tidak hanya mewakili kepentingan politik saja, melainkan terutama mewakili berbagai satuan sosial seperti industri, buruh gereja,

masyarakat intelektual, seniman, wanita, kelompok agama, mahasiswa, dengan representasi yang terorganisasi maupun yang tak terorganisasi. Berhubung yang mereka wakili adalah kepentingan, tidak lagi ideologi atau pendirian politik, maka dalam merumuskan dan menetapkan tujuan yang hendak diwujudkan, tidak logis bila dilakukan dengan pemungutan suara, melainkan dengan mufakat bulat.

Mengikutsertakan segenap satuan sosial dalam lembaga perwakilan yang masing-masing merupakan bagian integral dari keseluruhan masyarakat tanpa memandang besarnya satuan itu, melainkan memperhatikan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, adalah perwakilan yang berwatak integralistik.

Persyaratan adanya mufakat bulat dalam menetapkan tujuan bangsa, mengharuskan terselenggaranya permusyawaratan yang tidak membedakan antara mayoritas dan minoritas, melainkan memusatkan pertimbangan pada kemantikan penalaran yang mendukung suatu pendapat dari tiap peserta musyawarah adalah prosedur integralistik.

Semuanya itu, menurut Toffler adalah persyaratan suatu demokrasi, apabila demokrasi itu kita kehendaki tetap lestari di masa depan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan demokrasi pun tumbuh ke arah demokrasi integralistik (Handoyo, dkk., 2010).

Seorang pemimpin Amerika Serikat, almarhum John. F. Kennedy dibuat cemas oleh perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet (kini Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Utara) yang dapat mengancam perdamaian dunia. Ketika berbicara di depan civitas akademika American University pada tanggal 10 Juni 1963, Kennedy mengatakan suatu jenis perdamaian baru, yang dinamai "perdamaian murni." Menurutnya, perdamaian murni adalah suatu jenis perdamaian yang membuat hidup di dunia ini patut disyukuri; perdamaian dimana manusia dan bangsa dapat tumbuh dan berharap dan dapat membangun dunia yang lebih baik untuk anak cucunya, bukan perdamaian yang hanya untuk rakyat Amerika, melainkan perdamaian untuk semua pria dan wanita, bukan perdamaian untuk masa kini saja, melainkan perdamaian abadi. Perdamaian murni merupakan produk dari semua bangsa, bukan sekadar kompromi antara beberapa negara. Perdamaian adalah suatu proses, suatu strategi menyelesaikan problem. Perdamaian murni konsep Kennedy ini adalah perdamaian yang berwatak integralistik.

Dengan memaparkan hasil penelitian maupun penilaian para filsuf, pemikir, dan pemimpin dari lingkungan ideologi individualisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peradaban integralistik mulai tumbuh, yang pada

waktunya kelak dapat menggantikan peradaban modern individualistik yang nirnilai kemanusiaan.

E. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila

Sejak diusulkan sebagai ideologi negara hingga sekarang, Pancasila mengalami pasang surut dalam hal penerimaan maupun praktik pelaksanaannya. Perdebatan panjang hingga diterimanya Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara berlangsung cukup panjang dan melelahkan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Bahkan kekuatan nasionalis religius yang menginginkan piagam Jakarta dengan fokus sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan kubu nasionalis sekuler yang bertahan dengan Pancasila sebagaimana tertera dalam UUD 1945 hingga kini berimbang baik dalam pemikiran maupun jumlah pendukungnya. Diakui hingga kini pun masih ada kekuatan sosial dan politik yang menginginkan piagam Jakarta menjadi konstitusi bagi hidup bernegara Indonesia. Pancasila sebagai rumah Indonesia masih digugat keberadaannya. Itulah problem ideologis yang belum selesai.

Meskipun ideologi individualisme liberalisme dipandang sudah melemah, tetapi realitasnya dalam aspek ekonomi, ideologi tersebut masih dominan. Pengelolaan kehidupan ekonomi nasional masih didikte ideologi

liberalisme daripada dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan sistem ekonomi Pancasilanya. Ideologi ekonomi pemerintah pasca Orde Baru ditengarai mengarah pada sistem neoliberalisme.

Komunisme meskipun sudah dilarang eksistensinya oleh negara, tetapi ancaman masih tetap ada terutama dari kalangan anak-anak muda yang memiliki kaitan sebagai korban pembantaian kelompok komunis oleh rezim Orde Baru. Di beberapa daerah ditengarai ditemukan indikasi kebangkitan komunisme di Indonesia, seperti pemasangan atribut palu arit, peredaran buku-buku berbau komunis atau PKI, dan beredarnya lagu-lagu komunis (Sanur L., 2016). Kebangkitan PKI menurut Kivlan sudah berlangsung sejak tahun 2010. Itulah sebabnya, Amin Rais menolak keras pendapat bahwa komunisme telah punah (Lukmantoro, 2017).

Ancaman lain yang tidak kalah serius meskipun jumlah pelaku atau pendukungnya tidak banyak adalah ideologi radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaharuan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik (Ulya, 2016). Berawal dari sebuah aliran, kemudian radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang seringkali menggunakan jargon-jargon khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya Agama Islam. Istilah "*jihad fi sabilillah*",

"mati syahid", "*khilafah"* dan "*Islamic state"* (negara Islam) kemudian menjadi isu populer dan sering diteriakkan untuk menggalang simpati, merekrut anggota ekstrimis atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu (Ulya, 2016).

Gejala radikalisme agama tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang. Bahkan, wacana tentang hubungan agama (Islam) dan radikalisme belakangan semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan lahirnya gerakan-gerakan radikal, khususnya pasca peristiwa 9 September 2001 di New York, Washington DC, dan Philadelphia, yang kemudian diikuti pengeboman di Bali (12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005), Madrid (11 Maret 2004), London (7 Jui 2005), dan terakhir di Paris (13 Oktober 2015) (Rodin 2016).

Berdirinya negara Irak Suriah Islame State (ISIS) pada tahun 2014 (sebelumnya bernama Islamic State of Iraq tahun 2006) turut membangkitkan kesadaran Islam fanatik di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, terbukti dalam beberapa kasus mengundang simpati dan keterlibatan kelompok tertentu yang memandang pemerintah Indonesia sebagai toghut. Celakanya ditengarai ada beberapa kelompok penganut aliran tertentu di

Indonesia yang siap menjadi martir dan bagian perjuangan ISIS.

Relasi agama dan Pancasila di Indonesia sudah bagus, di mana nilai-nilai Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai universal agama samawi. Demikian pula, Pancasila sebagai *common denominator* telah menjadi payung bersama bagi semua agama dan kepercayaan di Indonesia dan realitasnya tidak ada pengekangan dan pembatasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jika ada kelompok tertentu yang membatasi kelompok agama atau aliran lain, negara segera hadir untuk menenangkan dan menertibkan relasi antara pemeluk agama atau antar aliran tertentu.

F. Prospek Ideologi Pancasila di Tengah Arus Globalisasi

Beberapa negara komunis di Eropa Timur telah ambruk pada abad 20, berarti menunjukkan bangkrutmya ideologi komunis. Kegagalan ideologi kapitalisme dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bahagia tanpa adanya kesenjangan antara di kaya dan si miskin menandakan surutnya peradaban individualistik-kapitalistik. Hal ini membuka peluang bagi tumbuhnya peradaban integralistik, sebuah peradaban yang ditandai oleh salingtergantungan dan keseimbangan. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berwatak integralistik,

maka Pancasila dapat berperan mengarahkan dinamika globalisasi ke arah yang seharusnya dengan karakteristik abad baru. Namun demikian, peran itu tidak secara otomatis berjalan dengan sendirinya, tanpa diikhtiarkan oleh para pendukungnya. Sebab, sebagaimana diketahui, setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal dari para pendukungnya.

Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Secara internal, Pancasila dihadapkan pada peranannya di dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang tidak selamanya mudah dilakukan. Kebinekaan atau kemajemukan Indonesia, sepintas lalu jauh lebih menonjol daripada kesatuannya. Oleh karena itu, bahaya disintegrasi selalu merupakan ancaman baik riil maupun potensial. Eka Darmaputra dalam disertasinya yang berjudul "*Pancasila and the Search for Identity and Modernity a Cultural and Ethical Analysis*", dalam salah satu kesimpulannya mengatakan bahwa integrasi adalah masalah yang paling pokok bagi masyarakat Indonesia, justru oleh karena integrasi mengasumsikan adanya pluralitas dan heterogenitas (Darmaputera, 1988: 40). Dalam kesempatan lain, Darmaputra mengatakan bahwa efektivitas Pancasila haruslah diukur dari sampai sejauh mana ia mampu mempertahankan baik ke-"bineka"-

an maupun ke-"tunggal"-an Indonesia di dalam suatu keseimbangan yang dinamis dan kreatif (Darmaputera, 1988: 29). Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Pancasila adalah bahwa di era globalisasi ini muncul kecenderungan berakhirnya peran negara bangsa karena meningjatnya peran aktor internasional di luar negara sebagaimana sinyalemen Kenichi Ohmae dan Heidi – Alfin Toffler.

Pemecahan masalah global, dalam pandangan Ohmae tidak lagi didasarkan pada satuan-politik yaitu negara bangsa, melainkan pada unit-unit geografi, yang Ohmae sebut "region state". Dalam buku *"The End of the Nation-State,"* Ohmae *berpendapat "the only hope is to reverse the postfeudal, centralizing tendencies of the modern era and allow or better, encourage the economic pendulum to swing away from nations and back toward regions"* (Ohmae, 1995: 142).

Senada pendapat Ohmae, Alfin dan Heidi Toffler menyatakan "*the old hard edges of the nation-state are eroding. These regional units area assuming economic viability in the placed where the third wave is most advanced"* (Toffler and Heidi Toffler, 1993:243).

Berakhirnya peran negara bangsa sebagaimana diisukan Ohmae dan Toffler, tidak berarti bahwa peran ideologi menjadi tidak ada. Ideologi, sepanjang manusia

masih ada, ia tetap eksis, sebab manusia merupakan sumber genetik dari ideologi. Yang bisa terjadi adalah, seperti yang pernah dikemukakan oleh Mostafa Rejai, ideologi bisa muncul, surut dan kemudian bangkit lagi dalam bentuknya yang baru.

Fenomena globalisasi, di satu sisi ditandai oleh merosotnya peradaban individualis, dan di sisi lain tumbuh peradaban di mana antara-negara yang satu dengan yang lain saling-tergantung. Seperti dikatakan Karlh Deutsch: *Despite the persistence of nation-state, international interdependence has increased in several important sectors of human behavior. The world continues to be ever more science and technology, and in political culture* (Deutsch, 1971: 81).

Sesuai dengan tesis ontologik dalam MEAS, di antaranya: ada itu memberi, dimana antara dua fenomen atau lebih yang saling tergantung, bisa ada yang bisa lestari, hanya melalui interaksi saling memberi, maka bila negara kebangsaan ingin melestarikan eksistensinya, hanya dapat mereka wujudkan melalui interaksi saling memberi antar negara yang terselenggara secara terus menerus ini, oleh Pembukaan UUD 1945 dikualifikasikan sebagai "Ketertiban Dunia".

Paham ketertiban dunia Indonesia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dimana "kemerdekaan" menunjukkan pada subjek yang

berinteraksi saling memberi. Dalam pengertian ini, di satu pihak negara kebangsaan sebagai subjek diakui sebagai pengemban kedaulatan maksimum, tetapi di lain pihak, karena secara alami terdapat relasi saling tergantung, maka terpeliharanya kedaulatan maksimum tersebut, sampai tingkat tertentu tergantung pada terlaksananya kewajiban memberi dari negara-negara yang bertautan dengannya (Besar, 1992:28).

Pancasila adalah ideologi yang berwatak integralistik. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah kebersamaan. Mengutip pandangan Hatta, Swasono (2018) menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar persatuan hati sebagaimana diidamkan Hatta pada tahun 1932, dengan harapan persatuan tidak berubah menjadi persatean. Pancasila adalah *common denominator* yaitu penyebut yang sama bagi angka pecahan (pembilang) yang berbeda, yang mentransformasikan kebhinekaan menjadi ketunggalikaan tanpa menghilangkan keindahan dan ciri khasnya. Pancasila merupakan asas bersama atau doktrin kebersamaan dan ketunggalikaan, sebagai kesatuan hati yang tetap memelihara keanekaragaman Indonesia tanpa melebur dinamika dan keindahan berbhineka. Kebersamaan itu menurut Besar (1992) bisa berwujud realitas terintegrasinya sejumlah pluralitas dan bisa berwujud pula suatu ide yang mengakui adanya pluralitas yang secara

alami berinteraksi saling tergantung membentuk sebuah kebersamaan.

Pancasila merupakan roh atau fundamen bagi terwujudnya ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik adalah terintegrasinya atau kebersamaan pluralitas yang berwujud delapan gatra. Sebagai masukan instrumental, gatra ideologi memiliki peran mengendalikan kehidupan politik (Handoyo, dkk., 2010). Dengan demikian, ideologi berkedudukan pada jenjang satu tingkat di atas jenjang gatra politik. Dalam bahasa teknikal sistem, relasi antara gatra ideologi dan gatra politik adalah relasi kendali asimetrik. Oleh karena antara gatra politik dan tiga gatra sosial lainnya juga terjalin oleh relasi kendali asimetrik, maka secara transitif gatra ideologi juga mengendalikan gatra ekonomi, gatra budaya, dan gatra keamanan (Handoyo, dkk., 2010). Demikian pula, karena segenap jaringan interaksi antara gatra alamiah (geografi, demografi dan sumber daya alam) dan tiga gatra sosial (ekonomi, budaya dan keamanan) selalu dalam kendalian gatra politik, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gatra ideologi dengan ketujuh gatra lainnya adalah bersifat kendali asimetrik.

Pancasila adalah ide yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan, sedangkan ketahanan nasional adalah realitas terintegrasinya pluralitas. Ini berarti,

ketahanan nasional adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Dalam relasi yang demikian ini, wajar bahwa ideologi Pancasila berkemampuan pas persis (akurat) untuk membimbing penyelenggaraan ketahanan nasional. Ketertiban dunia seperti yang dirancang oleh *Founding Fathers* kita adalah realitas terintegrasinya segenap kondisi ketahanan nasional dari semua bangsa yang ada yang ingin diwujudkan.

Konsep ketertiban dunia pada hakikatnya merupakan perwujudan Pancasila dengan wataknya yang integralistik dan sifat integralistik ini merupakan sesuatu yang alami, maka dengan sendirinya ia dapat diwujudkan. Ini artinya bahwa ideologi Pancasila berpeluang dalam skala dunia dan berpeluang untuk membimbing penyelenggaraan ketertiban dunia. Berhubung Pancasila adalah ide, maka untuk mampu berperan demikian, membutuhkan karya nyata dari para pendukungnya yang berwujud karya pemikiran, karya politik, karya ekonomi, karya sosial budaya, dan karya lainnya sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman.

Dukungan terhadap eksistensi ideologi Pancasila dalam kehidupan nasional maupun dalam arus pergaulan global, dibuktikan oleh hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap 614 responden di 12 kota di Indonesia pada tanggal 24-26 Mei 2017. Dalam jajak

pendapat tersebut ditanyakan "apakah yang menjadi perekat atau yang menyatukan bangsa ini?" Hasilnya, 43,6% menyebut Pancasila, lainnya 17,2% menyebut Bhineka Tunggal Ika, 10,4% agama, 7,5% cinta tanah air dan nasionalisme, 6,6% toleransi, 5,1% UUD 1945, lainnya 7,9%, dan tidak tahu 1,7% (Kompas, Senin, 29 Mei 2017, hlm 1). Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan kepada Pancasila bahwa Pancasila masih menjadi gantungan utama bagi upaya merekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam jajak pendapat kedua pada tanggal 25-27 Mei 2017 diperoleh hasil yang menggembirakan bahwa sebanyak 95,3% responden percaya bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, hanya 3,9% yang menyatakan tidak dan 0,8% menyatakan tidak tahu. Dari jajak pendapat kedua tersebut jelas bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa Pancasila masih merupakan ideologi yang cocok dan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

G. Kritik terhadap Pancasila

Pancasila adalah *common denominator*, sebagai penyebut yang sama bagi angka-angka pecahan yang berbeda (pembilang), yang mentransformasikan "kebinekaan" menjadi "ketunggalikaan" tanpa masing-masing kehilangan keindahan dan ciri khasnya (Swasono,

2017). Hal ini betul dan tepat, karena Indonesia merupakan bangsa yang memiliki latar belakang kultural, religi, suku, etnis, dan ras. Pemaksaan satu sistem nilai (ideologi) yang memuat identitas tertentu berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kasus pemaksaan bahasa Sinhala sebagai bahasa negara di Srilanka hingga kini masih menjadi persoalan hubungan antara etnis Sinhala yang dominan di Srilanka dengan etnis Tamil yang kecil tetapi memiliki kedekatan kultural dengan etnis Tamil di India. Itulah sebabnya, berdasar pada Pancasila, bangsa Indonesia tidak menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional bagi negara Indonesia meskipun jumlah penuturnya terbanyak di antara etnis lainnya.

Sejak dicabutnya Ketetapan MPR RI Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), bangsa Indonesia tidak memiliki tafsir sekaligus pedoman implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, bangsa Indonesia tidak memiliki rujukan yang jelas dan legal dalam mengimplementasikan Pancasila. Di kalangan akademisi muncul perdebatan akademik dan tafsir yang beraneka ragam. Gerung (2018) misalnya, mengkritik keras pemaknaan ideologi Pancasila sebagai *comprehensif doctrine*, yaitu sistem keyakinan yang bermakna final. Dia

lebih cenderung setuju jika Pancasila menjadi *overlapping concensus*, yaitu proposal untuk menghasilkan politik plural supaya tidak ada doktrin absolut yang memonopoli ruang publik. Gerung (2018) juga meragukan aspek koherensi dalam Pancasila. Sebagai contoh, apakah sila pertama Pancasila tidak menghendaki sistem politik sekuler, di mana dalam konstitusi Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Tetapi hal ini jika dikonfrontasikan dengan bunyi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti Indonesia menganut kedaulatan Tuhan, karena sila pertama ini bagi orang Islam bermakna tauhid. Demikian pula, alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…", menunjukkan bahwa Indonesia mengakui nilai ketuhanan Islam yang bermakna monoteisme dalam penghayatan keagamaan (Fuad, 2012). Apabila sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab disandingkan dengan konsep humanisme dalam sejarah transisi dari sistem teokrasi Eropa menuju era pencerahan yang membebaskan otonomi manusia dari kungkungan doktrinasi teologis, maka konsekuensi pandangan ateistik bisa dimasukkan ke sila kedua (Gerung, 2018). Sila kedua yang memberi otonomi atau kehendak bebas manusia apakah tidak bertentangan dengan sila pertama yang menghendaki kehendak Tuhan yang absolut. Tidakkah kandungan sila kedua harus tunduk pada sila pertama.

Sebagai sebuah ideologi yang di dalamnya berisi sistem nilai yang dianut dalam menuntun kehidupan individu dan masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila mengalami berbagai tantangan. Tantangan, cobaan, dan bahkan gerakan penolakan terhadap Pancasila sudah dimulai sejak sidang-sidang BPUPKI, PPKI, Konstituante, hingga kini. Gerakan revolusioner berupa pemberontakan bersenjata yang dilakukan PKI dan DI/TII merupakan perlawanan terhadap ideologi negara. Pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan oleh Muso dan Amir Syarifudin pada tahun 1948 merupakan pemberontakan yang tujuan akhirnya adalah mendirikan negara komunis. Pemberontakan DI/TII yang dilakukan Kartosoewiryo di Jawa Barat memiliki 2 motif, yaitu motif agama dan motif politik (Dian Supyan, 2016). Dalam motif agama, Kartosoewiryo memimpin gerakan DI/TII adalah ingin mendirikan negara Islam, karena bentuk negara tersebut diyakini mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Motif politik memberontak adalah menjadikan Jawa Barat sebagai negara berdaulat yang terpisah sekaligus basis perlawanan terhadap Belanda yang masih mengganggu keterantaman hidup Indonesia merdeka. Gerakan DI/TII juga tumbuh di daerah lain, seperti di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh, di Jawa Tengah di bawah

komando Amir Fatah, di Sulawesi Selawah di bawah pimpinan Kahar Muzakar, dan Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar. Baik karena motif agama maupun motif politik, mendirikan negara Islam bertentangan dengan negara Indonesia merdeka yang berdasarkan Pancasila. Pemberontakan lain yang dilandasi kekecewaan terhadap pemerintah juga dilakukan di tempat lain, seperti pemberontakan APRA dipimpin Westerling dan Sultan Hamid 2 dan pemberontakan Andi Azis di Makasar, pemberontakan RMS dipimpin Soumokil, dan pemberontakan PRRI/Permesta dipimpin Achmad Husein dan Syafruddin Prawiranegara.

Pada bulan September 1965 terjadi pemberontakan berdarah yaitu pemberontakan G30S/PKI. Pemberontakan yang menelan korban baik kalangan tentara dan umat Islam, juga dari pihak pemberontak dan simpatisannya. Pemberontakan G30S/PKI tersebut, sama motifnya dengan pemberontakan PKI Madiun 1948 yaitu ingin mengganti negara Pancasila menjadi negara komunis. Di kalangan tentara yang diculik PKI telah gugur sebanyak 7 perwira; sedangkan pembersihan terhadap anggota PKI dan simpatisannya diperkirakan sebanyak 500.000 orang (Pour, 2010). Chomsky (2017) memperkirakan korban dari gerakan pembersihan terhadap PKI, terutama petani tanpa tanah sebanyak 700.000 orang.

Gerakan lain yang mengganti dasar negara Pancasila adalah gerakan yang dilakukan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Tujuan utama gerakan HTI adalah penegakan syariat Islam dan untuk menegakkan syariat Islam pemerintahan harus diwadahi dalam bentuk Khilafah Islamiyah (Arif , 2018). Terdapat dua pandangan atau kelompok dari HTI dalam merespons ideologi Pancasila. Kelompok pertama adalah menolak ideologi Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi kufur yang jelas tidak sesuai dengan ideologi Islam yang dijunjung tinggi HTI. Kelompok kedua adalah kelompok yang memandang Pancasila sekadar sebagai *set of philosophy* (Arif, 2018). Kelompok kedua ini tidak mempermasalahkan Pancasila sebagai seperangkat gagasan filosofis, yang dipermasalahkan adalah Pancasila dalam tataran praktis atau implementasi dalam realitas politik tidak memiliki turunan sistemik, berbeda dengan ajaran Islam. Dengan tidak adanya rumusan sistem sebagai perwujudan Pancasila, maka *set of philosophy* ini tidak mencukupi dalam kerangka ketatanegaraan dan tata politik. Dua kelompok ini memiliki prinsip yang sama yaitu menolak Pancasila sebagai dasar negara, sebab dengan sifat relatif dinamis dalam kerangka *set of philosophy*, Pancasila tidak mutlak sebagai dasar negara (Handoyo, 2018).

Keefektifan dan signifikansi ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Indonesia mulai dipertanyakan. Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2011 melaporkan bahwa dari 1000 siswa SMP dan SMA, 84% di antaranya menganggap Pancasila sudah tidak relevan (Widianto, 2018). Survei yang dilakukan INFID dan Jaringan Gusdurian terhadap 1200 responden di enam kota pada tahun 2016 menemukan bahwa 7,5% dari responden setuju menggunakan kekerasan atas nama agama sebagai bagian dari jihad. Temuan lain yang menarik adalah 14,8% responden setuju bahwa lebih baik memiliki pemimpin korup tetapi beragama Islam daripada dipimpin oleh nonmuslim (Hikam, 2018). Survei nasional Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menemukan bahwa 67,78% siswa dan mahasiswa serta 67,08% guru dan dosen menolak jika kepala daerah non-muslim (Qodir, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi penolakan dan penentangan. Hal itu berarti perlunya penataan ulang relasi antara agama dengan Pancasila, terutama dalam ranah politik dan hukum.

Pemberontakan, perlawanan, dan ketidakpercayaan terhadap Pancasila disebabkan Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara dalam arti ideologi penguasa. Ideologi Pancasila dalam hal ini dijadikan sebagai alat politik penguasa atau dalam bahasa Hardiman (2018) digunakan

sebagai "artifisialitas politis." Artifisialitas politis adalah sebuah konstruksi atau rekayasa konseptual yang disusun sedemikian rupa dengan sengaja unuk menggantikan kenyataan empiris (Hardiman, 2018). Pancasila bisa menjadi "artifisialitas politis" manakala diperlakukan sebagai dogma atau rekayasa politis yang dipaksakan dan kadang disertai teror negara kepada masyarakat. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat politik pemerintah atau instrumen untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus sebagai alat untuk meminggirkan lawan politik (Tasma dan Heru Santosa, 2006; Gerung, 2018). Semboyan "Aku Pancasila" mensugestikan suatu politik penyingkiran, yaitu mereka yang bukan pendukung pemerintah adalah tidak Pancasilais. Bahkan pada masa Orde Baru, bagi kelompok masyarakat yang tidak patuh pada kebijakan pemerintah, misalnya warga Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah yang tidak mau dipindah karena tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan waduk akan dicap "PKI", sebuah label menakutkan pada masa itu.

Demikian pula, pemaknaan Pancasila sama dengan negara dan Pancasila sama dengan pemerintah bisa berdampak negatif pada negara/pemerintah. Ketika penguasa tidak mampu mewujudkan kehidupan yang membahagiakan rakyat, maka pihak oposisi atau lawan menganggap ideologi Pancasila tidak dapat dipakai untuk

mengentaskan rakyat dari penderitaan. Akibtanya, pemerintah yang tidak mampu membahagiakan rakyat harus diganti, demikian pula ideologi yang dianutnya, yaitu Pancasila.

H. Penutup

Dilihat dari konsep universal yang terkandung di dalam sila-silanya, Pancasila merupakan ideologi yang berwatak integralistik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung konsep universal yang disebut MEAS yang merupakan desain integralistik lingkup makro kosmos. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah abstraksi dari kondisi konkrit integralistik manusia yaitu secara alami selalu dalam keadaan kebersamaan dengan manusia lain, dan menunjukkan hakikat integralistik manusia yaitu secara alami selalu dalam keadaan kebersamaan dengan manusia yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sila Persatuan mengungkapkan paham kebangsaan integralistik yang tersusun oleh loyalitas berjenjang. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengajarkan demokrasi integralistik dan prosedur integralistik untuk mengambil keputusan. Sila Keadilan Sosial mengajarkan paham integralistik tentang “kewajiban dan hak manusia” yaitu bahwa yang original adalah “kewajiban”, sedangkan hak

adalah derivat dirinya. Sila ini juga mengajarkan paham keadilan yang bersifat integralistik.

Sementara itu, antar aksi integralistik antar silanya ada adalah keadilan, kehendak rakyat, dan kebangsaan berantaraksi secara holistik, mengintegrasi menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan refleksi langsung dari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai hasil penelitian dan penilaian para filsuf, pemikir dan pemimpin di lingkungan ideologi individualisme, seperti Edward Wenk, Henderson, Ornstein, Mabbot, George dan Wilding, Boulding, dan Kennedy, ternyata peradaban individualistik telah menunjukkan kesalahan dan tidak mampu memenuhi tujuan yang telah dijanjikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peradaban individualistik telah surut.

Sisi buruk dari peradaban individualistik tersebut membuat para pemikir, filsuf, negarawan, dan pemimpin melakukan *rethinking* terhadap peradaban individualistik. *Rethinking* tersebut menghasilkan berbagai temuan yang membongkar kebenaran dari berbagai konsep ciptaan peradaban modern. Peradaban integralistik mulai tumbuh dalam era globalisasi. Oleh karena peradaban tersebut sifatnya alami, maka ia menjadi terniscaya, yang pada

waktunya nanti akan menggantikan peradaban modern individualistik.

Di era globalisasi banyak kejadian spektakuler yang tidak akan terbayangkan sebelumnya, di antaranya: bubarnya beberapa negara komunis dan mulai surutnya peradaban individualistik. Peran negara pun, seperti ditulis Ohmae dan Toffler, ke dalam pergaulan global, tergantikan oleh aktor lain, seperti sub negara, supra negara dan bisnis swasta. Bubarnya negara bangsa seperti yang dialami oleh beberapa negara di Eropa Timur tidak akan dialami Indonesia sepanjang Indonesia tetap konsisten menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi yang berwatak integralistik berperan menjaga eksistensi Indonesia dan oleh karena terbawa sifatnya yang alami, ia memiliki peluang untuk mengarahkan dinamika globalisasi ke arah yang seharusnya, terutama di dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Berhubung Pancasila adalah idea, maka Ketahanan Nasional (Indonesia) sebagai wadahnya harus menjadi cerminan dari Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional.

Namun demikian disadari bahwa dengan bangkitnya gerakan pemurnian agama Islam dalam panggung sosial dan politik, harus dipikirkan secara lebih sistematis perlunya ditata hubungan antara agama (Islam) dengan Pancasila

agar eksistensi NKRI dapat dipertahankan. Hubungan antara agama Islam dan Pancasila akan selalu muncul dalam kontestasi politik. Diakui bahwa Pancasila tidak memiliki jangkauan untuk memberi penjelasan kepada semua hal yang bersifat *beyond reality* dan agama juga memiliki keterbatasan scope untuk dijadikan landasan etika universal yang mempersatukan kehendak semua agama (Saidi, 2018). Kebutuhan akan saling berinteraksi antara agama dengan Pancasila dapat dilihat dari dua hal. Pertama, Pancasila membutuhkan agama sebagai sponsor utama dalam mendorong lahirnya etika berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada kesalehan sosial yang dipetik dari ajaran agama. Kedua, agama membutuhkan Pancasila dalam mempertemukan nilai-nilai universal yang ada dalam seluruh ajaran agama, seperti kemanusiaan, keadilan, kesamaan, dan lain-lain.

Sebagai ideologi yang berdasarkan kebersamaan, Pancasila memiliki peluang untuk berperan menata hubungan antarbangsa dalam rangka memajukan ketertiban dan perdamaian dunia. Namun demikian, berperan tidaknya Pancasila, selain terletak pada struktur ideologinya, juga sangat bergantung pada para pendukungnya. Melalui karya nyata pendukungnya dengan menterjemahkan konsep universal Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional,

negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjaga keutuhannya dan mampu berperan dalam pergaulan global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abrahamsen, Rita. 2004. *Sudut Gelap Kemajuan Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Terjemahan Heru Prasetia. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Al-Jihad, R. Saddam. 2018. *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet.

Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Arif, Saiful. 2000. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bahar, Saafroedin (et al). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Baumol, William J., et al. *Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran*. Terjemahan Rahmi Yossinilayanti. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Besar, Abdulkadir. 1984. *Lampiran III Naskah-naskah Berpikir Integralistik merupakan Keharusan Apriori sekaligus Kebutuhan Tak Terelakkan*.

Besar, Abdulkadir. 1992. *Damai dan Perang Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Lemhanas.

Besar, Abdulkadir. 1994. *Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi*. Makalah ditulis untuk Seminar "Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi" selenggaraan Forum Diskusi Fakultas Filsafat UGM di Yogyakarta, 6-17 Nopember 1994.

Besar, Abdulkadir. 1995. *Perkembangan Ideologi-ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional: Prediksi Masa Depan*, dalam Ichlasul Amal dan Armaidy Armawi. Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: GadjahmadaUniversity Press.

Blanc, Paul Le. 2006. *Marx, Lenin, and The Revolutionary Experience Studies of Communism and Radicalism in The Age of Globalization*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Brzenzinski, Zbigniew. 1990. *Kegagalan Besar Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Buick, Adam. 1973. *The Basic Principles of Socialism*. *Socialist Standard*. No. 827 July 1973.

Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel. 2008. *Membongkar Mitos Neolib Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan.* Terjemahan Muh. Gusti Zainal. Yogyakarta: INSISTPress.

Chaniago, Andrinof A. 2012. *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Chomsky, Noam. 2017. *How The World Works*. Terjemahan Tia Setiadi. Yogyakarta: Bentang.

Christenson et al. 1971. *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead, and Company, Inc.

Crick, Bernard. 2001. *Sosialisme.* Terjemahan Ribut Wahyudi. Surabaya: Pustaka Promethea.

Darmaputera, Eka. 1988. *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Agung.

Deutsch, Karl and Stanley Hoffman (ed). 1971. *The Relevance of International Law*. New York: Anchor Books Doubleday and Company, Inc.

Eatwell, Roger. 2004. "Apa yang dimaksud dengan Ideologi-Ideologi Politik." Dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (ed). *Ideologi Politik Kontemporer*. Terjemahan RM. Ali. Yogyakarta: Jendela.

Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. 1990. *Isme-isme Dewasa Ini Edisi Kesembilan*. Terjemahan Alex Jemadu. Jakarta: Erlangga.

Engels, Friedrich. 2012. *Kondisi Kelas Pekerja Inggris Embrio Sosialisme Ilmiah*. Disadur oleh Hidayat Purnama. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

Ethridge, Marcus E. dan Howard Handelman. 2016. *Politik Dalam Dunia Yang Berubah*. Terjemahan Lita Yusron. Bandung: Nusamedia.

Faizal Noor, Henry. 2013. *Ekonomi Publik Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Padang: Akademia Permata.

Fakih, Mansour. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: INSISTPress.

Femia, Joseph V. 2004. "Marxisme dan Komunisme." Dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright (ed). *Ideologi Politik Kontemporer*. Terjemahan RM. Ali. Yogyakarta: Jendela.

Fink, Hans. 2010. *Filsafat Sosial Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas*. Terjemahan Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gambone, Larry. 2004. *Pierre-Joseph Proudhon and Anarchism: Proudhon's Libertarian Thought and the Anarchist Movement.* Paris: Libertarian Alliance.

Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas*. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan & Praksis*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.

Hardiman, F. Budi. 2018. "Menggali Pancasila sebagai Filsafat Politik." Dalam *Prisma, Vol. 37 No. 2, 2018. Hlm. 32-39*.

Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Terjemahan Eko PD. Yogyakarta: Resist Book.

Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Terjemahan Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.

Hayek, Friedrich A. 2011. *Ancaman Kolektivisme*. Terjemahan Ioanes Rakhmat. Jakarta: FREEDOM INSTITUTE dan FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG.

Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Terjemahan Tim Redaksi Gramedia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hikam, AS. 2018. *Deradicalization Engendering Indonesian Civil Society Organizations in Curbing Radicalism*. Jakarta: Kompas Book Publisher.

Heilbroner, Robert L. 1991. *Hakikat dan Logika Kapitalisme*. Terjemahan Hartono Hadikusumo. Jakarta: LP3ES.

Hoppe, Hans-Hermann. 1989. *A Theory of Socialism and Capitalism Economics, Politics, and Ethics.* Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.

Ikhsan Mahar, Muhammad dan Antony Lee. 2018. "Visi Persatuan Pendiri Bangsa." Dalam M. Hernowo (ed). *Membaca Indonesia #Menyatukan Kepingan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan Guritno. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Johnson, Craig. 2013. *Pembangunan Tanpa Teori Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. Terjemahan Eko P. Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.

Kusumohamidjojo, Budiono. 2015. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta: Jalasutra.

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis PostMarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Terjemahan Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Limbong, Bernhard. 2013. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi Edisi Baru*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Mabbot, JD. 1970. *The State and the Citizen*. London: Hutchinson University Library.

Machan, Tibor R. 1988. *The Moral Case for The Free Market Economy A Philosophical Argument.* Lewiston: The Edwin Meller Press.

Malaka, Tan. 2018. *Aksi Massa*. Yogyakarta: NARASI.

Notonagoro, Wisnu HKP. 2011. *Neoiberalisme Mencengkeram Indonesia IMF, World Bank, WTO Sumber Bencana Ekonomi Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta.

Nye, Joseph S. 1992. *Memimpin Dunia Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*. Terjemahan Budhy Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation-State the Rise of Regional*. New York: The Free Press.

Plekhanov, GV. 1959. *Sosialisme Utopian Abad XIX*. Terjemahan oleh Ira Iramanto. Jakarta.

Pour, Julius. 2010. *Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan & Petualang*. Jakarta: Kompas.

Ramin, Maghfur M. 2017. *Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Sociality.

Rejai, Mostafa. 1991. *Political Ideologies A Comparative Approach*. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian.* Terjemahan Nurhadi. Bantul: KREASI WACANA.

Samekto, FX. Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: GENTA PRESS.

Santoso Kristeva, Nur Sayyid. 2015. *Kapitalisme, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sargent, Lyman Tower. 1993. *Contemporary Political Ideologies A Comparative Analysis*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Silk, Leonard. 1976. *The Economist*. New York: Avon Books.

Schrijvers, Joke. 2000. *Kekerasan Pembangunan Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Terjemahan Nug Katjasungkana. Jakarta: Kalyanamitra dan Penerbit Media Pressindo.

Simanjuntak, Marsillam. 1994. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Sim, Stuart dan Borin van Loon. 2008. *Memahami Teori Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.

Steger, Manfred B. 2005. *Globalisme Bangkitnya Ideologi Pasar*. Terjemahan Heru Prasetia. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Suseno, Franz Magnis. 2017. *Dalam Bayang-bayang Lenin Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Swasono, Sri-Edi. 2010. *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta.

Tasma, Agustinus Edward dan Heru Santosa. 2006. "Polemik Epistemologi Pancasila dan Demokrasi Yang

Konstruktif Beserta Implementasinya." Dalam *HUMANIKA Vol. 6 No. 1, Maret 2006, hlm. 85-94.*

Toffler, Alvin. 1973. *The Future Shock*. London: Pan Books Ltd.

Toffler, Alvin, and Heidi Toffler. 1993. *War and Anti War*. Boston, New York, Toronto, London: Little, Brown, and Company.

Weber, Max. 2001. *The Protestants Ethics and the Spirit of Capitalism*. Translated by Talcott Parsons. London: Routledge.

Wilczynski, Josef. 1981. *An Encyclopedic Dictionary of Marxisme, Socialism, and Communism*. London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd.

William, Colin C., and Jan Windebank. 1998. *Informal Employment in The Advanced Economies Implications for Work and Welfare*. London and New York: Routledge.

Winarno, Budi. 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

JURNAL, TESIS, ORASI ILMIAH, DAN MAKALAH SEMINAR:

Anonim. 2016. "Ekonomi Solidaritas Wawancara dengan Paul Singer." Dalam *Dialog Global Volume 6 Edisi 1, Maret 2016.*

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. 2017. "The Two Form of Capitalism: Developmentalism and Economic Liberalism." In *Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 37, No. 4 (149), October-December 2017, pp. 680-703*.

Dian Supyan, Muhammad. 2016. "Gerakan Darul Islam R.M. Kartosoewiryo di Jawa Barat dalam mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) (1945-1962 M)." *Tesis pada Prodi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Gerung, Rocky. 2018. "Pancasila: Ide Penuntun, bukan Pengatur." Dalam *Prisma, Vol. 37 No. 2, 2018. Hlm. 40-48*.

Hadiz, Vedi R. 2009. "Krisis Ekonomi Dunia dan Indonesia." Dalam *Prisma No. 1, Vol. 28, Juni 2009.*

Handoyo, Eko. 2018. "Pancasila Pengokoh Integrasi Nasional di Era Disrupsi Sebuah Strategi untuk Mengawal Mental Generasi Z." Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional "Penguatan Integrasi Nasional di Era Disrupsi dalam Perspektif Pancasila", selenggaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES Semarang, Kamis, 13 September 2018.*

Latif, Yudi. 2009. "Requiem Dini, Krisis Finansial, dan Krisis Demokrasi." Dalam *Prisma No. 1, Vol. 28, Juni 2009.*

Lenin, W.I. 1961. "Tentang Adjaran-adjaran Karl Marx". Dalam *Pustaka Ketjil Marxis No. 1, Jajasan Pembaruan, Tjetakan Ke III, 1961.*

Lukmantoro, Triono. "Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital". Dalam *Profetik Jurnal Komunikasi, Vol 10/No. 01/April 2017. Hlm. 50-71*.

Makhlani. 2012. "Keruntuhan Sistem Kapitalisme dan Apakah Ekonomi Silam Dapat Memimpin Dunia Menyongsong Indonesia 2050." *Makalah disampaikan dalam Public Lecture di Program Parcasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya, Februari 2012*.

Nawatmi, Sri. 2009. "Kerapuhan Sistem Kapitalis." Dalam *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol 1 No. 1, Februari 2009, hlm. 29-38.*

Novianto, Arif, dkk. 2016. "Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19, Nomor 3, Maret 2016, halaman 181-199*.

Pangiuk, Ambok. 2011. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)." *Nalar Fiqh. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011. Hlm. 1-19.*

Piliyanti, Indah. 2009. "Menggugat Sistem Kapitalisme." Dalam *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume III, No. 1, Juli 2009, hlm. 46-55.*

Saidi, Anas. 2018. "Politik Identitas Keagamaan, Pancasila, dan Dilema Demokrasi." Dalam *Prisma, Vol. 37 No. 2, 2018. Hlm. 59-71*.

Santoso, Purbayu Budi. "Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi." *Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 11 Maret 2010*.

Sanur L., Debora. 2016. "Komunisme Kembali Mengancam Indonesia." Dalam *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol VIII, No. 10/II/P3DI/Mei 2016. Hlm. 17-20*.

Widianto, Ahmad Arif. 2018. "Meninjau Radikalisme Pemuda dalam Polemik Kontestasi Ideologi di Indonesia (Sebuah Refleksi Sosiologis)." Makalah disampaikan dalam *Sarasehan Kebangsaan "Radikalisme Pemuda dalam Polemik Kontestasi Ideologi di Indonesia (Sebuah Refleksi Sosiologis)" di UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang pada tanggal 6 April 2018*.

MAJALAH DAN KORAN:

Kompas, Senin, 29 Mei 2017, hlm 1.

Qodir, Zuly. 2018. "Hibriditas Kultural dan Radikalisme". Dalam *Harian KOMPAS, Rabu, 11 April 2018, halaman 7.*

INTERNET:

Sprague, Ted. 2015. Ketidaktahuan Tidak Pernah Menolong Siapapun: Pengantar Nalar yang Memberontak. Dalam https://www.militanindonesia.org/8560-ketidaktahuan-tidak-pernah-menolong-siapapun-pengantar-nalar-yang-memberontak.html. Diakses 8 Februari 2018.

GLOSARIUM

Anticipatory Democracy	:	Demokrasi Antisipatoris.
Artifisialitas Politis	:	Suatu ideologi yang diperlakukan sebagai dogma atau rekayasa politis yang dipaksakan yang kadang disertai teror negara kepada masyarakat.
Borjuis	:	Pemilik alat produksi.
Common Denominator	:	Penyebut yang sama.
Despotis	:	Kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang.
Developmentalism	:	Pembangunanisme.
Ersatz Capitalism	:	Kapitalisme semu.
Exchange	:	Pertukaran.
Founding fathers	:	Bapak Pendiri Bangsa.
Forces of Change	:	Kekuatan Pengubah.
Free-fight Liberalism	:	Sistem liberal dengan gontok-gontokan bebas.
Gerakan Reformasi	:	Gerakan menggugat absolutisme kekuasaan gereja Katolik di Eropa dalam urusan duniawi.
Globalisasi	:	Tidak ada batas geografi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Grants Economics	:	Ekonomi Beri.
Great Depression	:	Depresi Besar.
Growth Priority	:	Prioritas Pertumbuhan.
Hasrat To Be	:	Hasrat untuk mewujudkan kemampuan potensial.
Ideologi	:	Sistem keyakinan, sistem

		nilai, dan emosiemosi yang menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan kolektif.
Ideologi Politik	:	Bentuk pemikiran politik yang memberikan akses langsung yang penting memahami bentuk dan sifat teori politik, kekayaan, ragam, dan rinciannya.
Individualisme	:	Ideologi yang mengutamakan individu.
Integralistik	:	Penyatuan dan kesatuan unsur secara fungsional dan utuh.
Invisible hand	:	Tangan Tersembunyi.
Kapitalisme	:	Ideologi yang berbasis pada kapital atau modal yang dimiliki dan dikontrol oleh individu.
Kretinisme	:	Pemaksaan kebijakan negara maju terhadap negara sedang berkembang yang menyebabkan negara berkembang menderita keterbelakangan
Liberalisme	:	Ideologi yang mengutamakan kebebasan individu.
Liberalization of trade and industry	:	Liberalisasi perdagangan dan industri.

Marxisme	:	Ideologi yang dikembangkan Karl Marx.
MEAS	:	Mantikan eksistensi alam semesta.
Money-Capital-Money	:	Uang-Modal-Uang.
Negara Integralistik	:	Negara sebagai suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, dan semua anggotanya berhubungan erat satu sama lain sebagai persatuan masyarakat organis.
Neoliberalisme	:	Sebuah fenomena sosial politik yang biasanya dialamatkan pada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.
Over-regulation	:	Pengaturan yang berlebihan.
Pancasila	:	Ideologi bangsa Indonesia yang didasarkan pada prinsip keseimbangan antara individu dan sosial.
Patriarkat	:	Sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak.
Pembangunan	:	Penguatan basis material

		suatu negara, melalui industrialisasi, mengikuti pola yang sangat mirip dari satu negara ke negara lain.
Political power grows from the barrel of the gun	:	Kekuasaan Politik tumbuh dari laras senapan.
Pop Culture	:	Budaya pop.
Posit an ultimate value	:	Memberikan nilai tertinggi.
Privatization of state-owned enterprises	:	Privatisasi perusahaan milik negara.
Production of Space	:	Penciptaan perluasan ruang
Proletar	:	Kaum Pekerja.
Protestant Ethic	:	Etika Protestan.
Redistribution with Growth	:	Redistribusi dengan Pertumbuhan.
Renaissance	:	Masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa (abad 14 ke abad 17) yang ditandai oleh perhatian kembali kepada kesusasteraan klasik, berkembangnya kesenian dan kesusasteraan baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern.
Self seeking	:	Mengutamakan kepentingan sendiri.
Service Provider	:	Penyedia Layanan.
Set of Philosophy	:	Serangkaian Filsafat.
Snowball	:	Bola Salju.
Soft Power	:	Kekuatan Lunak.

Sosialisme	:	Ideologi yang mengutamakan kepemilikan kolektif.
State of perfect equality	:	Keadaan Sama Sempurna.
State of perfect freedom	:	Keadaan Bebas Sempurna.
Subprime Mortgage	:	Kredit Perumahan.
The Organizer of Society	:	Pengorganisasian Masyarakat.
The Wealth of Nation	:	Kesejahteraan Bangsa.
To Need to Help Others	:	Kebutuhan menolong orang lain.
Way of life	:	Cara Hidup.
Welfare State	:	Negara Kesejahteraan.

INDEKS

A

agama 3, 29, 31, 69, 167, 196, 198, 199, 235, 238, 239, 240, 247, 249, 250, 251, 253, 257, 258
akumulasi kekayaan 46, 88
alat produksi 6, 46, 79, 130, 142, 149, 151, 152, 157, 163, 166, 168, 268
alienasi 57, 58, 59, 60, 70, 160, 161, 165, 183
Amerika Serikat 13, 15, 26, 48, 49, 53, 62, 64, 67, 68, 74, 80, 85, 87, 91, 97, 99, 216, 217, 236
Analisis viii, 11, 76, 107, 109, 127, 154, 164, 178, 181, 215, 220, 224, 229

B

bangsa Indonesia v, 18, 22, 190, 191, 192, 242, 246, 247, 248, 270
budaya 98, 102, 109, 110, 124, 125, 127, 141, 167, 181, 189, 194, 198, 206, 218, 220, 223, 224, 226, 230, 245, 246, 260, 261, 268, 271
buruh 40, 41, 45, 49, 57, 58, 82, 88, 117, 131, 132, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 149, 153, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 174, 175, 176, 177, 234

D

Demokrasi 7,17,56,57,113,137, 143, 155, 156, 158, 172, 187, 194, 197, 209, 210, 212, 213, 216, 230, 233, 252, 255, 264, 266
developmentalisme iv, v, viii, 24, 29, 67, 72, 98, 99, 100, 109, 113, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 268
disiplin 37,41, 149, 170
dominasi 33, 40, 41, 46, 54, 55, 66, 81, 87, 88, 99, 100, 101, 122, 123, 127, 151, 163, 169, 181, 188, 215, 218

E

ekonomi politik 184
ekonomi sosialisme 74, 151, 155, 156
eksploitasi 11, 45, 101, 103, 126, 127, 133, 142, 163, 164, 167, 169, 179, 180, 183, 221
eropa barat 10, 34, 37, 74, 132, 144

G

gagasan vi, 1, 4, 6, 8, 26, 27, 35, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 96, 99, 129, 131, 132, 134, 140, 143, 179, 181, 190, 192, 194, 252, 270
Globalisasi ix, 106, 111, 186, 188, 189, 227, 240, 242, 243, 256, 257, 260, 261, 268
Gotong royong 83, 96

H

Hak asasi 49, 219, 220, 224, 225

I

Ideologi Ekonomi 60, 149, 155, 156, 238
Ideologi Politik vii, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 175, 261, 269
individu iii, 8, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 35, 36, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 64, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 121, 123, 126, 130, 146, 149, 158, 159
individualisme iv, 2, 27, 29, 30, 31, 69, 80, 95, 189, 192, 201, 213, 218, 219, 220, 223, 227, 229, 236, 237, 256, 269
Integralistik ix, 193, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 213, 215, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 244, 246, 255, 256, 257, 259, 260, 264, 269, 270
investasi 32, 53, 63, 75, 80, 82, 88, 102, 124, 187
Islam 29, 144, 150, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 199, 237, 238, 239,

249, 250, 251, 252, 253, 257, 259, 265, 266

K

Kapitalisme iv, v, vi, vii. x, 2, 6, 11, 13, 17, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 79, 89, 93, 98, 99, 100, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 216, 220, 240, 259, 262, 264, 266, 268, 269
kebebasan 2, 17, 19, 24, 25, 27, 31, 47, 48, 49, 67, 69, 73, 79, 82, 84, 85, 87, 95, 146, 149, 153, 154, 155, 156, 178, 219, 220, 269
kebersamaan 151, 157, 204, 207, 208, 209, 213, 244, 245, 255, 258
kekerasan 10, 20, 40, 61, 124, 139, 176, 239, 253, 264
kekuasaan 8, 25, 35, 37, 40, 41, 50, 54, 81, 84, 85, 86, 94, 149, 163, 170, 172, 175, 177, 188, 208, 217, 234, 254, 268, 271
kelas 6, 8, 20, 45, 109, 131, 133, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 151, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 192, 193, 261, 262
kekuatan 6, 21, 23, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 52, 61, 72, 88, 105, 144, 155, 166, 169, 170, 173, 175, 180, 217, 226, 233, 234, 237, 263, 268, 271
kelompok iv, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 50, 57, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 88, 94, 102, 117, 132, 133, 134, 139, 151, 174, 182, 199, 230, 234, 235, 238, 239, 240, 252, 254, 270
kemiskinan 36, 51, 90, 91, 103, 104, 110, 120, 122, 136, 197, 264
kepemimpinan 68, 86, 97, 176, 178, 181
kerjasama 47, 77, 89, 135
kesadaran 6, 7, 133, 140, 143, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 206, 228, 239
Keseimbangan 2, 83, 213, 214, 240, 241, 270
kesejahteraan 1, 2, 25, 27, 74, 80, 83, 87, 93, 96, 97, 116, 117, 120, 126, 128, 130, 133, 142, 146, 147, 148, 154, 157, 161, 184, 192, 194, 197, 225, 230, 231, 232, 261, 264, 272
kewajiban 2, 115, 198, 199, 206, 207, 213, 214, 215, 237, 244, 255
keyakinan iv, v, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 69, 82, 83, 96, 131, 135, 138, 154, 177, 180, 203, 240, 248, 268
komoditas 66, 67, 179, 182
kompetisi47, 54, 55, 56, 87, 117, 121, 147, 148, 150
komunisme iv, ix, 26, 29, 139, 143, 144, 145, 151, 160, 162, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 189, 201, 215, 216, 217, 238, 260, 261, 267
konsumen 50, 113, 155, 156, 187, 221
kontrol 32, 54, 82, 101, 146, 148, 149, 157, 269

L

laba 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 57, 125, 151, 152
lemah 30, 46, 66, 67, 70, 77, 103, 106, 112, 134, 152, 155, 171, 216, 237
liberalisme-kapitalisme iv, vi, 11, 13, 17, 25, 26, 29, 216

M

marxismeiv, v, vi, viii, 20, 24, 25, 29, 139, 159, 160, 162, 164, 170, 174, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 194, 215, 261, 263, 264, 265, 270
masyarakat Indonesia 22, 193, 241, 247, 277
M-C-M 38, 39, 40, 45
MEAS 202, 210, 211, 212, 243, 255, 270
memberi vi, 4, 9, 13, 19, 21, 22, 23, 31, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 58, 68, 70, 71, 76, 80, 84, 88, 90, 116, 122, 128, 134, 135, 136, 151, 161, 163, 192, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 229, 232, 233, 243, 244, 249, 258, 269
modal 7, 3, 49, 60, 63, 66, 73, 76, 77, 78, 89, 91, 94, 105, 110, 113, 117, 132, 138, 147, 165, 171, 269, 270

N

negara maju 70, 74, 77, 81, 87, 91, 96, 97, 99, 101, 104, 110, 111, 123, 125, 127, 128, 269
negara sedang berkembang 70, 72, 78, 99, 101, 123, 125, 128, 269
neoliberalisme v, vii, 24, 29, 60, 67, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 119, 123, 127, 238, 262, 264, 265, 270
Neo-Marxisme viii, 178, 185

O

organisasi 9, 14, 20, 33, 37, 38, 39, 53, 55, 85, 111, 137, 139, 146, 154, 155, 157, 170, 171, 176, 187, 189, 208, 209, 226, 232, 235, 272
otoritarianisme 90

P

Pancasila ii, iii, v, vi, ix, 2, 9, 18, 21, 22, 27, 186, 189, 190, 194, 198, 199, 200, 201, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270
partai politik 1, 144
pasar bebas vii, 47, 48, 49, 50, 51, 73, 77, 78, 82, 85, 87, 95, 131, 261
pekerja 57, 58, 59, 60, 67, 70,91,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 172, 179
Pembangunanisme viii, 99, 100, 101, 114, 119, 123, 127, 259, 268
pengetahuan 10, 14, 15, 28, 31, 37, 60, 87, 111, 124, 160, 168, 169, 186, 223, 262, 271
peradaban ix, 22, 49, 84, 118, 124, 133, 151, 188, 215, 218, 220, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 236, 237, 240, 243, 256, 257
perencanaan 2, 94, 95, 149, 150, 157, 262
pertumbuhan ekonomi 51, 75, 76, 89, 91, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 124, 126, 222
politik vii, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 56, 69, 73, 74, 89, 90, 98, 106, 114, 116, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 146, 149, 154, 156, 157, 159, 163, 167, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 189, 201, 220, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 261, 262, 263, 266, 268, 269, 270, 271
praktik viii, 60, 67, 70, 74, 78, 87, 111, 113, 118, 127, 128, 135, 144, 145, 148, 153, 154, 155, 157, 167, 189, 190, 197, 237
produksi 6, 21, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 55, 57, 59, 66, 67, 74, 76, 78, 79, 102, 104, 107, 108, 112, 120, 130, 139, 142, 143, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 160 161, 162, 163, 164, 166, 168, 183, 217, 221, 222, 226, 227, 231, 266, 268

produsen 45, 47, 66, 156, 221

R

radikalisme vi, 238, 239, 267
revolusioner 9, 29, 80, 84, 87, 103, 108, 140, 146

S

selatan 56, 93, 99, 100, 126, 250, 259
sikap 1, 3, 35, 205, 226
sistem nilai iv, v, vi, 1, 2, 4, 7, 25, 72, 248, 249, 268, 269
sosial ekonomi v, viii, 3, 37, 38, 42, 94, 95, 132
sosial politik 73, 270
sosialisme iv, v, viii, 10, 24, 25, 100, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 173, 176, 216, 259, 260, 261, 263, 271
surplus 43, 44, 45, 52, 53, 56, 70, 103, 105, 121, 125, 142, 147, 163, 164, 182

T

tanggung jawab 2, 27, 83, 96
tertib politik 1, 2, 8, 11, 13, 27
tindakan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 28, 41, 80, 88, 131, 169, 219, 239, 269

U

uang 38, 39, 40, 41, 45, 52, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 77, 168, 270
upah 43, 44, 45, 58, 82, 131, 142, 147, 161, 162, 183
Utara. iv, 32, 91, 99, 126, 182, 236

BIODATA
KETUA PENULIS

Eko Handoyo dilahirkan di Pati pada tanggal 8 Juni 1964. Selepas SMA melanjutkan studi ke IKIP Semarang. Gelar Sarjana Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara diraihnya pada tahun 1987 dengan predikat sebagai "wisudawan terbaik" FPIPS IKIP Semarang. Sejak tahun 1988 menjadi dosen di almamaternya, IKIP Semarang (kini menjadi Universitas Negeri Semarang). Bulan September 1995 melanjutkan kuliah S2 dengan mengambil program studi Ketahanan Nasional dan lulus pada bulan Februari 1998. Tahun 2009 Eko meneruskan studi S3 pada program Doktor Studi Pembangunan di UKSW Salatiga dan diselesaikan dalam waktu 2 tahun 8 bulan dengan predikat "lulus dengan pujian." Jabatan fungsional sebagai dosen adalah lektor kepala, dengan golongan pangkat IV-C. Eko adalah pengajar mata kuliah Etika Politik, Pendidikan Politik, Pendidikan Anti Korupsi, Kebijakan Publik, Manajemen Konflik, Politik Lingkungan, Dinamika Pembangunan Politik, dan Modal Sosial pada jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di Program Pascasarjana, Eko mengampu mata kuliah Manajemen PAUD, Filsafat Ilmu, Pengembangan Pembelajaran IPS, Pendidikan Karakter, dan Tata Pemerintahan Indonesia. Buku yang ditulis ini adalah buku **kesembilanbelas**, setelah buku Bunga Rampai Politik dan Hukum (Editor dan Penulis, 2006), Studi Masyarakat Indonesia (Ketua Penulis, 2007), Sosiologi Politik (Mandiri, 2008, 2013), Pendidikan Anti Korupsi (Mandiri, 2009), Pengantar Ilmu Sosial (Anggota Penulis, 2010, 2017), Pendidikan IPS (Kontributor, 2010), Pancasila dalam

Perspektif Kefilsafatan & Praksis (Ketua Penulis, 2010), Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi Pengalaman Universitas Negeri Semarang (Ketua Penulis, 2010), Pendidikan IPS Edisi Revisi (Kontributor, 2011), Kebijakan Publik (Mandiri, 2012), Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi (Mandiri, 2013), Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Karakter Bangsa (Kontributor, 2013), Etika Politik Edisi Revisi (Ketua Penulis, 2016), Studi Masyarakat Indonesia Edisi Revisi (Ketua Penulis, 2015), Pendidikan Politik (Ketua Penulis, 2017), Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang (Ketua Penulis, 2017), Tiga Pilar Konservasi Penopang Rumah Ilmu Pengembang Peradaban Unggul (Anggota Penulis, 2017) dan Pendidikan Konservasi Tiga Pilar (Anggota Penulis, 2018).